Dr. Husain.As, M.Pd

PELAYANAN PUBLIK

BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Dr. Husain.As, M.Pd

PELAYANAN PUBLIK

BERBASIS KEARIFAN LOKAL

SYAKIR MEDIA PRESS

Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal

@Syakir Media Press

All right reserved

Penulis :

Dr. Husain As, M.Pd

Editor :

Dr. Patta Rapanna, SE., M.Si

Desain Sampul :

Fahmi Jalsan

Lay out

Kru Syakir

ISBN 978-623-97534-4-3

Cetakan I, Februari 2022

x,220 Halaman, 23 cm x 15,5 cm

CV. syakir Media Press

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Allah Azza Waa Jalla, atas kodrat dan iradat dari Allah Taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa pula, Sholawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad, SAW. Mudah-mudahan di tahun ini Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian dapat meraih sukses besar dan menjadi individu yang lebih baik dalam menerima perbedaan.

Berbagai tantangan yang datang silih berganti selama dalam penyelesaian buku ini, namun berkat prinsip nenek moyang kami bahwa; *kualleangi tallanga natowalia*, akhirnya buku ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terimakasih Kepada Bapak Prof.Dr.Jasruddin,M.Si, , Dr.Muh.Yunus,M.Pd, Ketua STKIP-PI dan Dr.H.Muh.Yahya, M.Pd, Direktur Pps, serta dosen beserta Staf pengajar STKIP-PI, lainnya yang telah memberi semangat dan dukungan kepada Penulis.

Teristimewa kepada Ayahanda H.Abdullah Abbas, dan Ibunda Hj.Saenab Taddewe, mertuaku Abdul Wahid Rahman dan Ibu Norma Norbit, Adinda Bahtiar Abdullah, yang semuanya telah berpulang kerahmatullah, karenanya mohon izin pada kesempatan ini kami mengirimkan doa (*Rabbighfir li, wa li walidayya, warham huma kama rabbayani shaghira*). Demikian pula kepada Abang Drs. Kaharuddin Abdullah, serta semua saudaraku, Kepada Istriku, Putraputriku tercinta: Santri, Aiminor, Binar, Satya, serta sibungsu Syafiq, yang senantiasa menghibur dengan tingkahnya yang lucu. Terimakasih juga, kepada Penerbit dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan saran, semoga segalanya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna, karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan, agar buku ini menjadi referensi bagi upaya pembangunan sumber daya manusia untuk kejayaan bangsa dan Negara Indonesia. Wassalam.

Makassar, februari 2022

Dr. Husain.As, M.Pd

DAFTAR ISI

BAB 1 PELAYANAN PUBLIK DI DUNIA	01
A. Pelayanan Publik	01
B. Permasalahan Pelayanan Publik	02
C. Pemecahan Masalah Pelayanan Publik	04
BAB 2 STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DI NEGARA	
DUNIA KE TIGA	09
A. Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik	09
B. Keterbukaan Informasi Publik dan Asas Transparansi	09
C. Indikator dalam Mengukur Transparansi	10
D. Transparansi dan Partisipasi	11
E. Strategi dalam Muwujudkan Transparansi dan artisipasi Dalam Pelayanan Publik	12
F. Pelayanan Publik di Indonesia	13
G. Pelayanan Publik : Beberapa Definisi	18
H. Pelayanan Publik Perspektif Islam	20
BAB 3 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI	
INDONESIA.....	23
A. Pengertian Sumber Daya Manusia	23
B. Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia	23
C. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Geologi.....	31
D. Pengembangan Sumber Daya Manusia	33
BAB 4 KEARIFAN LOKAL	37
A. Definisi Kearifan Lokal	37
B. Faktor Kearifan Lokal	38
C. Pentingnya Kearifan Lokal Dalam Pembangunan	39
D. Kearifan Lokal Dan Tantangan Zaman	42
E. Kearifan Lokal Dan Penguatan SDM	48
F. Mutu Kearifan Lokal Dalam System Pembangunan Daerah	54

G. SDM Masyarakat Adat Diperkuat Demi Memperkaya Tradisi Lokal	57
H. Kearifan Lokal di Indonesia	58
I. Kebudayaan Jawa	64
J. Kearifan Lokal Masyarakat Desa	72
K. Gotong Royong Dalam Perspektif Kearifan Lokal	97
BAB 5 TANTANGAN PELAYANAN PUBLIK	
DI DAERAH PELOSOK/PEDALAMAN	99
A. Tantangan Pelayanan Publik 2021	99
B. Tiga tantangan	99
C. Tantangan 202.....	102
BAB 6 PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA	
103	
A. Perilaku Sosial	103
B. Faktor-Faktor Pembentuk Perilaku Sosial	104
C. Bentuk dan Jenis Perilaku Sosial	105
D. Interaksi Sosial	108
BAB 7 RAGAM PERSOALAN PELAYANAN	
PUBLIK DI DESA DAN DI KOTA	113
A. Ruang Lingkup Pelayanan Publik	114
B. Tantangan Pelayanan Publik di Desa	115
BAB 8 GLOBALISASI DAN KEARIFAN LOKAL	
DI NEGARA BERKEMBANG	119
A. Defenisi Kearifan Lokal	119
B. Defenisi Globalisasi	120
C. Macam-Macam Globalisasi	121
D. Pengaruh Globalisasi terhadap Kearifan Lokal	123
E. Cara Meredam Pengaruh Globalisasi terhadap Kearifan Lokal.....	125
BAB 9 PELAYANAN PUBLIK BERBASIS MASYARAKAT	127
BAB 10 SINERGITAS PEMBANGUNAN DI BALUTAN	
KEARIFAN LOKAL	133

A. Ancaman Ekologis dan Sosial Budaya Masyarakat Sumba sekapur Sirih.....	133
B. Padang penggembalaan Ternak (Hilang) Vs Perkebunan Tebu (Hadir).....	134
C. Kearifan Lokal Masyarakat Di Dunia	137
D. Ragam Kearifan Lokal Di Indonesia	157
E. Kebijakan Pelestarian Kearifan Lokal	161
F. Manfaat Kearifan Lokal Dalam Konteks Pembangunan Di Indonesia	167
G. Sinergitas Pembangunan Di Balutan Kearifan Lokal ..	177
BAB 11 KEPEMIMPINAN GLOBAL DI LAUTAN KEARIFAN LOKAL	183
A. Latar Belakang	183
B. Pembahasan	185
C. Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal Daerah	194
D. Kepemimpinan Berbasis Pelayanan	198
BAB 12 KEARIFAN LOKAL DAN TANTANGAN ZAMAN .	203
A. Berfikir Global Bertindak Lokal	206
BAB 13 PELAYANAN PUBLIK DALAM KEARIFAN LOKAL	211
A. Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal Pengalaman RSUP Dr.R.D.Kandou Manado.....	211
B. Percepat Reformasi Birokrasi dengan Kearifan Lokal	212
C. Inovasi Pelayanan Publik Bergeliat, Ganjar : Kearifan Lokal Jangan Ditinggal	214
D. Ganjar : Inovasi Pelayanan Publik Harus Perhatikan Kearifan Lokal	216
E. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Berazaskan Kearifan Lokal	217
DAFTAR PUSTAKA.....	219

BAB 1

PELAYANAN PUBLIK DI DUNIA

A. Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas Pemerintahan Daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (Pemerintahan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.

Sejak diberlakukan penerapan UU No. 22 Tahun 1999 telah terjadi pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara bangsa. Desentralisasi (*devolusi*) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan

meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.

Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.

B. Permasalahan Pelayanan Publik

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

- a. *Kurang responsif*. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan

penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

b. *Kurang informatif*. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

c. *Kurang accessible*. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.

d. *Kurang koordinasi*. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

e. *Birokratis*. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (*front line staff*) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

f. *Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat*. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/ aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu

g. *Inefisien*. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.

Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

C. Pemecahan Masalah Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelayanan.

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya

pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP).

Untuk memastikan Bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:

- Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan *uninterrupted*. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;
- Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
- Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
- Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;
- Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang

akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas;

3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan.

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik;

4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan.

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan; Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara *private* untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain: *contracting out*, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran sebagai pengatur; *franchising*, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan *price regularity* untuk mengatur harga maksimum. Dalam banyak hal pemerintah juga dapat melakukan privatisasi.

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan.

➤ **Strategi Wujudkan Pelayanan Publik Berkelas Dunia**

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui berbagai strategi. Strategi ini dilakukan secara bertahap hingga pada akhirnya terwujud pelayanan publik berkelas dunia di tahun 2025. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menyampaikan bahwa terdapat tiga tahap yang harus dilakukan. “Tahap pertama penguatan regulasi dibidang pelayanan publik dengan penetapan Undang-Undang No. 25/2009 dan berbagai peraturan turunannya,” ujarnya dalam acara Talkshow Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021, secara virtual, Rabu (14/04).

Kedua, implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dilaksanakan secara konsisten hingga level penyelenggara pelayanan, melalui berbagai diseminasi kebijakan, pendampingan, dan monev pelaksanaan. Pada tahap ketiga, peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan mendorong berbagai terobosan. “Terobosan ini antara lain integrasi pelayanan publik, replikasi atau *scaling-up* inovasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan publik mendorong terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia pada setiap instansi pemerintah. *Roadmap* bidang pelayanan publik diperlukan oleh Kementerian PANRB dan juga seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan *monitoring* evaluasi pada berbagai tingkatan guna mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia pada 2020-2025.

Berbagai kebijakan dan upaya dilakukan Kementerian PANRB untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik. Salah satunya dengan penguatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi

SP4N-LAPOR!. Terobosan kanal pengaduan tersebut menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

Dalam mendukung iklim investasi, Kementerian PANB juga mendorong pemerintah daerah membangun mal pelayanan publik (MPP). MPP mengintegrasikan layanan dalam satu gedung, baik yang diberikan oleh instansi pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD. Kehadirannya diberbagai daerah diharapkan sebagai langkah untuk meningkatkan nilai Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia.

Kehadiran MPP merupakan perwujudan birokrasi 4.0 yang diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi yang mampu menghadirkan pelayanan terbaik sehingga berdampak pada tumbuhnya minat investasi para investor. “Selain itu, hadirnya MPP sebagai upaya untuk mengubah pola pikir ego sektoral antar-institusi menjadi kerja bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri Suprayitno menyatakan kesiapannya guna mendukung program reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik terutama di daerah. Selain itu adanya masukan serta *sharing session* perihal pelayanan publik diharapkan mempercepat perbaikan layanan publik oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

BAB 2

STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DI NEGARA DUNIA KE TIGA

A. Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara tersirat menggambarkan pentingnya negara memenuhi pelayanan publik. Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik. Pada sisi aturan misalnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam hal tersebut.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan *good governance* dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah. Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan oleh pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik ? Sebaliknya, apabila masyarakat tidak dapat mengawasi pelayanan publik, maka bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud ? Sampai pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan carut marutnya penyelenggaraan negara.

B. Keterbukaan Informasi Publik dan Asas Transparansi

Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara dan pelaksana urusan negara dalam mewujudkan transparansi ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah dapat mewujudkannya melalui keterbukaan publik. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dan transparansi dapat membentuk suatu *check and balance* dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Implikasi positif terbesar dari transparansi adalah penegakan hukum yang mantap dan pemberantasan praktik KKN. Mengapa ? Karena apabila transparansi rendah akan memberikan peluang dan kesempatan para penegak hukum dan pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaan.

C. Indikator dalam Mengukur Transparansi

Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting transparansi terhadap pelayanan publik ? Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Terdapat tiga indikator dalam mengukur transparansi pelayanan publik. Pertama, tingkat keterbukaan pada proses

penyelenggaraan publik. Kedua, transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, transparansi pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui tiga indikator tersebut, maka dapat dilakukan pengukuran tentang sejauh mana Indonesia menerapkan transparansi dalam pelayanan publik. Pengukuran tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi transparansi pelayanan publik.

D. Transparansi dan Partisipasi

Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa transparansi sangat penting diwujudkan pada pelayanan publik. Ada satu asas lagi yang saling berkaitan dengan transparansi atau dapat dipahami sebagai implikasi positif dari transparansi, yaitu partisipasi. Pada era modern ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam bertindak dan bernegara dengan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal. Positifnya adalah masyarakat saat ini dapat aktif dan kritis dalam mengawasi perilaku pemerintah yang diwujudkan secara halus dalam dialog publik maupun demonstrasi. Meskipun, tidak serta merta partisipasi harus dilakukan secara anarkis. Masyarakat perlu memahami pula tentang sikap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan pengawasan pada pelayanan publik.

Namun, apakah semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan semakin rendah transparansi publik ? Pertanyaan tersebut seringkali menjadi polemik. Sehingga perlu dipahami bersama bahwa transparansi dan partisipasi sangat berkaitan erat. Namun, untuk mewujudkannya, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah sebagai penyelenggara negara (pelayan publik) dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Dengan kata lain, belum tentu semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan semakin rendah transparansi publik. Bahkan, apabila partisipasi masyarakat tinggi, maka menunjukkan bahwa pemerintah mewujudkan transparansi yang baik karena masyarakat dapat menjalankan kewajibannya untuk terlibat dalam mengawasi dan

mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa kurang optimal serta terwujudnya *welfare state*. Untuk membentuk sinergitas tersebut, maka perlu upaya pemberdayaan kepada masyarakat dan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya informasi dalam mengawasi pelayanan publik. Kemudian, dari sisi pemerintah, perlu dipahami bahwa pemerintah merupakan pelayan publik sehingga segala aktivitasnya dilakukan demi kepentingan publik bukan kepentingan elit birokrasi dan politik. Sehingga redefinisi antara penyelenggara negara dengan masyarakat sebagai sentral pemegang kekuasaan dan pengawas pelayanan publik perlu diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik untuk melindungi hak-hak politik, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya.

E. Strategi dalam Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik

Beberapa strategi agar transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan antara lain, pertama, mengidentifikasi Peran Masyarakat. Aspek ini menjadi penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Menurut Korten dan Uphoff bahwa masyarakat merupakan akar rumput yang harus diperhatikan hak dan kewajibannya. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kedua, meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal. Ombudsman RI merupakan lembaga negara pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik. Ombudsman juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal. Sehingga lembaga ini perlu didukung penuh oleh pemerintah sehingga terwujud pelayanan publik yang prima.

Ketiga, komitmen dari pemerintah. Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mampu mengawal proses pelayanan publik. Selain itu, mengajak masyarakat, misalnya dalam dialog publik untuk sama-sama mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa masih kurang optimal.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya transparansi, maka partisipasi tidak dapat berjalan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sehingga transparansi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik.

F. Pelayanan Publik Di Indonesia

Birokrasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting di dalam masyarakat, salah satunya adalah melaksanakan pelayanan publik. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan birokrasi dalam hal Pelayanan Publik di setiap negara tentunya berbeda, begitu juga di antara negara berkembang dengan negara maju seperti Indonesia dan Jepang. Baik buruknya kualitas Pelayanan Publik merupakan parameter yang paling mendasar dalam mengukur efektivitas sebuah birokrasi pemerintahan. Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia masih sangat rendah baik pada tingkat kebijakan maupun implementasi peraturan. Rendahnya

kualitas Pelayanan Publik dipengaruhi oleh rendahnya kualitas kebijakan dan sumber daya manusia (SDM). Banyak masalah penting yang terjadi di lapangan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan, serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik itu sendiri. Berdasarkan data Ombudsman RI tahun 2015, terdapat 6.859 laporan masyarakat yang masuk terkait kinerja aparatur pemerintah, dan ada sepuluh institusi yang banyak dilaporkan oleh masyarakat, diantaranya pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan negeri, perbankan, dan kejaksaan. Untuk mengoptimalisasi Pelayanan Publik oleh birokrasi pemerintahan bukan suatu pekerjaan yang mudah, mengingat optimalisasi menyangkut banyak aspek yang telah membudaya dalam birokrasi pemerintahan sejak dahulu. Dimana salah satu aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang tidak kondusif. Permasalahan utama Pelayanan Publik pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, antara lain pola penyelenggaraan, dukungan sumber daya manusia, kelembagaan serta adanya konsep yang jelas.

Di Indonesia, pelayanan publik selama ini masih dinilai masyarakat sangat rumit dan bertele-tele, karena dalam memberikan pelayanan publik, birokrasi di Indonesia dibuat menjadi lebih sulit. Bahkan sudah menjadi rahasia umum dalam pemberian pelayanan publik di Indonesia terkadang disalahgunakan oleh para birokrat, sebagian dari mereka menjadikan Pelayanan Publik sebagai sumber pendapatannya dengan meminta bayaran kepada masyarakat yang ingin urusannya di pemerintahan dapat diurus dengan cepat, sehingga menciptakan biaya tinggi. Oleh karena itu, Pelayanan Publik di kantor pemerintahan Indonesia masih terbilang buruk, walaupun saat ini, di era Jokowi Pelayanan Publik mulai berbenah dan perlahan bertambah baik dengan adanya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Sedikit bercerita tentang Pelayanan Publik di Jepang, Pelayanan Publik dirasakan oleh masyarakatnya telah berada pada tahap memuaskan. Pelayanan Publik yang ada baik di bidang pelayanan secara langsung kepada masyarakat ataupun dalam peran birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif dan efisien. Kualitas yang prima pada Pelayanan Publik di Jepang dipengaruhi oleh SDM yang berkualitas, dimana aparatur negara sebagai pelaksana Pelayanan Publik di Jepang berkedudukan sebagai aparatur negara memiliki kapabilitas dan kualitas yang baik. Proses seleksi untuk menjadi aparat negara dilakukan melalui penyeleksian yang memiliki standar dan sistem evaluasi. Selain itu, profesi aparat pemerintah dalam pandangan masyarakat Jepang memiliki prestise yang tinggi, sehingga banyak dari lulusan universitas-universitas terkenal di Jepang, terutama Universitas Tokyo dan Universitas Kyoto memilih untuk mengikuti seleksi tersebut untuk menjadi aparat pemerintah. Selain itu, sebagian masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Dari sisi administrasi dan birokrasi pun diberikan pelayanan secara profesional dan memadai. Saat mengurus surat atau dokumen pada instansi pemerintahan, kita tak perlu khawatir akan keharusan menyediakan uang administrasi agar surat atau dokumen yang kita butuhkan dapat selesai. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pegawai pemerintahan akan tersinggung apabila kita memberikan uang terima kasih atau tip atas pelayanan cepat yang telah mereka berikan.

Birokrasi yang ribet, lama dan berbelit-belit itulah yang Penulis rasakan saat akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat tanah di Kantor Kelurahan atau Kecamatan di Indonesia. Tetapi, hal itu sangat berbeda dan tidak

Penulis rasakan pada saat Penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Jepang. Di sana Penulis melihat bahwa pelayanan yang optimal merupakan salah satu kunci keberhasilan Jepang dalam membangun negaranya menjadi lebih maju. Selama tinggal disana Penulis banyak dimanjakan oleh berbagai kemudahan dan fasilitas Pelayanan Publik di Negeri Sakura, seperti pembuatan residence card atau KTP istilahnya di Indonesia, kartu asuransi, dan lain lain bisa langsung Penulis lakukan dan dapatkan surat-suratnya pada saat Penulis sampai dan melaporkan diri di Kantor Kecamatan di Jepang. Berdasarkan pengalaman Penulis selama tinggal di Jepang sebagai muslim yang tergolong minoritas, perkembangan penyediaan layanan bagi muslim yang tinggal di Jepang sangat baik. Dalam hal ini pemerintah sangat cepat dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pendatang maupun penduduk asli yang bermukim di Jepang. Banyak hal yang Penulis pelajari disini, bahwa Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatnya, serta peran aktif masyarakat dalam membantu jalannya Pelayanan Publik.

Berdasarkan uraian di atas, kondisi Pelayanan Publik di Indonesia masih sangat buruk dan masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait masalah pelayanan terhadap publik. Gambaran umum pelayanan di Indonesia masih diwarnai dengan adanya tindakan pungutan liar, pelayanan yang berbelit-belit, penyelenggara pelayanan yang tidak ramah, serta praktek KKN yang masih sering ditemukan.

Buruknya Pelayanan Publik juga diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengingatkan para pejabat publik termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bekerja lebih profesional. Semoga kedepannya pemerintah dan masyarakat di Indonesia dapat bekerja sama dalam menciptakan Pelayanan Publik yang lebih baik. Mental ingin selalu dilayani harus dibuang jauh-jauh oleh para pelaku penyedia fasilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Lakukan yang terbaik untuk masyarakat, karena sebagai petugas

Pelayanan Publik digaji dari masyarakat pengguna Pelayanan Publik tersebut.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau masyarakat, selain syarat adanya wilayah dan pengakuan dari negara lain. Rakyat atau masyarakat *vis a vis* pemerintah memiliki hak dan kewajiban demikian halnya pemerintah *vis a vis* rakyat memiliki hal yang sama.

Dalam tata hubungan pemerintah dengan masyarakat dikenal berbagai konsep seperti hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan atau hukum tata negara maupun hukum pelayanan publik. Hukum administrasi negara (*administrative law*) cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah Negara sehingga sering juga disebut hukum tata usaha negara. Hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Sedangkan Hukum Tata Pemerintahan menurut Faried Ali (1997:17), terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu Hukum Tata Pemerintahan Heteronom yaitu semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara. Yang kedua Hukum Tata Pemerintahan Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara.

Menurut Cornelis van Vollenhoven, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya dan menentukan organ-organ/lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan, dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ/lembaga-lembaga yang dimaksud.

Sementara hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan terdapat sanksi bagi

pelanggarnya. Karena itu Hukum Pelayanan Publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dibentuknya Hukum Pelayanan Publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pelayanan publik adalah *Good Governance* dan *Clean Government*. Hukum pelayanan publik sebagaimana hukum pada umumnya juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat menciptakan tatanan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putra, 2020).

G. Pelayanan Publik : Beberapa Definisi

Banyak pakar organisasi dan manajemen memberikan batasan yang berbeda-beda tentang definisi Pelayanan Publik. Kata dasar "Pelayanan" menurut Pasolong (2010:128), didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan definisi "Pelayanan Publik" menurut Mahmudi (2010:223), adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong (2007:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Sinambela dalam buku "Reformasi Pelayanan Publik" (2014:5) menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain."

Sementara pakar luar negeri seperti Roth (1926: 1) mendefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat baik secara umum (seperti museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis & Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Sementara definisi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh sebuah lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif bernama Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

H. Pelayanan Publik Perspektif Islam

Pelayanan publik dalam pandangan Islam bisa merujuk pada Al-Baqarah [2]: ayat 267: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. al-Baqarah [2]: 267.)

Menurut Rachmadi dan Muslim dalam Jurnal JURIS (Vol. 14 No. 2), dalam kandungan ayat tersebut, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia (bukan saja untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Apabila kita tarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa para petugas pelayan, hendaknya seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri (Rachmadi & Muslim, 2015).

Rujukan lain secara normatif Rasulullah bersabda: hayrunnash anfauhum linnash yang artinya "sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia" (HR Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) yang dihasankan oleh al-Albani didalam Shahihul Jami' no: 3289. Pengertian "baik" dalam hadist diatas tentunya bukan saja baik dalam pandangan manusia meskipun memiliki nilai relatif di mata manusia, tetapi "baik" dalam menurut Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya yang bernilai absolut. Dengan demikian hadist ini memiliki pengertian bahwa ketika seseorang membantu sesama manusia sehingga dirinya

bermanfaat bagi manusia lainnya maka termasuk kepada golongan "sebaik-baik manusia" dimata Allah Swt dan Rasul-Nya.

Jika seorang Muslim mengemban tugas sebagai pelayan publik, maka kandungan Al Quran dan hadist yang sebutkan di atas dapat menjadi inspirasi dalam melakukan aktivitasnya agar dapat bermanfaat bagi orang, bukan hanya mencari manfaat dari orang lain, apalagi memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya. Cara untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, salah satunya dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan orang tersebut sepanjang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Menolong dan bermanfaat bagi orang lain adalah perbuatan baik dan terpuji, baik di mata manusia maupun di mata Allah Swt dan Rasul-Nya.

BAB 3

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

A. Pengertian Sumber Daya Manusia

Secara sederhana (secara objektif) sumber daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau kemampuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan secara subjektif, sumber daya dapat diartikan segala sesuatu baik berupa benda maupun bukan benda yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana sumber daya manusia dapat diartikan sebagai seluruh penduduk yang berada di suatu wilayah atau tempat dengan ciri-ciri demografis dan sosial ekonomis.

Sumber daya manusia adalah semua potensi yang berhubungan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu bangsa atau negara. Sumber daya manusia harus memadai, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Segi kuantitas bersangkut paut dengan jumlah, kepadatan, dan mobilitas penduduk. Sedangkan kualitas terutama terutama dilihat dari beberapa aspek, seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kualitas tenaga kerja yang tersedia.

B. Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.

Agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Tanpa adanya peningkatan

koalitas, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai masalah dan menjadi beban pembangunan.

Analisis mengenai kualitas sumber daya manusia sering dibedakan menjadi kualitas fisik dan kualitas non fisik. Indikator yang dapat menggambarkan kualitas fisik penduduk meliputi tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan indeks mutu hidup. Kualitas non fisik meliputi kualitas spiritual keagamaan, kekaryan, etos kerja, kualitas kepribadian bermasyarakat, dan kualitas hubungan selaras dengan lingkungannya.

Sampai saat ini, baik kualitas fisik maupun non fisik sumber daya manusia Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena adanya kesulitan pengukuran kualitas non fisik, sehingga yang sering dijadikan patokan adalah kualitas fisik.

Kualitas kehidupan fisik penduduk setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan, letak geografis, dan ras genetiknya. Negara-negara yang berada disekitar khatulistiwa, kualitas penduduknya tergolong rendah dan negara-negara tersebut merupakan negara terbelakang di bidang ekonomi dibandingkan dengan negara-negara yang berada di daerah subtropis. Keadaan ini kemungkinan besar disebabkan karena daerah-daerah disekitar khatulistiwa tidak mengenal pergantian musim seperti di daerah sub tropis, sehingga mereka bisa hidup sepanjang tahun tanpa mengalami kesulitan mencari perlindungan terutama di musim dingin. Hal inilah yang mendidik penduduknya kurang berfikir untuk menghadapi tantangan alam, dan akhirnya menyebabkan sifat malas.

Dengan keadaan yang demikian, maka penduduk disekitar khatulistiwa hidupnya tetap miskin walaupun daerah-daerah tersebut kaya akan sumber daya alam. Keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan penduduk di daerah subtropis walaupun daerahnya tidak tersedia sumber daya alam yang banyak, namun mereka sanggup menguasai teknologi, sehingga hasil penguasaan teknologi tersebut membuat kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Indonesia yang mengedepankan sektor ekonomi yang selama ini menjadi prioritas pembangunan, ternyata tidak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

➤ Tiga faktor utama penentu HDI (Human Development Indeks) yang dikembangkan UNDP adalah :

i. Pendidikan

Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui, sebab dapat menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pendidikan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah tingkat putus sekolah yang tinggi. Walaupun putus sekolah itu sudah terjadi jauh sebelum krisis moneter, namun semakin menjadi-jadi setelah Indonesia mengalami krisis moneter.

Untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk, dapat dilakukan dengan cara memperhatikan data penduduk yang masih buta huruf, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Universitas. Semakin tinggi presentase penduduk yang masih berarti kualitas penduduk di negara yang bersangkutan dilihat dari aspek pendidikan sangat rendah. Dan secara umum bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih relatif rendah bahkan ada yang masih buta huruf.

➤ Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut di Indonesia, antara lain :

1. Biaya pendidikan relatif mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk terutama penduduk yang mempunyai penghasilan rendah.
2. Minat menyekolahkan masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah pedesaan terpencil. Dikalangan masyarakat pedesaan yang terpencil, seorang anak masih dianggap sebagai salah satu komoditas atau unit ekonomi keluarga. Banyak anak usia sekolah daripada disekolahkan lebih baik dipekerjakan untuk membantu orang tuanya
3. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memadai dan proporsional, terutama untuk sekolah lanjutan (SMP dan

SMA). Keterbatasan daya tampung di SMP dan SMA, menyebabkan lulusan SD tidak tertampung semuanya di tingkat yang lebih atas. Idealnya, kalau pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan wajib belajar sembilan tahun, proporsi SD dan SMP harus seimbang. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berusaha secara maksimal untuk menyediakan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.

4. Rendahnya kualitas sarana fisik

Banyak sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang gedung-gedungunya telah rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap dan banyak yang rusak, laboratorium tidak standart, serta pemakaian teknologi informasi tidak memadai. Bahkan yang lebih parah masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium.

5. Rendahnya kualitas guru.

Keadaan guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai mana tertuang dalam pasal 39 UU No.20/2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagian besar guru di Indonesia dikatakan tidak layak mengajar. Hal ini jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu, yang tingkat pendidikannya hanya sampai SPG (SMA) atau berpendidikan D2 ke bawah.

6. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai andil dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan 2005, idealnya guru mempunyai gaji bulanan sebesar Rp 3.000.000. Tetapi kenyataannya sekarang rata-rata gaji guru PNS Rp 1.500.000, guru bantu Rp

460.000, dan guru honorer rata-rata Rp10.000 per jam. Dengan pendapatan yang seperti itu, banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang buku/LKS, pedagang ponsel dan pulsa, dan sebagainya. Keadaan seperti ini juga mempunyai andil untuk mempengaruhi kualitas seorang guru. Seandainya guru-guru di Indonesia telah sejahtera, maka mereka akan benar-benar memusatkan segala aktivitasnya untuk melaksanakan tugasnya. Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk, merupakan suatu masalah yang perlu diatasi. Apabila tidak segera diatasi, persoalannya akan semakin berat dan kompleks.

➤ Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menangani masalah redahnya tingkat pendidikan, antara lain :

- ✓ Memperluas kesempatan belajar, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Selain itu perlu dilakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat bahwa pendidikan merupakan media strategis guna meningkatkan kualitas sumber daya insaniah.
- ✓ Meringankan biaya pendidikan dan membebaskan biaya bagi yang tidak mampu, serta memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Di dalam UUD juga dikatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan harganya murah.
- ✓ Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan, seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran dan pengangkatan guru serta ahli kependidikan yang profesional.

ii. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang perlu untuk ditingkatkan, sebab jika penduduk terus-

terusan sakit, akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Artinya, semakin banyak penduduk yang sakit, maka akan semakin rendah kualitas penduduk berdasarkan tingkat kesehatan.

Kondisi kesehatan dan gizi anak di Indonesia masih memprihatinkan. Selain cakupan yang masih rendah, program yang diselenggarakan itu masih masih terfragmentasi sehingga tidak menyentuh kebutuhan tumbuh kembang anak secara holistik. Rendahnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan program pengembangan anak usia dini mengakibatkan kondisi anak Indonesia masih memprihatinkan yang ditunjukkan dengan rendahnya derajat kesehatan dan gizi.

Masalah kurang gizi pada anak dapat ditunjukkan dari kurangnya energi dan protein (gizi makro) dan gizi mikro (terutama kurang vitamin A, anemia, kurang yodium). Sampai dengan tahun 2000, keadaan gizi masyarakat menunjukkan kemajuan, yaitu terlihat dengan menurunnya penderita masalah gizi utama (protein, karbohidrat) pada berbagai kelompok umur. Akan tetapi sejak tahun 2000 sampai saat ini kekurangan gizi pada anak balita meningkat, diantaranya menderita gizi buruk.

Rendahnya derajat kesehatan dan gizi pada anak usia dini lebih banyak terjadi pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan yang tinggal di wilayah pedesaan, serta di wilayah dengan penyediaan layanan social dasar yang tidak memadai. Sedangkan untuk meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang terjangkau, diwujudkan melalui revitalisasi sistim kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien termasuk Posyandu dan Polindes, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistim kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistim informasi pada semua tingkatan pemerintah.

Upaya surveillance dan monitoring dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan hal-hal penting, pengalokasian budget dan personil pada saat outbreak investigation,

control dan rapid response, peningkatan early warning system/penunjang kedaruratan, serta pengaplikasian National Pandemic Preparedness Plan.

Untuk pendanaan kesehatan, Depkes akan meningkatkan anggaran sektor kesehatan nasional melalui APBN sebesar 5-15%, meningkatkan anggaran kesehatan di daerah melalui APBD sebanyak 15%, melakukan penghapusan wajib setor hasil pelayanan kesehatan di daerah, meningkatkan transfer dana dari pusat untuk sektor kesehatan daerah melalui dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi (Dekon), meningkatkan anggaran untuk prevensi dan promosi serta membentuk sistim jaminan kesehatan sosial nasional (Askeskin).

Lebih lanjut Menkes menegaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan politis dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Selain itu semua desa harus memiliki tenaga bidan yang berkualitas (*capable*) yang ditunjang dengan dukungan operasional yang memadai. Sejauh ini semua desa telah memiliki Pondok Persalinan Desa yang dilengkapi dengan sarana dan biaya operasional yang memadai.

Semua Puskesmas telah memiliki tenaga dokter dengan didukung tenaga paramedis dan non medis sesuai standar dan dilengkapi dengan sarana dan biaya operasional yang memadai. Semua Puskesmas juga mampu melaksanakan pelayanan obstetrik dan neonatal dasar (PONED). Sedangkan semua rumah sakit di kabupaten/kota mampu melaksanakan pelayanan obstetrik dan neonatal komprehensif (PONEK). Pada akhirnya diperlukan kemauan dan kesadaran penduduk dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

iii. Ekonomi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam perubahan perekonomian. Dalam artian bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan

serta berdaya saing tinggi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut ada hal yang penting yang menyangkut kondisi sumber daya manusia Indonesia, yaitu :

Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang, dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.

Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja ada yang masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2%. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.

Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia'

Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggung jawab. Fenomena pengangguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.

Masalah sumber daya manusia ini menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang di dukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam intensif (hutan dan hasil tambang), arus modal asing

berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian bukan berasal dari kemampuan produktivitas sumber daya manusia yang tinggi.

Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan ekonomi. Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu.

Rendahnya alokasi APDN untuk sektor pendidikan pada serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Padahal sudah saatnya perbaikan baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.

C. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Geologi

Jumlah penduduk Indonesia yang sudah melebihi 200 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Dengan potensi sumber daya manusia sebanyak itu kita tidak perlu cemas akan kekurangan tenaga yang melaksanakan pembangunan bangsa dan mengelola sumber daya alam yang berlimpah ini. Pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera masih sangat membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah yang tidak sedikit.

Namun di balik berlimpahnya sumber daya manusia tersebut kita tidak dapat berpuas diri demikian saja. Karena sumber daya manusia yang berlimpah tersebut sebagian besar dengan kualitas yang sangat rendah. Dari lebih 210 juta jiwa penduduk lebih dari

separohnya termasuk penduduk usia kerja. Dari penduduk usia kerja tersebut hanya kira-kira 65% saja yang bekerja. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut hanya sekitar 4% saja yang memiliki pendidikan di atas SLTA (Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana). Sementara itu bagian terbesar bagi penduduk usia kerja adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Memperhatikan kondisi tersebut diatas ternyata kualitas sumber daya manusia yang berada dalam usia kerja masih sangat rendah. Demikian juga halnya dengan sumber daya manusia yang mengelola bidang geologi dan sumber daya mineral yang baru sebagian kecil dengan tingkat pendidikan Diploma atau Sarjana keatas.

Pemanfaatan sumber daya mineral dan geologi sangat erat hubungannya dengan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya mineral dan geologi diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia Indonesia. Sedangkan untuk pengelolaan sumber daya alam dan geologi diperlukan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia.

Dalam pengelolaan sumber daya mineral dan geologi yang diselenggarakan oleh kontraktor asing pada umumnya penggunaan sumber daya manusia untuk posisi tenaga ahli atau terampil mengandalkan bantuan dari sumber daya manusia negara asing. Karena keterbatasan kemampuan negara baik dari segi permodalan, teknologi maupun sumber daya manusia maka kekayaan sumber daya mineral dan geologi tidak dapat dikelola sendiri. Pengelolaan sumber daya mineral dan geologi yang masih mengandalkan tenaga asing ini juga mempengaruhi terhadap hasil yang diterima. Pada umumnya pengelolaan sumber daya mineral dan geologi dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan perusahaan asing, sehingga bagian yang diperoleh negara lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan sendiri.

Dengan kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan geologi yang berada di tangan pemerintah, selama ini mengakibatkan daerah tidak mempunyai kesempatan untuk ikut secara langsung

dalam pengelolaan sumber daya mineral dan geologi tersebut. Daerah hanya memperoleh bagian hasil dari pengelolaan sumber daya mineral dan geologi

D. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai usaha mempersiapkan orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dengan segala kedudukannya. Hal ini berarti bahwa usaha itu tidak terbatas pada pembinaan kemampuan fisik melainkan juga kemampuan mental sebagai pendukung suatu kebudayaan. Dengan demikian maka pengembangan sumber daya manusia itu harus dapat mempersiapkan keterampilan jasmaniah seseorang agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya serta tanggungannya.

Pengembangan sumberdaya manusia juga harus dapat mempersiapkan seseorang untuk memainkan peranan sosial secara mantap sesuai dengan kedudukan-kedudukannya di masyarakat. Oleh karena itu praktek komunikasi atau interaksi sosial yang efektif itu hanya mungkin terselenggara kalau ada pranata yang terwujud atas dasar nilai-nilai, maka pengembangan sumberdaya manusia berarti usaha aktif penanaman sikap dan keterampilan pada anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku sebagai pedoman hidup yang mengembalikan pola tingkah laku sosial mereka.

Melalui proses enkulturasi sebagai pendidikan dalam arti luas, pengembangan sumber daya manusia menjelang diharapkan akan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang tangguh baik sebagai perorangan, sebagai anggota suatu masyarakat ataupun sebagai pendukung suatu kebudayaan yang aktif. Dengan demikian manusia Indonesia seutuhnya itu tidak hanya mampu berusaha memenuhi kebutuhan pokok bagi diri sendiri ataupun tanggungannya semata, akan tetapi bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya ia mampu mencapai tujuan bersama secara efektif. Disamping itu, sebagai pendukung kebudayaan ia harus mampu mengembangkan gagasan kreativitas berkarya kearah pembaharuan kebudayaan atas

dasar tradisi setempat maupun secara selektif juga atas dasar pengaruh kebudayaan asing yang akan memperkaya sistem idea, sistem sosial, maupun sistem teknologi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup selanjutnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segi non fisik diutamakan pada segi-segi yang berkaitan dengan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Yakni iman yang berkaitan dengan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan Maha Pencipta, budi pekerti yang berkaitan dengan keselarasan hubungan sesama manusia dan masyarakat, dan akal pikiran yang berkaitan dengan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alam.

➤ Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia dipandang dari segi kebudayaan.

1. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini hidup dalam masyarakat yang majemuk terdiri dari banyak suku bangsa dan golongan dengan latar belakang anekaragam kebudayaan yang menjadi kerangka acuan dalam pergaulan sosial.
2. Berkaitan dengan pembangunan yang pada hakikatnya merupakan usaha peningkatan kesejahteraan di segala bidang. Dalam penyelenggaraannya dilakukan dalam tempo yang relatif singkat, banyak teknologi dan ilmu pengetahuan asing yang diadopsi untuk mempercepat proses. Akibatnya akan menuntut adaptasi (penyerapan) ke dalam sistem budaya yang ada dan bahkan tidak mungkin akan menggeser nilai-nilai yang tidak sesuai lagi atau mengembangkan nilai-nilai yang lebih cocok dengan tuntutan pembangunan.
3. Akibat kontak-kontak dengan kebudayaan asing yang dipermudah oleh kemajuan teknologi pada akhir-akhir ini.

Hampir tidak mungkin bagi suatu masyarakat dewasa ini untuk menghindarkan diri dari pergaulan antar bangsa dan lintas budaya. Peralatan komunikasi dan transportasi yang didukung oleh teknologi modern memperlancar dan menambah intensitas kontak-

kontak kebudayaan. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, orang dapat melakukan komunikasi tanpa mengenal batas lingkungan geografis, politik maupun kebudayaan.

Untuk mengatasi masalah yang pertama, di perlukan sistem sosial yang mampu mengendalikan pergaulan antara sesama penduduk tanpa memandang asal kesukuan maupun golongan. Akan tetapi untuk mengembangkan sistem sosial yang memadai diperlukan landasan yang diterima sebagai kerangka acuan bersama, yaitu kebudayaan sebagai sistem arti nilai, gagasan vital dan keyakinan, Dalam hal ini, pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang diharapkan akan mendominasi kehidupan sosial bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sistem-sistem sosial itu akan terwujud apabila orang telah menghayati kebudayaan sebagai sistem nilai gagasan vital dan keyakinan yang akan menjadi kerangka acuan yang akan mendominasi pola tingkah laku anggota masyarakat Indonesia hendaknya diarahkan pada penanaman dan penghayatan nilai-nilai gagasan dan keyakinan yang disepakati bersama sebagai pedoman hidup bernegara dn bermasyarakat.

Enkulturasasi juga berkaitan dengan proses pembangunan yang pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Akan tetapi upaya peningkatan kesejahteraan hidup bersama. Akan tetapi usaha peningkatan kesejahteraan terencana dan diselenggarakan dalam tempo yang relatif singkat sering kali menimbulkan banyak masalah. Usaha peningkatan kesejahteraan itu mendorong orang untuk dengan cepat mendatangkan ilmu dan teknologi asing dan belum tentu sama dengan kebudayaan yang mendominasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dari sistem teknologi yang di impor, akhirnya akan menuntut penyesuaian pada sistem sosial atau pola interaksi penduduk setempat yang akhirnya cepat atau lambat akan menggeser nilai-nilai budaya setempat.

Tidak semua teknologi dan ilmu pengetahuan yang diserap akan menimbulkan perubahan pada sistem sosial dan sistem idea setempat. Akan tetapi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya

ketegangan, sudah sepatutnya kalau setiap warga negara Indonesia di bekal dan diperkuat kesadaran mereka dengan pengetahuan kebudayaan yang memadai sehingga mereka nantinya dapat secara selektif dan aktif menyerap pengaruh kebudayaan asing. Disamping itu dengan bekal pengetahuan kebudayaan yang memadai setiap warga negara Indonesia akan dapat melihat, memahami dan memilih-milih gejala dan tantangan yang dihadapi untuk kemudian merencanakan serta menentukan sikap ataupun perbuatan sesuai dengan nilai-nilai. Dengan bekal pengetahuan kebudayaan yang sama diharapkan setiap warga negara Indonesia akan dapat menanggapi segala tantangan yang timbul dari lingkungannya maupun perkembangan sejarah tanpa memastikan daya kreativitas yang inovatif dalam menanggapi dinamika kebudayaan baik karena pengaruh sesama kebudayaan Indonesia yang tumbuh dan berkembang di daerah maupun karena pengaruh kebudayaan asing yang akan memperkaya kebudayaan nasional.

➤ Sumber daya manusia harus dapat dibina dan diarahkan secara tepat agar mampu mengembangkan potensinya, antara lain :

1. Manusia yang profesional, yang memiliki keahlian dan ketarampilan sehingga mampu bekerja lebih produktif.
2. Manusia yang berkembang kemampuan intelektualnya sehingga mampu menjadi pelopor perubahan masyarakat.
3. Manusia yang berjiwa wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, tidak tergantung pada kesempatan kerja yang diciptakan pemerintah, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain

BAB 4

KEARIFAN LOKAL

A. Definisi Kearifan Lokal

Kearifan berasal dari kata arif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif memiliki dua arti, yaitu tahu atau mengetahui. Arti kedua cerdik, pandai dan bijaksana. Kata arif yang jika ditambah awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat local wisdom atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat local genius.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Menurut Edy Sedyawati “kearifan lokal” adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya, baik yang tangible maupun yang intangible.

Menurut Wales, kearifan lokal dapat dilihat dari dua perspektif yang saling bertolak belakang. Yakni extreme acculturation dan a less extreme acculturation. Extreme acculturation memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan suatu budaya yang tanpa adanya proses evolusi budaya dan akhirnya memusnahkan bentuk-bentuk budaya tradisional.

Less extreme acculturation adalah proses akulturasi yang masih menyisakan dan memperlihatkan local genius adanya. Yakni adanya unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-

unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli.

B. Faktor Kearifan Lokal

➤ Fungsi/Peran Kearifan Lokal

“ Peranan Kearifan Lokal Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Arus Globalisasi “

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan yang disebabkan karena kemampuan yang dianugerahi kepada manusia dalam melakukan sebuah inovasi, sehingga dengan perkembangan tersebut membuat gaya hidup orang berubah, termasuk bangsa Indonesia. Dikarenakan berkembangnya dengan pesatnya suatu ilmu pengetahuan, maupun teknologi dan informasi, menjadikan batas antar Negara di seluruh dunia tidaklah lagi menjadi suatu hambatan ataupun kendala untuk suatu Negara melakukan suatu hubungan, dan hubungan antar negarapun semakin mudah dilakukan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi dan informasi, dan kondisi yang seperti inilah biasa kita kenal dengan istilah Globalisasi.

Seiring dengan derasnya arus globalisasi, menyebabkan banyak sekali hal-hal yang mencoba masuk ke dalam suatu Negara termasuk ke dalam Negara Indonesia, baik hal-hal yang bersifat positif maupun hal negative, tergantung bagaimana cara Negara tersebut menyaring hal-hal yang masuk tersebut. Agar hal-hal yang masuk ke dalam Negara Indonesia tersebut bisa dapat disaring tentunya bangsa Indonesia sendiri mempunyai penjelasan mengenai peran budaya lokal di dalam masyarakat itu sendiri agar budaya lokal yang dimiliki bangsa Indonesia tidak tercampur dan hilang karena budaya luar.

Kemudian budaya lokal itu sendiri juga haruslah dapat menyaring, menutup dan menanggulangi suatu moral bangsa Indonesia yang perlahan mulai mengalami degradasi, dan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa ini haruslah tetap dipertahankan. Banyak sekali nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam kesehariannya dan ada pula yang dapat dijadikan

suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia di dunia Internasional, karena masing-masing Negara memiliki suatu kerelatifan dari keunikan masing-masing Negara, tak terkecuali bangsa Indonesia sendiri seperti berupa tarian, kesenian, adat-istiadat, bahasa, lagu, naskah, dan tradisi atau kebiasaan. Semua itu merupakan suatu hal yang bisa ditonjolkan oleh bangsa Indonesia kepada dunia Internasional.

Sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan kearifan local sendiri sekali lagi haruslah benar-banar menyaring hal-hal ataupun budaya dari Negara lain, apalagi bangsa Indonesia merupakan Negara timur berdasarkan letak geografisnya dimana nilai-nilai sosial dan toleransi masing sangat dijunjung tinggi disini, berbeda dengan budaya barat dimana nilai-nilai kebebasanlah yang diterapkan. Bukan bermaksud menceritakan bahwa budaya barat itu buruk, tetapi kurang tepatlah untuk dicampur adukkan dari budaya barat dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, karena perilaku meniru budaya barat tidaklah selamanya tepat. Tetapi sebagai bangsayang berada ditengah dunia globalisasi, Indonesia haruslah bergerak mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berdiri tegak dengan kearifan local yang dimiliki Indonesia yang tidak akan hilang oleh zaman. Dan sebagai masyarakat Indonesia haruslah berfikir global dan bertindak local untuk berkarya di negeri ini dan dapat memajukan bangsa di tengah derasnya arus globalisasi.

C. Pentingnya Kearifan Lokal Dalam Pembangunan

➤ PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan terjemahan dari “suistainable development”, konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah “pembangunan yang berwawasan

lingkungan” sebagai terjemahan dari “Eco-development”. Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan ber kelanjut an yang berwawasan lingkungan hidup

berkaitan erat dengan pendayagunaan/pemanfaatan sumberdaya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumberdaya alam menjadi salah satu modal dari proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan sustainable (berkelanjutan) jika sumber- sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun yang akan datang (Soemarwoto Otto, 1986).

Bagi Indonesia kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam. Sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan. Kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup sangat dirasakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungannya harus dikelola sesuai dengan daya dukungnya.

2. Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam harus memiliki visi makro untuk menciptakan ekologi yang sustainable. Sedangkan visi mikronya adalah menjaga jenis-jenis keanekaragaman yang sustainable. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam juga harus memiliki rasa keadilan intragenerasi (antarkelompok masyarakat)

saat ini dan keadilan antargenerasi. Kearifan lokal menciptakan harmonisasi antara alam dengan masyarakat. Kearifan

lokal tumbuh dari karakter dan budaya masyarakat yang sudah mengakar dan secara turun temurun telah dijalani sebagai jalan hidup penyatuan kultur sosial dengan alam disekitarnya (Nurjaya I Nyoman, 2008). Bagi masyarakat adat menempatkan persoalan- persoalan alam sebagai bentuk interaksi dalam merespon segala perilaku manusia (masyarakat) yang memperlakukannya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai pemimpin dimuka bumi, untuk mengelola alam dengan segala isinya dengan baik dan sempurna sehingga bermanfaat untuk manusia secara terus menerus. Proses pengelolaan alam oleh manusia perlu dilihat apakah perlakuannya dalam konteks ketaatan atau kemungkaran, sehingga alam akan menyeimbangkan dengan kekuatannya, karena alam memiliki sifat ketaatan yang absolut terhadap Tuhan-Nya (sunnatullah). Pemanfaatan alam dalam pandangan ini tidak hanya dari segi pengetahuan tentang alam raya sebagai suatu sistem, tetapi juga fenomena sosial yang muncul dari interaksi antarmanusia dengan berbagai masalah yang dihadapi sebagai ayat-ayat kauniah.

Perilaku manusia dapat diamati, diperhatikan, dipahami dan dihayati melahirkan kesadaran dan keyakinan akan kebenaran dalam kaitannya dengan nilai-nilai normatif (hukum), bukan saja harus ditaati sebagai suatu kewajiban tetapi juga kesadaran dan keyakinan akan kemurahan atau kemurkaan alam yang selalu mengarahkan manusia kearah keselamatan dan kesejahteraan atau sebaliknya kepada kehancuran/ bencana.

Kearifan lokal mengandung pengertian sebagai bentuk hubungan yang serasi antara manusia dengan alam ataupun sebaliknya, masyarakat lokal memahami kearifan secara totalitas dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kepatuhan terhadap hukum adat (ulayat) yang pada dasarnya adalah warisan dari generasi sebelumnya harus dimanfaatkan secara baik dengan memperhatikan dampak bagi generasi yang akan datang. Sumberdaya alam dimanfaatkan secara optimal tetapi bukan untuk dihabiskan karena didalamnya ada hak generasi selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali agar sumberdaya alam dikelola secara optimal dan

bekesinambungan dalam proses jangka panjang sebagai modal dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

D. Kearifan Lokal Dan Tantangan Zaman

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda. Kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Masyarakat memiliki sudut pandang tersendiri terhadap alam dan lingkungannya. Masyarakat mengembangkan cara-cara tersendiri untuk memelihara keseimbangan alam dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui pengembangan kearifan lokal memiliki kelebihan tersendiri. Selain untuk memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungannya, kebudayaan masyarakat setempat pun dapat dilestarikan.

Kearifan lokal memiliki banyak fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Aulia (2010), menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus.

Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah:

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.

Namun, dewasa ini kearifan lokal menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam keberadaan dan kelestariannya. Kearifan lokal yang telah terbentuk sejak lama kini mulai terkikis seiring berkembangnya teknologi diikuti meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi. Suhartini (2009) menyatakan bahwa kearifan lokal-kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan.

Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap alam kini sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Begitu banyak elemen masyarakat hingga pemerintah mengadopsi berbagai teknologi untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran, tanpa pernah memperhatikan aspek kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh adalah penggunaan teknologi penangkapan ikan di Maluku yang tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya sumberdaya air dan tersingkirkannya kearifan lokal masyarakat Maluku yang disebut *sasih*¹. Sehingga pada akhirnya secara perlahan-lahan kearifan-kearifan lokal tersebut memudar bahkan menghilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu juga berakibat kepada terjadinya ketidakseimbangan lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam. Masuknya berbagai teknologi tersebut menyingkirkan peran kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan adalah norma-norma yang didasarkan pengetahuan lokal yang mengatur waktu pemanenan ikan.

Masyarakat memiliki pengetahuan pada bulan-bulan kapan ikan bertelur. Masyarakat mulai meninggalkan pola pikir holistik² dan beralih kepada pola pikir mekanistik³ serta berorientasi komersil.

Sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang ingin menaklukkan alam untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Sehingga pada akhirnya banyak terjadi berbagai bencana alam akibat keseimbangan alam diganggu.

Selain perkembangan teknologi, tantangan-tantangan lain yang dihadapi kearifan lokal-kearifan lokal masyarakat adalah pertambahan penduduk. Robert Malthus dalam Suhartini menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan, hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh pertambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret hitung (Soerjani dkk, 1997:99). Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga melakukan modernisasi pertanian dengan melakukan revolusi hijau. Dalam Revolusi hijau dikembangkan penggunaan bibit unggul, pemupukan kimia, pengendalian hama penyakit dengan obat-obatan, pembangunan saluran irigasi secara besar-besaran untuk pengairan dan penggunaan teknologi pertanian dengan traktor untuk mempercepat pekerjaan. Sebagai akibat pelaksanaan revolusi hijau yang menekankan pada tanaman padi secara monokultur dengan bibit unggul maka akan mempengaruhi kehidupan petani lokal dalam menggunakan bibit lokal yang sebenarnya mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit, pupuk kandang dan pupuk organik yang digantikan dengan pupuk kimia, penggunaan hewan untuk membajak yang digantikan traktor, penggunaan obat-obatan dari tanaman untuk pertanian dengan obat-obatan kimia. Berikut dipaparkan salah satu contoh persentase penggunaan berbagai pupuk di daerah Temanggung. Tabel berikut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia dibandingkan penggunaan pupuk organik.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, prospek kearifan lokal di masa depan bergantung dari pemanfaatan dan pemberdayaan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat guna mengelola sumberdaya alam dan lingkungan. Pengetahuan mengenai kearifan lokal yang

dimiliki masyarakat yang diturunkan secara turun temurun serta inovasi dan teknologi juga mempengaruhi keberlangsungan kearifan lokal di masa depan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sudah saatnya memberlakukan kebijakan terkait adopsi teknologi penggunaannya serta difusi teknologi yang melindungi sumberdaya alam dan lingkungan melalui kearifan lokal. Berbagai kearifan lokal yang masih bertahan adalah pranoto mongso⁴ di Jawa dan nyabuk gunung⁵.

Sartini mengungkapkan bahwa ada banyak peluang untuk pengembangan wacana kearifan lokal Nusantara. Di samping itu kearifan lokal dapat didekati dari nilai-nilai yang berkembang di dalamnya seperti nilai religius, nilai etis, estetis, intelektual atau bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi dan lainnya. Maka kekayaan kearifan lokal menjadi lahan yang cukup subur untuk digali, diwacanakan dan dianalisis mengingat faktor perkembangan budaya terjadi dengan begitu pesatnya.

1. Berfikir Global Bertindak Lokal

Globalisasi yang dikatakan menembus batas ruang dan waktu menjadikan tema lokalitas hangat diperbincangkan. Sebuah upaya dalam kesadaran berbangsa dan bernegara dimana warganya sudah, saya rasa dan mungkin Anda rasakan, frustrasi dengan penggerak roda pemerintahan pusat. Wacana yang digulirkan dari berbagai forum diskusi, seminar, ataupun kuliah hanya satu: Perlawanan. Paradigma yang dibangun juga selalu sama, daya saing sebuah negara bangsa dalam kancah dunia internasional. Industri massif untuk keperluan global kini mulai dipertanyakan. Muncullah kemudian slogan-slogan hingga gerakan legal dan non-legal berdiri atas nama menjunjung tinggi nilai lokalitas. Ranah teknis praktis bukan dikolaborasikan, namun, justru dibenturkan dengan data-data sejarah. Sebuah niatan luhur.

Kebangkitan gerakan lokal selalu memiliki tiga senjata, yaitu tradisi, seni, dan makanan. Selain dari itu seringkali masih sulit untuk diterima. Gerakan tersebut mengambil hati masyarakat luas dengan

sebuah harapan akan kesejahteraan, lagi-lagi menyentuh dimensi ekonomis. Terkhusus untuk orang-orang yang memiliki latar belakang Jawa, pengarsipan mengenai wilayah yang mereka tempati ini tersedia dengan sangat banyak. Alhasil, acuan yang mereka gunakan dengan mudah dicari dan tidak perlu sulit riset ataupun analisis yang memakan waktu lama. Majapahit menjadi tonggak terpenting sejarah kejayaan kelompok lokal atas pendudukan wilayah lain yang disebut Nusantara. Gerakan bernafaskan lokal ini selalu memilih jalan untuk kemudian ‘menduniakan’ unsur-unsur lokal mereka. Berbeda dengan industri skala besar, mereka tetap membangun pola yang terpusat. Ini merupakan sebuah strategi defensif secara spasial yang mencakup berbagai macam sumber daya yang ada didalamnya. Kemudian yang mereka junjung tinggi hanya berada pada satu kata, keaslian. Gerakan ini dibuat seolah menjadi kesadaran komunal. Namun saya katakan ini merupakan fiktif belaka.

Gerakan untuk membangkitkan unsur lokalitas tidak dibangun atas dasar kesadaran komunal untuk menjadi sebuah wilayah yang berdikari. Pendirian gerakan-gerakan yang bersifat lokal selalu rawan ditunggangi berbagai kepentingan privatisasi. Isu pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan tradisi, seni, dan makanan sebagai pemicu ekonomi kreatif, tidaklah kemudian menjadi sebuah perlawanan yang utuh. Pada saatnya, ketika senjata-senjata ini ampuh untuk memicu perekonomian masyarakat, saat itu pula hukum alam kapitalisme bermain. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi selanjutnya. *Pertama*, terjadinya pemiskinan secara komunal; dan *kedua*, terjadi jurang kesenjangan yang begitu besar. Dalam gerakan-gerakan bernafaskan kebangkitan unsur lokal, mereka menempatkan pasar sebagai salah satu tujuan utama selain penguatan identitas. Gerakan lokal yang pendiriannya dikatakan sebagai kesadaran komunal hanya mengantarkan kepada bentuk privatisasi lain.

Gerakan bernafaskan lokalitas, selalu memiliki sebuah strategi yang mereka sebut sebagai strategi budaya. Mereka menolak untuk menyamakannya sebagai strategi politik. Dasar dari argumen tersebut berasal dari satu kalimat. Kekecewaan dan keputusan terhadap

negara. Dalih ini selalu muncul untuk ‘memurnikan’ setiap gerak-gerik mereka dan mengatasnamakan kesadaran komunal dari orang-orang yang peduli dengan budaya lokal. Legalitas mereka didapatkan dari gerakan sejenis yang ada di kancah nasional, seperti kementerian lalu turun ke dewan kesenian dan juga dinas pariwisata serta kebudayaan, provinsi lalu kaderisasi hingga tingkat desa. Paradigma yang dibangun tidak lagi diharuskan untuk bangga jika kemudian mereka ‘ditanggap’ oleh para pejabat. Mereka diberikan dikotomi untuk langsung menyasar tingkat global. Afiliasi yang paling dekat dengan gerakan ini adalah sebagai bagian dari promosi wisata. Celah mereka didapatkan dari wisata tidak kemudian menjadikan gerakan mereka hanya sebagai sebuah distributor barang siap pakai yang diambil dari etalase toko oleh pembeli.

Ketakutan nyata dari gerakan ini adalah hilangnya bentuk-bentuk dari lokalitas itu sendiri. Nilai yang kemudian terkandung didalamnya hanyalah sebagai ‘tempelan’, agar setidaknya ada pelajaran hidup yang didapatkan selain nilai ekonomis semata. Tidak berarti saya melihat tidak ada niatan baik untuk kemudian mengubah paradigma pembagian wilayah adidaya di dunia. Ketika sebuah perlawanan dengan senjata-senjata ini dikeluarkan, saya rasa pasar bukanlah tujuan yang sebenarnya. Memang pada dasarnya gerakan bernafaskan lokalitas ini memiliki niatan untuk melestarikan budaya dan juga menolak bentuk-bentuk penyeragaman atas globalisasi. Sayangnya, gerakan-gerakan semacam ini seringkali mengkerdulkan perbedaan-perbedaan. Pada satu kesempatan, dalam satu forum diskusi mengkritisi habis-habisan tayangan *MAHABARATA* yang sangat digandrungi. Kemudian segala yang menjadi catatan sejarah mereka kuatkan dengan perbandingan yang seringkali sangat tidak berbanding. Dan masih banyak lagi.

2. Pertaruhan identitas

Pernah dalam sejarah Indonesia, nilai-nilai lokal sangat dipersempit ruang gerakannya. Pemerintah meneriakkan nasionalisme dengan praktik-praktik penguasaan di berbagai wilayah. Semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah mantra sakti bagi pemerintah saat itu.

Sampai hari ini semboyan itu tetap menjadi mantra sakti, namun bertransfromasi. Identitas nasional bukan lagi dibentuk dan dibangun oleh pemerintah. Hari ini kesadaran berbangsa tumbuh dari pojok-pojok negeri ini.

Gerakan bernafaskan lokalitas dengan gagah menyatakan identitas lokal mereka yang kemudian dibawah naungan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semangat untuk meningkatkan kesejahteraan bukan hanya untuk masyarakat di wilayah tersebut, namun juga diharapkan sebagai pemicu bagi daerah-daerah lainnya untuk melakukan gerakan yang sama. Namun, kembali lagi, faktor kesejarahan yang kemudian mendominasi bangsa ini untuk saya menjadi sebuah kerisauan tersendiri. Bagaimana mungkin, ketika sebuah wilayah di NTT membuat gerakan yang sama dengan landasan sekuat di Jawa Timur. Ketimpangan terjadi. Ada yang menjadikan gerakan-gerakan ini tidak kemudian mengambil faktor sejarah atas dominasi, yaitu pasar. Ini menjadi sebuah ajang pertarungan dari kebangkitan gerakan-gerakan lokal yang kemudian menyasar pada persaingan. Pada saat itulah kecerdikan dari aktor-aktor yang mengerti sekali bahwa manusia adalah *homo economicus* bermain.

Ketimpangan ini akan menjadikan masyarakat di sebuah wilayah tidak ingin dipersamakan dengan masyarakat di wilayah lainnya. Pertarungan wacana dari setiap gerakan lokal akan menjadikan identitas sebagai dalih pemersatu dan pada saatnya menjadi terbelah-belah. Bagi saya, ini merupakan cerminan bahwa negara ini sedang berada pada titik kegoyahan. Gerakan ini bukan hanya merujuk pada kerinduan warga negara untuk terlahir dengan identitas kultural. Lebih dari itu, gerakan ini merangsek masuk pada nalar masyarakat bahwa negara hanya sebagai boneka dan alat penindas bagi warganya.

E. Kearifan Lokal Dan Penguatan SDM

1. Kearifan Lokal sebagai Identitas dan Ideologi Bangsa

Boni Hargens (2011) dalam tulisannya di *Kompas* menyatakan bahwa arus modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi semestinya tidak

meniadakan suatu negara jatuh dalam percaturan global asal saja negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat. Selain etika moral yang bersumber pada agama, di Indonesia juga terdapat kearifan lokal yang menuntun masyarakat kedalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Kita mengenal pepatah ”gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit”, “bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian” yang mengimplikasikan ajakan untuk membangun etos kerja dan semangat untuk meraih keunggulan. Dalam hal keharmonisan sosial dan alam, hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. Dalam suku tertentu yang bermukim di pedalaman juga dikenal kearifan lokal yang bersifat menjaga dan melestarikan alam sehingga alam (misalnya kayu di hutan) hanya dimanfaatkan seperlunya, tidak dikuras habis.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak, semestinya Indonesia telah menjadi negara besar yang maju. Namun, di tingkat Asia Tenggara saja posisi kita di bawah Singapura yang miskin sumber daya alam dengan luas wilayah lebih kurang hanya seluas Jakarta. Sumber daya alam yang melimpah di negeri ini kadang-kadang juga tidak menjadi berkah. Gas alam diekspor ke luar negeri dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga jual untuk pasar dalam negeri. Hutan dieksploitasi secara luar biasa untuk mengejar perolehan devisa yang pada akhirnya hanya mendatangkan kerusakan ekosistem alam yang disusul dengan bencana (banjir;longsor).

Kebijakan ekonomi pemerintah acap kali hanya berpihak pada kepentingan pemodal kuat. Padahal, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh para pendiri republik ini diciptakan untuk mengakomodasi kearifan lokal yang ada di negeri ini (seperti gotong royong dan kekeluargaan) dengan tegas mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam yang ada dikuasai negara untuk kemakmuran

rakyat. Secara faktual, dapat kita saksikan pertumbuhan *mini market* yang sangat subur yang mematikan warung rumah tangga.

Sementara itu, dalam masyarakat sendiri sering terjadi tindak kekerasan yang mereduksi nilai toleransi. Dalam konteks perubahan nilai sosiokultural juga terjadi pergeseran orientasi nilai. Masyarakat cenderung makin pragmatis dan makin berorientasi pada budaya uang serta terperangkap dalam gaya hidup konsumtif yang disodorkan kekuatan global kapitalisme. Dalam realitas Indonesia kini, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kearifan lokal yang kita miliki mirip benda pusaka, yang kita warisi dari leluhur, kita simpan dan kita pelihara, tetapi kita tidak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehingga pusaka tersebut sia-sia merespons tantangan zaman yang telah berubah.

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal dan realitas Indonesia kini, *Kompas* edisi 20 April 2011 menampilkan dua tulisan yang relevan, yakni “Saya Mohon Ampun” oleh Radhar Panca Dahana dan “Pembangunan Gerus Kearifan Lokal” oleh Wasisto Raharjo Jati. Dalam tulisannya, Radhar Panca Dahana mencemaskan perilaku para elit negeri ini yang antara sadar dan tidak sadar telah menjadi agen kepentingan dan keserakahan ekonomi dan politik negara maju (sehingga Indonesia hanya dijadikan sekadar pasar sambil dikuras habis sumber daya alamnya). Sementara itu, Wasisto Raharjo Jati mengemukakan bahwa pembangunan di Indonesia yang terpaku pada pertumbuhan ekonomi semata telah mengabaikan kearifan lokal dan menimbulkan potensi konflik vertikal dan horizontal di kemudian hari. Karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung pemerintah juga telah menjejalkan “budaya uang” sehingga cenderung mengurangi dan meniadakan kearifan dan budaya lokal.

Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan,

dan sebagainya). Sekadar contoh, kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam telah menghasilkan pendopo dalam arsitektur Jawa. Pendopo dengan konsep ruang terbuka menjamin ventilasi dan sirkulasi udara yang lancar tanpa perlu penyejuk udara.

Pendopo adalah salah satu contoh bagaimana kearifan lokal warisan masa lampau telah memberikan kepada kita konsep arsitektur yang lega, nyaman, dan hemat energi. Sekarang ini, kita mempersoalkan krisis energi dan menyerukan hemat energi. Namun, gedung dan rumah dibangun dengan konsep bangunan tertutup sehingga memerlukan penyejuk udara yang boros energi. Kearifan lokal dalam wujud gotong royong juga kita kenal di warung rakyat (misalnya warteg). Di warung tersebut dipraktikkan penggiliran pengelolaan warung sebagai implementasi nilai gotong royong dalam tata sosial dan ekonomi: memberi peluang kerja dan peluang mencari nafkah bagi kerabat dan warga sekampung; itu adalah salah satu kearifan lokal warisan masa lampau yang masih diberlakukan oleh sebagian masyarakat.

Di negeri ini, ada sesuatu yang aneh dan janggal: kearifan lokal di tingkat akar rumput acap kali berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi (sehingga mengundang investor asing dan memberikan banyak kemudahan, termasuk dalam hal regulasi, sambil mengabaikan kearifan lokal yang tumbuh di akar rumput (Radhar Panca Dahana dan Wasisto Raharjo Jati, 2011).

Pancasila sebagai ideologi negara pada dasarnya telah mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara (antara lain nilai gotong royong sehingga salah satu sila Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”). UUD 1945 (yang dijiwai oleh Pancasila) juga mengamanatkan hal yang sama, terutama dalam Pasal 33. Akan tetapi, saat ini Pancasila dapat dikatakan menjadi sekadar aksesori politik belaka. Memaknai kearifan lokal tampaknya tidak dapat dipisahkan dari konstelasi global. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisinya yang strategis menjadikan Indonesia senantiasa menjadi incaran negara maju sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Hingga kini pun setelah

pemerintahan berganti beberapa kali, pemerintah tidak dapat menunjukkan independensinya: banyak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan ekonomi dan politik global daripada berpihak pada kepentingan rakyat dalam negeri. Tentang hal itu dapat dibaca tulisan Radhar Panca Dahana (2011) yang secara satiris mengatakan bagaimana kekuasaan pemerintahan telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan ekonomi global.

Kearifan lokal (yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai identitas bangsa) tidak akan bermakna apa pun tanpa dukungan ideologi yang berpihak kepadanya. Dalam konstelasi global, ketika perang dingin telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet (dan negara yang masih menganut Marxisme pun telah menerapkan sistem ekonomi kapitalistik seperti Cina dan Vietnam), tanpa ideologi yang berpihak pada kepentingan nasional, kita akan semakin kehilangan identitas dalam percaturan global dan hanyut dalam arus globalisasi yang “didikte” oleh negara maju.

2. Kearifan Lokal: antara Pusaka dan Senjata

Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang tidak hanya terdapat dalam sastra tradisional (sastra lisan atau sastra tulis) sebagai refleksi masyarakat penuturnya, tetapi terdapat dalam berbagai bidang kehidupan nyata, seperti filosofi dan pandangan hidup, kesehatan, dan arsitektur. Dalam dialektika hidup-mati (sesuatu yang hidup akan mati), tanpa pelestarian dan revitalisasi, kearifan lokal pun suatu saat akan mati. Bisa jadi, nasib kearifan lokal mirip pusaka warisan leluhur, yang setelah sekian generasi akan lapuk dimakan rayap. Sekarang pun tanda pelapukan kearifan lokal makin kuat terbaca. Kearifan lokal acap kali terkalahkan oleh sikap masyarakat yang makin pragmatis, yang akhirnya lebih berpihak pada tekanan dan kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh, di salah satu wilayah hutan di Jawa Barat, mitos pengeramatan hutan yang sesungguhnya bertujuan melestarikan hutan/alam telah kehilangan tuahnya sehingga masyarakat sekitar dengan masa bodoh membat dan mengubahnya menjadi lahan

untuk berkebun sayur. Ungkapan Jawa tradisional *mangan ora mangan waton kumpul* (biar tidak makan yang penting berkumpul dengan keluarga) sekarang pun makin kehilangan maknanya: banyak perempuan di pedesaan yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk bekerja di mancanegara dengan risiko terpisah dari keluarga daripada hidup menanggung kemiskinan dan kelaparan.

Kearifan lokal hanya akan abadi kalau kearifan lokal terimplementasikan dalam kehidupan konkret sehari-hari sehingga mampu merespons dan menjawab arus zaman yang telah berubah. Kearifan lokal juga harus terimplementasikan dalam kebijakan negara, misalnya dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal kita. Untuk mencapai itu, perlu implementasi ideologi negara (yakni Pancasila) dalam berbagai kebijakan negara. Dengan demikian, kearifan lokal akan efektif berfungsi sebagai senjata tidak sekadar pusaka yang membekali masyarakatnya dalam merespons dan menjawab arus zaman.

Revitalisasi kearifan lokal dalam merespons berbagai persoalan akut bangsa dan negara ini, seperti korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial hanya akan berjalan dengan dukungan kebijakan negara dan keteladanan. Tanpa itu, kearifan lokal hanya merupakan aksesori budaya yang tidak bermakna. Kearifan lokal di banyak daerah pada umumnya mengajarkan budaya malu (jika berbuat salah). Akan tetapi, dalam realitas sekarang, budaya malu itu telah luntur. Peraturan yang ada pun kadang-kadang memberi peluang kepada seorang terpidana atau bekas terpidana untuk menduduki jabatan publik. Jadi, budaya malu sebagai bagian dari kearifan lokal semestinya dapat direvitalisasi untuk memerangi korupsi, apalagi dalam agama pun dikenal konsep halal haram (uang yang diperoleh dari korupsi adalah haram).

Di antara berbagai penggerusan kearifan lokal saat ini, di sisi lain kita masih menyaksikan pemanfaatan kearifan lokal, misalnya di dunia medis terjadi pengembangan obat herbal yang merupakan warisan leluhur di bidang medis yang kemudian disempurnakan

dengan standar farmakologi yang berlaku. Jadi, itu adalah salah satu wujud kearifan lokal yang telah memperoleh revitalisasi dalam masyarakat.

Di tengah derasnya arus investasi asing di bidang kuliner yang merambah ke negeri ini (seperti Kentucky Fried Chicken, Mc Donald, dan Pizza Hut), kita masih dapat menyaksikan menu kuliner lokal (masakan Sunda, Padang, dan Yogya) tetap eksis dan sebagian hadir dalam tata kelola restoran modern. Itu adalah revitalisasi kearifan lokal di bidang kuliner. Sementara itu, gotong royong sebagai wujud kearifan lokal kita tampaknya belum terimplementasikan dalam perekonomian nasional yang makin didominasi oleh asing dan perusahaan multinasional dengan semangat neoliberalisme dan neokapitalisme. Perekonomian nasional yang berpijak dan tumbuh dari rakyat setidaknya mencerminkan identitas dan nasionalisme kita. Ketergantungan ekonomi pada asing akan menyebabkan kita dengan mudah didikte oleh kekuatan ekonomi dan politik asing dan hal itu akan mencederai kedaulatan kita sebagai bangsa.

F. Mutu Kearifan Lokal Dalam System Pembangunan Daerah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang multi kultur, beragam suku, etnis dan budaya yang mewarnai bangsa Indonesia memberi kesan tersendiri bagi Negara-negara asing lainnya. Namun meskipun masyarakat bangsa Indonesia terbelah atas beberapa ras, suku dan budaya di kawasan masing-masing namun kerukunan dan sikap saling menghargai atas hak asasi sebagai sesama makhluk ciptaan tuhan sangat terpelihara. Salah satu budaya yang menghormati keberadaan sesama warga Negara tercermin dari masyarakat Indonesia. Apabila berjumpa di jalan mereka cenderung menebar senyum meskipun toh pada kenyataannya masih belum saling mengenal satu sama lain, budaya ini dilestarikan turun temurun sehingga kesan yang tergambar dari etika tersebut membuktikan bahwa dengan tersenyum kepada seseorang kita telah menghargai orang tersebut.

Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan tantangan yang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur bangsa ini. Karena ketika sumber daya manusia di suatu kawasan melemah akan berakibat fatal bagi perkembangan sumber daya alam di lingkungan tersebut. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan, *illegal logging*, dan aksi-aksi lain yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar, hal semacam inilah yang mesti di perhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu yang lebih baik bagi kemajuan bangsa. Tanpa mencampur adukkan birokrasi dalam hal pembangunan infrastruktur sumber daya manusia dalam mengelola lingkungan sekitar. Salah satu metode yang dapat di kembangkan secara mudah adalah dengan meningkatkan budidaya berkearifan lokal atau semacam nilai-nilai tradisi yang di yakini oleh masyarakat sekitar semisal dalam memecahkan masalah, kebiasaan masyarakat lokal adalah dengan cara bermusyawarah, berdiskusi secara terbuka dan ramah, sehingga proses penyelesaian sebuah masalah tidak menimbulkan efek kerugian baik bagi individu-individu lain maupun kerusakan pada lingkungan sekitar karena dalam proses musyawarah tersebut terjadi kemufakatan, saling menerima keputusan yang telah ditetapkan.

Kearifan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama, 2007). Di sini dapat kita tarik benang merah bahwa dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan kearifan Lokal (KL) adalah suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif.

Budaya berbasis Kearifan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Sebagai contoh potensi kota Batu Jawa

Timur Madura dan kawasan lain yang memiliki potensi budidaya apel dan pariwisata. Pemerintah dan masyarakat kota Batu dapat melakukan sejumlah upaya dan program, agar potensi tersebut dapat diangkat menjadi keunggulan lokal kota Batu sehingga ekonomi di wilayah kota Batu dan sekitarnya dapat berkembang dengan baik. Kualitas dari proses dan realisasi keunggulan lokal tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, yang lebih dikenal dengan istilah 7 M, yaitu *Man, Money, Machine, Material, Methode, Marketing and Management* (Pengantar Management 2012 up45 Yogyakarta). Jika sumber daya yang diperlukan bisa dipenuhi, maka proses dan realisasi tersebut akan memberikan hasil yang bagus, dan demikian sebaliknya. Di samping dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, proses dan realisasi keunggulan lokal juga harus memperhatikan kondisi pasar, para pesaing, substitusi (bahan pengganti) dan perkembangan IPTEK, khususnya perkembangan teknologi. Proses dan realisasi tersebut akan menghasilkan produk akhir sebagai keunggulan lokal yang mungkin berbentuk produk (barang/jasa) dan atau budaya yang bernilai tinggi, memiliki keunggulan komparatif, dan unik.

Dari pengertian kearifan lokal tersebut maka pembangunan Berbasis kearifan Lokal (PBKL) di lingkungan masyarakat adalah program peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang diselenggarakan pada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat masyarakat di lingkungan sekitar.

Proses pengembangan sumber daya manusia akan menjadi lebih menarik, memberi kegairahan pada semangat masyarakat, jika masyarakat bisa melihat kegunaan, manfaat, makna dari peningkatan mutu sumber daya manusia guna menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya saat ini bahkan di masa depan. Proses peningkatan mutu sumber daya alam sekalipun akan memberikan suasana yang menyenangkan (*joyful learning*) jika berkaitan dengan

potensi, minat, hobi, bakat masyarakat dan penerimaan masyarakat, bahwa apa yang lakukannya akan berguna bagi kehidupannya di masa depan (*contextual*). Karena masyarakat merasa mendapatkan keterampilan yang berharga untuk menghadapi hidup.

Salah satu prinsip *contextual teaching and learning* (CTL) adalah prinsip saling ketergantungan (*the principle of interdependence*). Prinsip saling ketergantungan menyadarkan masyarakat tentang saling ketergantungannya satu sama lain kepada masyarakat di sekitarnya dan dengan bumi tempatnya berpijak (termasuk potensi lokal yang terkandung dalam bumi). Mereka berada dalam suatu jaringan saling ketergantungan yang menciptakan lingkungan ramah, santun dan terpelihara. Dalam suatu lingkungan belajar dimana setiap orang menyadari keterikatannya, maka pengembangan kontekstual mudah berkembang (Johnson, 2002). Di samping itu bahkan pembahasan keunggulan lokal terkait dengan teori *konstruktivisme*. *Konstruktivisme* menurut Bettencourt (dalam Suparno, 1997) menyatakan bahwa kita tidak pernah mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologism, yang kita mengerti adalah struktur konstruksi kita akan sesuatu objek. Dalam konteks ini realitas yang ada di sekeliling masyarakat sehari-hari, misalnya yang berupa potensi daerah yang menjadi keunggulan lokal, akan membantu mempercepat masyarakat untuk mengkonstruksi pemikirannya menjadi suatu pengetahuan yang bermakna bagi dirinya. Potensi daerah atau keunggulan lokal adalah potensi yang kontekstual yang dapat diangkat sebagai bahan pembelajaran yang menarik di lingkungan masyarakat. Maka dari itu untuk lebih meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan rakyat dalam hal otonomi daerah, sudah semestinya kita semua bisa mengembangkan budaya berkearifan lokal sebagai embrio bangsa yang bermutu.

G. SDM Masyarakat Adat Diperkuat Demi Memperkaya Tradisi Lokal

Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai perlu dilakukan untuk memperkaya tradisi lokal dan mempertahankan

eksistensi desa adat. Hal tersebut berkaitan dengan penguatan tradisi dan budaya lokal, berikut pengembangan agar selaras dengan perkembangan zaman. Desa adat membutuhkan perhatian khusus untuk memperkecil kemungkinan terkikisnya budaya lokal. Masyarakat di desa adat juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, agar adat budaya Indonesia tetap terjaga eksistensinya. Pelatihan dan pembinaan masyarakat adat pernah digelar di Bali Bulan Juni 2016 lalu. Tema yang diambil adalah Mejejahitan, yakni keterampilan dari dari dedaunan yang erat kaitannya dengan upacara keagamaan di Bali. Mejejahitan ini khas sekali di Bali. Jangan sampai ini terlupakan, karena ini adalah salah satu dari identitas bangsa kita. Pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat adat tidak serta merta hanya berkaitan dengan tradisi dan budaya saja. Pelatihan juga digelar agar masyarakat adat dapat memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi desa.

Misalnya di Kalimantan Selatan kemarin, kita latih masyarakat adat di sana dalam hal ini suku dayak, untuk bagaimana dapat mengelola dan memasarkan hasil pertanian dengan baik. Karena bicara soal tradisi, mereka sudah sangat menguasai. Tinggal bagaimana masyarakat adat di sana bisa bertahan hidup dan taraf ekonominya meningkat.

H. Kearifan Lokal Di Indonesia

1. Definisi Kearifan Lokal

Menelisik pengertian kearifan lokal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat pengertian kamus tentang istilah itu. Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Kearifan lokal secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijaksanaan lokal.

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (indigenous knowledge systems) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena

hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (daily problem solving).

Dalam pengertian yang lebih luas, kearifan lokal dapat dipahami sebagai berikut: “Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture” (Naritoom, --)

Naritoom mengartikan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang terakumulasi karena pengalaman-pengalaman hidup, dipelajari dari berbagai situasi di sekeliling kehidupan manusia dalam suatu wilayah. Hal serupa dapat dilihat pada definisi yang dimunculkan dalam situs Wikipedia.com: “Traditional knowledge, indigenous knowledge, and local knowledge generally refer to the matured long-standing traditions and practices of certain regional, indigenous, or local communities. Traditional knowledge also encompasses the local, knowledge, and teachings of these communities. In many cases, traditional knowledge has been orally passed for generations from person to person. Some forms of traditional knowledge are expressed through stories, legends, folklore, rituals, songs, and even laws. Other forms of traditional knowledge are often expressed through different means.” (Sitasi dari Wikipedia, 2010)

Dari definisi-definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau hukum setempat.

Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau

menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan setiap hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Tiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal diarahkan secara arif berdasarkan sistem pengetahuan mereka, dimana tidak hanya bermanfaat dalam aktifitas keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam situasi-situasi yang tidak terduga seperti bencana yang datang tiba-tiba.

Berangkat dari semua itu, kearifan lokal adalah persoalan identitas. Sebagai sistem pengetahuan lokal, ia membedakan suatu masyarakat lokal dengan masyarakat lokal yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari tipe-tipe kearifan lokal yang dapat ditelusuri:

- a) Kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan: khusus berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat. (Contoh: Sasi laut di Maluku dan beberapa tempat lain sebagai bagian dari kearifan lokal dengan tujuan agar sumber pangan masyarakat dapat tetap terjaga).
- b) Kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan: untuk pencegahan dan pengobatan. (Contoh: Masing-masing daerah memiliki tanaman obat tradisional dengan khasiat yang berbeda-beda).
- c) Kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi: Tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional, sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. (Contoh: Subak di Bali; di Maluku ada Masohi untuk membuka lahan pertanian, dll.).
- d) Kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut (Contoh: Rumah orang Eskimo; Rumah yang terbuat dari gaba-gaba di Ambon, dll.).
- e) Kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu.

- f) Kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia: sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi terus menerus yang terbangun karena kebutuhan-kebutuhan di atas. (Contoh: Hubungan Pela di Maluku juga berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pangan, perumahan, sistem produksi dan lain sebagainya).

2. Tantangan Terhadap Kearifan Lokal

Bila ada sistem pengetahuan lokal, maka ada juga sistem pengetahuan global. Apabila sistem pengetahuan lokal merupakan kategori pembeda antara suatu komunitas lokal dengan komunitas lokal yang lain, maka sistem pengetahuan global berupaya mengatasi semua pengetahuan lokal dan menjadikan semua masyarakat lokal terintegrasi ke dalam satu sistem pengetahuan saja. Apabila sistem pengetahuan lokal muncul dalam bentuk mitos-mitos tradisional, maka sistem pengetahuan global muncul pula dalam mitos-mitos modern. Salah satu mitos yang sangat terkenal, khususnya di negara-negara berkembang dan bekas jajahan adalah “pembangunan”. Mitos pembangunan muncul guna membungkus ideologi “ekonomi politik pembangunan” negara-negara maju.

Definisi tentang pembangunan akan terus mengalami perubahan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tetapi pada umumnya, pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan dari kondisi yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Indikator-indikator yang menunjukkan suatu kondisi tidak baik tidak ditentukan begitu saja, tetapi ada prosesnya tersendiri. Dalam perspektif pembangunan secara umum, pembangunan ekonomi mendapatkan porsi yang lebih karena indikator kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun, untuk memahami pembangunan ekonomi, mesti melibatkan perspektif politik. Hal itu disebabkan karena perumusan kebijakan pembangunan merupakan proses politik yang melibatkan beragam aktor – mulai dari negara, birokrat, politisi, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat hingga masyarakat itu sendiri – dengan beragam kepentingan pula, yang

interaksinya bisa jadi saling berbenturan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengatasi konflik tersebut, para aktor dituntut melakukan berbagai negosiasi dan kompromi. Dengan demikian untuk memahami kebijakan pembangunan dengan benar perlu ditelusuri secara cermat perilaku, motivasi atau pun preferensi para aktornya sehingga diperoleh jawaban: siapa memperoleh apa, berapa banyak, mengapa dan dengan cara bagaimana dari kebijakan pembangunan yang berlangsung di suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Dalam kerangka politik ekonomi pembangunan, kearifan lokal tidak mendapatkan tempat sama sekali karena telah disingkirkan oleh sistem pasar dan negara. Investasi demi pertumbuhan ekonomi negara adalah lebih penting daripada suatu tindakan berkelanjutan bagi masa depan manusia yang menjadi inti dari kearifan masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, bukan saja sistem pengetahuan lokal masyarakat yang terpinggirkan, tetapi juga masyarakat lokal secara fisik dipinggirkan atau direlokasi dengan alasan pembangunan. Selain itu, dengan alasan investasi pula, keamanan menjadi faktor penting dalam pembangunan. Struktur pengamanan dibangun sampai ke pelosok-pelosok negeri dengan melibatkan aparat-aparat negara yang cenderung tidak memahami cara-cara masyarakat lokal menyelesaikan sengketa di antara mereka

Masyarakat lokal yang terorganisir dengan baik dan mendapatkan tempatnya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negeri (desa). Negeri telah lama menjadi basis pertempuran antara masyarakat vs negara, sosialisme vs kapitalisme. Secara sosio-historis, negeri-negeri pada umumnya berbasis ekonomi sosialis (prakteknya mendahului istilah). Kepemilikan tanah dikelola secara komunal dengan semangat egalitarian dan pemerataan. Hukum adat tidak mengenal kepemilikan pribadi yang mutlak, yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam sistem masyarakat tradisional. Hak-hak ulayat atau petuanan adat atas tanah menjadi contoh penting bagaimana pengelolaan tanah itu dilakukan di negeri-negeri adat.

Masalah muncul ketika sistem desa di Jawa dipaksakan untuk diberlakukan di luar Jawa. Di Jawa, telah lama terjadi penundukkan kerajaan terhadap desa dan membuat ketimpangan ekonomi-politik. Cerita-cerita lokal yang bisa diketahui melalui legenda atau sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa desa sebagai wilayah dan komunitas lokal menjadi domain mutlak kerajaan. Raja di Jawa adalah penguasa pribadi yang melakukan pengendalian dan pemilikan atas desa beserta seluruh isinya, terutama tanah dan penduduknya secara absolut. Raja memiliki hak penggunaan kekerasan dengan aparat-aparat kerajaan yang terlatih untuk melakukan tindakan represi terhadap desa. Para penguasa lokal tunduk kepada raja dan harus memberikan upeti karena semua wilayah itu adalah milik raja. Ketika sistem desa diperkenalkan ke luar Jawa, maka jiwa dan semangat sebagai klien terhadap patron itu pun terbawa ke sana. Campur tangan negara mulai nyata dan merubah hampir seluruh sistem pemerintahan adat, dengan hukum-hukum adat yang berlaku.

Kondisi itu menjadi basis yang kuat bagi kolonialisme mengembangkan sistem kapitalis dan mengeksploitasi tanah dan penduduk desa. Kolonialismelah yang membawa sistem pengetahuan modern ke negara-negara jajahan, memperkenalkan dan mempraktekannya.

3. Posisi Kearifan Lokal Guna Pemecahan Masalah Masa Kini

Tidak dapat dipungkiri, saat ini dunia mengalami permasalahan yang belum pernah dialami sebelumnya. Setelah terjadi dua kali perang dunia yang meluluhlantahkan segi-segi kemanusiaan, maka sistem pengetahuan modern yang menjadikan manusia dengan kemampuan rasionya sebagai tuan atas dirinya dan dunia pun mulai dikritik. Kritik-kritik itu datang karena ketidakmampuan rasio modern mengeliminasi kehancuran-kehancuran yang ditimbulkan akibat kepentingan di balik setiap penemuan-penemuan di bidang ilmu dan teknologi. Saat ini dunia kembali berhadapan dengan situasi lain, yaitu perubahan iklim yang tidak lagi menentu. Sekali lagi rasio modern yang menjadikan pembangunan sebagai salah satu proses

penting mendapat tantangannya. Dengan alasan pembangunan, lingkungan tempat hidup manusia diobrak-abrik, kota-kota baru dibangun, tambang-tambang baru dibuka, hanya untuk memenuhi nafsu konsumsi manusia.

Pada tahap itulah, ketika manusia dengan rasio modernnya telah bingung berhadapan dengan alam karena sudah tidak mampu lagi menguasainya, kearifan lokal memperoleh tempatnya kembali. Keharmonisan dengan lingkunganlah yang dapat menjamin masa depan manusia. Hal itu tentu saja telah dibuktikan lewat proses panjang kehidupan leluhur dalam komunitas-komunitas lokal dalam mensiasati alam lewat budaya yang arif dan bijaksana. Dalam beberapa kasus, konflik di Maluku misalnya, ketika kemampuan pengetahuan ilmiah dalam hubungan dengan manajemen konflik sepertinya sudah tidak mampu menemukan solusi terbaik, hanya kearifan lokal yang menjadi titik balik semua itu.

I. Kebudayaan Jawa

1. Kearifan Lokal Di Mojokerto

Budaya Jawa mempunyai peranan penting dalam budaya Indonesia, termasuk bahasanya. Bahasa Jawa menjadi salah satu pendukung atau pemer kaya bahasa Indonesia. Tidak sedikit kosakata bahasa Jawa menjadi warga bahasa Indonesia. Untuk itu, tidak berlebihan jika bangunan bahasa Indonesia ditopang oleh bahasa Jawa. Kearifan lokal, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) atau kebijaksanaan dan lokal (local) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Menurut Gobyah nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.

Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul

menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Dari penjelasan beliau dapat dilihat bahwa kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana ‘membaca’ potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup; dan diwujudkannya sebagai tradisi.

Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Kalau mau jujur, sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong, saling menghormati dan tepa salira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal.

Ciri – ciri dari kearifan lokal yaitu :

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar,
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar,
- c. Memiliki kemampuan mengendalikan,
- d. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsure budaya luar ke dalam budaya asli,
- e. Mampu member arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah dalam “ Berpijak pada Kearifan lokal” mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal

merupakan perpaduan antara nilai – nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus- menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

S. Swarsi Geriya “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” mengatakan bahwa secara konseptual kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika. Cara-cara yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

2. Kearifan Lokal Yang Ada Di Wonoploso Serta Makna Dan Fungsinya “Upacara Tingkeban/ Mitoni (Nujuh Bulanan)”

Upacara Tingkeban adalah salah satu tradisi masyarakat di Wonoploso, upacara ini disebut juga mitoni berasal dari kata pitu yang arti nya tujuh, upacara ini dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan dan pada kehamilan pertama kali. Upacara ini bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam rahim ibu. Dalam upacara ini sang ibu yang sedang hamil di mandikan dengan air kembang setaman dan di sertai doa yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan YME agar selalu diberikan rahmat dan berkah sehingga bayi yang akan dilahirkan selamat dan sehat.

➤ Tata Cara pelaksanaan Upacara Tingkeban :

Siraman yang di lakukan oleh para sesepuh sebanyak 7 orang termasuk ayah dan ibu wanita hamil serta suami dari calon ibu. Siraman ini bermakna memohon doa restu agar proses persalinan lancar dan anak yang akan dilahirkan selamat dan sehat jasmani dan rohani.

Setelah siraman selesai, dilanjutkan dengan upacara memasukan telur ayam dan cengkir gading. Calon ayah memasukan

telur ayam mentah ke dalam sarung/kain yang di kenakan oleh calon ibu melalui perut sampai pecah kemudian menyusul kedua cengkir gading di teroboskan dari atas ke dalam kain yang di pakai calon ibu sambil di terima di bawah oleh calon nenek dan kelapa gading tersebut di gendong oleh calon nenek dan di letak kan sementara di kamar. Hal ini merupakan symbol harapan semoga bayi akan lahir dengan mudah tanpa ada halangan.

➤ **Upacara Mecah Kelapa**

Kelapa gading yang tadi di bawa ke kamar, kembali di gendong oleh calon nenek untuk di bawa keluar dan di letak kan dalam posisi terbalik (gambar tidak terlihat) untuk di pecah, Kelapa gading nya berjumlah 2 dan masing masing di gambari tokoh Wayang Kamajaya dan Kamaratih. Calon ayah memilih salah satu dari kedua kelapa tersebut. Apabila calon ayah memilih Kamajaya maka bayi akan lahir Laki laki, sedangkan jika memilih Kamaratih akan lahir perempuan (hal ini hanya pengharapan saja, belum merupakan suatu kesungguhan)

➤ **Dodol Rujak**

Pada upacara ini, calon ibu membuat rujak di dampingi oleh calon ayah, para tamu yang hadir membeli nya dengan menggunakan kereweng sebagai mata uang. Makna dari upacara ini agar kelak anak yang di lahirkan mendapat banyak rejeki dan dapat menghidupi keluarganya.

Selain itu ada makna lain yang tersirat dari upacara tingkeban yaitu mempererat tali silahturohmi sesama masyarakat dan juga mentradisikan budaya bangsa yang sudah ada sejak nenek moyang.

➤ **Tradisi Ruwahan**

Di desa Wonoploso juga ter dapat tradisi ruwahan berisi kegiatan melaksanakan ritual yang dilakukan pada saat datangnya bulan Ruwah atau bulan Arwah. Bagi masyarakat desa Wonoploso khususnya bulan Arwah mempunyai makna penting sebagai momentum bagi semua yang masih hidup untuk mengingat jasa dan budi baik para leluhur, tidak hanya terbatas pada orang-orang yang telah menurunkan kita, namun juga termasuk orang-orang terdekat,

para pahlawan, para perintis bangsa yang telah mendahului kita pindah ke dalam dimensi kehidupan yang sesungguhnya. Bulan Arwah juga merupakan saat di mana kita harus “sesirih” atau bersih-bersih diri meliputi bersih lahir dan bersih batin. Membersihkan hati dan pikiran sebagai bentuk pembersihan dimensi jagad kecil (mikrokosmos) yakni diri pribadi kita meliputi unsur wadag dan alus, raga dan jiwa.

Tidak hanya sebatas pembersihan level mikrokosmos, selebihnya adalah bersih-bersih lingkungan alam di sekitar tempat tinggal kita, membersihkan desa, kampung, kuburan, sungai, halaman dan pekarangan di sekeliling rumah, tak lupa membersihkan semua yang membuat kotor dan jorok dalam rumah tinggal kita. Bagi petani tak luput pula bersih-bersih sawah dan ladang. Semua itu sebagai bentuk pembersihan dimensi jagad besar (makrokosmos).

Selain makna tersebut, ritual ruwahan merupakan wujud bakti dan rasa penghormatan kita sebagai generasi penerus kepada para pendahulu yang kini telah disebut sebagai leluhur. Pelaksanaan ritual ruwahan bukan tanpa konsep dan prinsip yang jelas. Ruwahan didasari oleh kesadaran spiritual masyarakat kita secara turun-temurun, di mana kita hidup saat ini telah berhutang jasa, berhutang budi baik kepada alam dan para leluhur pendahulu yang telah mendahului kita. Tak ada cara yang lebih tepat selain harus berbakti, setia dan berbakti kepada para leluhurnya yang telah mewariskan ilmu dan harta benda, termasuk bumi pertiwi, yang dapat dimanfaatkan oleh anak turunnya hingga saat ini. Ritual tradisi Ruwahan sebagai bukti kesetiaan dan sikap berbakti kepada lingkungan alam yang telah memberikan berkah berupa rejeki, tempat berlindung, hasil bumi, oksigen dan sebagainya. Karenanya hanya dengan kesetiaan serta berbakti, kita menjadi generasi penerus yang tidak mengkhianati leluhur, bangsa dan bumi pertiwinya. Berkhianat kepada para leluhurnya sendiri, maupun kepada bumi pertiwi di mana tempat kita menyangkan hidup sudah pasti akan menyebabkan suatu akibat buruk. Pengkhianatan (ketidaksetiaan) dan kedurhakaan (tidak berbakti) yang dilakukan generasi penerus, akan menimbulkan

kesengsaraan pada diri pribadinya (mikrokosmos) dan sangat memungkinkan tertransformasi ke dimensi makrokosmos lingkungan alamnya. Sebaliknya, kesetiaan pada bumi pertiwi yakni bumi di mana nyawa kita berpijak, kita hirup udara, kita mencari makan, dan berbakti kepada para leluhur yang menurunkan kita, merupakan satu rangkaian berupa kunci meraih kesuksesan hidup secara hakiki. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin akan berlimpah menghampiri kita setiap saat.

3. Makna Ritual dan Sajian

Hantaran tradisi Ruwahan berisi tiga sajian makanan yakni ketan, kolak, dan apem yang ketiganya mempunyai makna masing-masing:

- ketan, makanan ini merupakan simbol eratnya tali silaturahmi, karena sifat dan bentuk ketan yang lengket.
- kolak, makanan yang diolah dengan menggunakan santan yang manis, melambangkan hubungan kekeluargaan yang selalu harmonis dan bahagia, serta mengajak persaudaraan bisa lebih ‘dewasa’ dan barokah penuh kemanisan.
- apem, makanan yang mempunyai arti kesediaan untuk saling memaafkan. Kata apem berasal dari bahasa arab “afwan” yang bermakna maaf.

Doa dan makan bersama (kenduri) dalam ritus nisfu sya’ban atau pada setiap malam hari selama seminggu sebelum ramadhan, merupakan bentuk dari pengejawantahan dari kebersamaan, sikap kekeluargaan, dan cara untuk memakmurkan masjid, serta meningkatkan kualitas sujud syukurnya pada Allah.

Tabur bunga merupakan bentuk dari cara masyarakat untuk selalu mengenang semua yang indah dan yang baik dari mereka yang telah mendahului. Selain itu ada kepercayaan masyarakat bahwa dengan adanya bunga di atas makam turut membantu aroma wangi

pada arwah di alam kubur dan malaikat tidak sungkan mendekat. Bunga yang sering digunakan untuk nyekar adalah bunga kanthildan telasih. Bunga kanthil bermakna mengikat rasa selalu terhubung dengan para leluhur. Diharapkan dapat mencontoh perilaku baik para leluhur semasa hidupnya. Bunga kanthil berarti tansah kumanthil. Yang kumanthil adalah hatinya. Sukur-sukur berkahnya (safa'atnya) dapat "kanthil" (mengikuti) sumrambah mengalir ke dalam jiwa raga si peziarah. Bunga Telasih bermakna welas asih, dengan harapan dapat kawelasan atau belas kasih dari Gusti Hyang Manon. Belas kasih pula dari para leluhur yang akan njangkung dan njampangi setiap langkah kita agar tidak salah langkah menjalani proses kehidupan yang sangat pelik ini. Ziarah ke makam merupakan bentuk interpretasi dari praktik hadis yang menyatakan baha salah satu amal yang masih diterima dari orang yang sudahmeninggal adalah anak sholeh dan sholehah yang selalu mendoakan. Selain itu, ziarah juga memberikan tanda bahwa kita harus tetap mengingat leluhur kita dan saudara-saudara kita serta mengingatkan kita akan adanya kematian. Sehingga kita terangsang untuk berbuat baik.

1. Tradisi bersih kampong/desa memberikan gambaran tentang kebersamaan dan kegotong-royongan.mengingatn kita untuk selalu saling tolong-menolong antarsesama. Selain itu bersih desa juga mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya lingkungan tempat di mana kita tinggal, sehingga membangun jiwa kita untuk melestarikannya.

2. Pembacaan tahlil dan yasin merupakan tanda yang menunjukkan ciri agama islam, sedangkan bentuk slametan merupakan adaptasi dari adapt istiadat sekitar yang sudah ada sebelum agama islam masuk. Slametan sendiri merupakan bentuk adaptasi dari sesaji yang dilakukan oleh para wali untuk menyebarkan agama islam di tanah jawa agar mudah diterima oleh masyarakat yang pada saa titu masih beragama Hindu dan Budha bahkan kepercayaan Animisme-Dinamisme.

4. Ruwatan Murwakala

➤ Makna Ruwatan

Ruwatan adalah salah satu upacara tradisional dengan tujuan utama mendapatkan keselamatan supaya orang terbebas dari segala macam kesialan hidup, nasib jelek dan selanjutnya agar dapat mencapai kehidupan yang ayom ayem tentrem (aman, bahagia, damai di hati). Lebih konkritnya ruwatan sebagai suatu upaya membersihkan diri dari sengkala dan sukerta (dosa dan sial) yang diakibatkan dari perbuatannya sendiri, hasil perbuatan jahat orang lain maupun, Ruwatan yang paling terkenal sejak zaman kuno diselenggarakan oleh nenek moyang adalah ruwatan murwakala. Dalam ruwatan ini dipergelarkan wayang kulit dengan cerita Murwakala di mana orang-orang yang termasuk kategori sengkolo-sukerto diruwat atau disucikan supaya terbebas dari hukuman Betara Kala, gambaran raksasa menakutkan yang suka memangsa para sukerto.

➤ Tradisi Ruwat

Ritual pangruwatan dalam masyarakat di Wonoploso yang paling sering dan mudah dilakukan biasanya adalah pemagaran gaib yang dilakukan dengan menyediakan berbagai jenis sesaji dan melakukan ritual khusus. Cara di atas bisa dilakukan apabila sengkolo-sukerto yang ada masih termasuk jenis yang ringan dan mudah dibersihkan. Sementara itu untuk sengkolo-sukerto kelas berat pelaksanaan yang umum dilakukan dalam masyarakat Jawa adalah dengan menggelar pentas wayang kulit yang melakonkan tentang ruwatan itu sendiri. Sang dalang dalam menampilkan pagelarannya menyajikan salah satu dari beberapa jenis lakon. Misalnya lakon murwakala. Ruwatan dengan pagelaran wayang dilakukan sebagai suatu bentuk mendapatkan dispensasi atau keringanan hukuman. Dalam tradisi hukum positif (formal) sepadan dengan membayar denda kepada negara atau memohon grasi kepada Presiden. Dalam hal ruwatan, Bethara Kala posisinya sebagai Presiden dari bangsa

lelembut. Negosiasi tertuju pada Bethara Kala sebagai salah satu eksekutor hukum alam.

Ruwatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Wonoploso adalah ruwatan pada diri sendiri yang memiliki fungsi sebagai upaya membersihkan diri dari sengkala dan sukerta (dosa dan sial agar mendapatkan kebersihan jiwa.

Ruwatan untuk diri sendiri dapat dilaksanakan dengan pakem sederhana maupun dengan pakem standar yakni dengan pagelaran wayang kulit dengan lakon dan uborampe khusus ruwatan. Semua itu merupakan pilihan bagi siapa yang akan melaksanakan. Jika ruwatan dilakukan oleh orang yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, biasanya ruwat murwakala dilakukan dengan mengadakan pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit ini berbeda dengan pagelaran yang pada umumnya dilakukan. Pagelaran wayang kulit dilaksanakan pada siang hari dan dilakukan oleh dalang yang benar-benar mampu (bukan sekedar bisa) meruwat.

Dari beberapa tradisi di atas tersirat bahwa tradisi – tradisi tersebut banyak memiliki fungsi dan manfaat bagi masyarakat diantaranya masyarakat dapat membangun kebersamaan dengan meningkatkan gotong – royong dalam melaksanakan kearifan lokal, mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat bahkan yang lebih baik unsur kekeluargaan tidak akan pernah hilang. Sebagian besar dari masyarakat telah mempercayai, bila tradisi (kearifan local) tidak dilakukan dengan benar sampai – sampai tidak dilaksanakan akan terjadi suatu bencana besar, suatu misal bencana alam akan melanda kampong mereka, wabah penyakit menyerang warga, bahkan ketidaktentraman dalam diri masing – masing masyarakat

J. Kearifan Lokal Masyarakat Desa

Menurut Petrasa Wacana kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok

masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun dan terangkum dari pengalaman panjang manusia menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan) secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis. Kemudian kita lanjutkan dengan kearifan lokal yang spesifik mengenai lingkungan yaitu kearifan lingkungan. Kearifan lingkungan (ecological wisdom) merupakan pengetahuan yang diperoleh dari abstraksi pengalaman adaptasi aktif terhadap lingkungannya yang khas. Pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk ide, aktivitas dan peralatan. Kearifan lingkungan yang diwujudkan ke dalam tiga bentuk tersebut dipahami, dikembangkan, dipedomani dan diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas pendukungnya. Sikap dan perilaku menyimpang dari kearifan lingkungan, dianggap penyimpangan (deviant), tidak arif, merusak, mencemari, mengganggu dan lain-lain. Kemudian kita juga dapat menggali lebih dalam lagi mengenai kearifan lingkungan. Kearifan lingkungan dimaksudkan sebagai aktivitas dan proses berpikir, bertindak dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam mengamati, memanfaatkan dan mengolah alam sebagai suatu lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia secara timbal balik. Kesuksesan kearifan lingkungan itu biasanya ditandai dengan produktivitas, sustainabilitas dan equitabilitas atau keputusan yang bijaksana, benar, tepat, adil, serasi dan harmonis.

Menurut Munsir Lampe melalui artikelnya yang berjudul “Kearifan Tradisional Lingkungan Belajar dari Kasus Komunitas-Komunitas Petani dan Nelayan Tradisional” Kearifan lingkungan di Indonesia menjadi topik perbincangan yang menarik, bahkan mendesak kepentingannya sehubungan dengan isu program rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan, khususnya lingkungan ekosistem laut (mangrove dan terumbu karang) yang mengalami kerusakan pada hampir semua daerah perairan pantai dan pulau-pulau, yang menurut hasil penelitian, banyak diakibatkan oleh perilaku pemanfaatan, terutama komunitas-komunitas nelayan itu sendiri.

Haryati Soebadio berpendapat bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Menurut Rahyono (2009:7) kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Definisi kearifan lokal tersebut, paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang;
- b. Kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya;
- c. Kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya.

Menurut Wahyu dalam Mukti (2010) bahwa kearifan lokal, dalam terminology budaya, dapat diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat, yang unik, mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru. Secara lebih spesifik, kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan lokal, yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam dan beragam kegiatan lainnya di dalam komunitas-komunitas.

Jadi, dapat disimpulkan kearifan lokal adalah , kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan lokal, yang unik yang

berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam dan beragam kegiatan lainnya di dalam komunitas-komunitas.

1. Ruang Lingkup Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena dia dapat mencakup kearifan masa kini dan karena itu pula lebih luas maknanya daripada kearifan tradisional.

Untuk membedakan kearifan lokal yang baru saja muncul dengan kearifan lokal yang sudah lama dikenal komunitas tersebut, dapat digunakan istilah: kearifan kini, kearifan baru, atau kearifan kontemporer. Kearifan tradisional dapat disebut kearifan dulu atau kearifan lama.

2. Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan salah satu warisan dari nenek moyang, warisan tersebut bisa berupa tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya ataupun adat istiadat (Basuni, 2012). Keberadaan kearifan lokal ini bukan tanpa fungsi. Kearifan lokal sangat banyak fungsinya.

Seperti yang dituliskan Sartini (2006), bahwa fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut:

- Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
- Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia.
- Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
- Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
- Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat.
- Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian
- Bermakna etika dan moral.
- Bermakna politik,

kearifan lokal yang terkait dengan kebudayaan, memiliki arti penting untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan, sekaligus agar selalu terjaga kelestariannya. Terlebih lagi, di tengah-tengah modernisasi yang istilahnya saat ini lebih akrab dikenal sebagai globalisasi. Yang dalam kenyataannya, globalisasi itu dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal oleh nilai budaya asing yang berkembang begitu pesat di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, baik yang hidup di perkotaan maupun perdesaan (Puslitbangbud, 2011).

Pelestarian kearifan lokal dengan sendirinya akan dapat melestarikan lingkungan perdesaan. Karena, nilai-nilai kearifan lokal tersebut akan menjadikan masyarakat memiliki karakter kuat sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku di lingkungannya. Selain itu, desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi akan menjaga kelestarian kawasan konservasi karena biasanya kawasan tersebut erat kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut. Kegiatan konservasi di suatu wilayah sebaiknya berasal dari kesadaran masyarakat yang berada di wilayah yang bersangkutan. Kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sangat diperlukan tidak saja untuk kepentingan bangsa Indonesia melainkan juga untuk kepentingan masyarakat dunia secara keseluruhan dan

diarahkan untuk kepentingan jangka panjang (Aulia & Dharmawan, 2010)

Peranan kearifan lokal dalam kelestarian lingkungan perdesaan dapat kita temukan contoh kasusnya pada kampung-kampung adat seperti Baduy, Kampung Kuta, Kampung Naga, dsb. Di daerah tersebut, lingkungan perdesaan dan hutan yang berbatasan langsung sangat terjaga kelestariannya, masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya namun tetap dapat menjaga kelestarian dari hutan tersebut karena terikat oleh nilai-nilai kearifan local

3. Pendekatan Kearifan Lokal

Dalam belajar kearifan lokal khususnya dan kearifan lingkungan pada umumnya maka penting untuk mengerti :

a. Politik Ekologi (Political Ecology)

Politik ekologi sebagai suatu pendekatan, yaitu upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks daripada sekedar sistem biofisik yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan, persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Melalui pendekatan politik ekologi dapat untuk melihat isu-isu pengelolaan lingkungan khususnya menyangkut isu “right to environment dan environment justice” dimana right merujuk pada kebutuhan minimal/standarindividu terhadap obyek-obyek right seperti hak untuk hidup, hak untuk bersuara, hak untuk lingkungan dan lain-lain. Adapun justice menekankan alokasi pemilikan dan penguasaan atas obyek-obyek right yaitu merujuk pada persoalan-persoalan relasional antar individu dan antar kelompok (Bakti Setiawan, 2006).

Konsep right to environment dan environment justice harus mempertimbangkan prinsipprinsip keadilan diantara generasi (intra-generational justice) dan lintas generasi (inter-generational justice),

karena konsep pembangunan berkelanjutan menekankan baik dimensi diantara generasi maupun lintas generasi.

b. Human Welfare Ecology

Pendekatan Human Welfare Ecology menurut Eckersley, 1992 dalam Bakti Setiawan, 2006 menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya.

Maka dari itu perlu strategi untuk dapat menerapkannya antara lain :

- Strategi pertama, melakukan perubahan struktural kerangka perundangan dan praktek politik pengelolaan sumberdaya alam, khususnya yang lebih memberikan peluang dan kontrol bagi daerah, masyarakat lokal dan petani untuk mengakses sumberdaya alam (pertanahan, kehutanan, pertambangan, kelautan). Dalam hal ini lebih memihak pada masyarakat lokal dan petani dan membatasi kewenangan negara yang terlalu berlebihan (hubungan negara kapital masyarakat sipil).
- Strategi kedua, menyangkut penguatan institusi masyarakat lokal dan petani
- Pendekatan Ekosistemik
Pendekatan ekosistemik melihat komponen-komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang dan
- Pendekatan Aksi dan Konsekuensi (Model penjelasan Kontekstual Progressif)

Model ini lebih aplikatif untuk menjelaskan dan memahami fenomena-fenomena yang menjadi pokok masalahnya. Kelebihan dari pendekatan ini adalah mempunyai asumsi dan model penjelasan yang empirik, menyediakan tempat-tempat dan peluang bagi adopsi asumsi-asumsi dan konsep-konsep tertentu yang sesuai.

Selanjutnya Vayda dalam Su Ritohardoyo (2006:25) menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual progressif lebih menekankan pada obyek-obyek kajian tentang :

- a. aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan
- b. penyebab terjadinya aktivitas dan
- c. akibat-akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas.

4. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan

Sejarah peradapan telah menunjukkan betapa usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya telah menimbulkan kesengsaraan berupa bencana alam yang disebabkan karena manusia tidak mampu mengendalikan ketamakannya. Mengalami hal tersebut, manusia mulai berfikir dan bekerja secara aktif untuk memahami lingkungannya yang memberikan tantangan dan mengembangkan cara-cara yang paling menguntungkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang terus cenderung meningkat dalam jumlahnya, ragam dan mutunya.

Manusia berusaha memahami alam semesta beserta isinya, memilah-milah gejala yang nampak nyata atau tidak nyata ke dalam sejumlah kategori untuk mempermudah mereka dalam menghadapi alam secara lebih efektif. Dengan kemampuan bekerja dan berfikir secara metaforik, manusia tidak lagi mengandalkan naluri dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ia mulai secara aktif mengolah sumberdaya alam dan mengelola lingkungan sesuai dengan resep-resep budaya yang merupakan himpunan abstraksi pengalaman mereka menghadapi tantangan. Manusia dalam beradaptasi, mengembangkan kearifan lingkungan yang berwujud ideasional berupa pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktifitas serta peralatan, sebagai hasil abstraksi pengalaman yang dihayati oleh segenap masyarakat pendukungnya dan yang menjadi pedoman atau kerangka acuan untuk melihat, memahami, memilah-milah gejala yang dihadapi serta memilih strategi bersikap maupun bertindak dalam mengelola lingkungan.

Keanekaragaman pola-pola adaptasi manusia terhadap lingkungan, terkadang tidak mudah dimengerti oleh pihak ketiga yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda. Namun demikian, keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan tersebut merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Masyarakat Indonesia dengan ribuan komunitas mengembangkan kearifan lokal sesuai dengan karakteristik lingkungan yang khas. Secara suku bangsa terdapat lebih kurang 555 suku bangsa atau sub suku bangsa yang tersebar di wilayah Kepulauan Nusantara. Dalam beradaptasi terhadap lingkungan, kelompok-kelompok masyarakat tersebut mengembangkan kearifan lingkungan sebagai hasil abstraksi pengalaman mengelola lingkungan. Sering kali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat sangat rinci dan menjadi pedoman yang akurat bagi masyarakat yang mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukiman mereka. Pengetahuan rakyat itu biasanya berbentuk kearifan yang sangat dalam maknanya dan sangat erat kaitannya dengan pranata kebudayaan, terutama pranata kepercayaan (agama) dan hukum adat yang kadang-kadang diwarnai dengan mantra-mantra. Ia merupakan kumpulan abstraksi pengalaman yang dihayati oleh segenap anggota masyarakat pendukungnya dan menjadi pedoman atau kerangka acuan untuk melihat, memahami dan memilah-milah gejala yang dihadapi serta memilih strategi dalam bersikap maupun bertindak dalam mengelola lingkungan. Perbedaan acuan, pandangan/penilaian, standar, ukuran atau kriteria tersebut, dapat menimbulkan benturan atau konflik antara masyarakat lokal dengan pengusaha maupun pemerintah. Padahal, pembangunan berkelanjutan memungkinkan pemanfaatan kearifan dan sumber-sumber daya sosial sebagai modal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kurangnya perlindungan atau penghormatan terhadap kearifan lingkungan yang dikembangkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya

alama, antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pihak terkait (stakeholders) dan tidak bersedianya informasi mengenai kearifan lingkungan. Sejumlah konflik yang muncul mengenai lingkungan lebih banyak melibatkan masyarakat adat dengan masyarakat lain yang tidak mengalami kearifan lokal dan adat suatu masyarakat tentang bagaimana masyarakat tersebut mengelola lingkungannya secara tradisional termasuk pelanggaran pemilikan tanah secara adat. Karena itu, langkah yang tepat dalam usaha untuk mewujudkan kearifan lingkungan adalah dengan mengkaji kembali tragedi yang ada di masyarakat tentang usaha mereka untuk mewujudkan keseimbangan kehidupannya dengan lingkungannya. Tradisi dan aturan lokal yang tercipta dan diwariskan turun menurun untuk mengelola lingkungan, dapat merupakan materi penting bagi penyusunan kebijakan yang baru tentang lingkungan. Norma-norma yang mengatur kelakuan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, ditambah dengan kearifan ekologi tradisional yang mereka miliki, merupakan etika lingkungan yang mempedomani perilaku manusia dalam mengelola lingkungannya.

Kriteria kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) terdiri dari:

- a. Nilai-Nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
- b. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Kriteria Pengetahuan Tradisional (PT) terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Harry Alexander dan Miranda Risang Ayu, 2011), secara garis-besar, adalah:

- Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antargenerasional,
- Secara nyata dapat dibedakan, atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas masyarakat hukum adat, yang melestarikan dan

mentransmisikan Pengetahuan Tradisional (PT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional di dalam komunitas itu sendiri,

- Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu masyarakat hukum adat, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas Pengetahuan Tradisional (PT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemilikan kolektif, maupun tanggung-jawab budaya. Kaitan antara Pengetahuan Tradisional (PT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, melalui praktek-praktek kebiasaan atau praktek-praktek tradisional, protokol, atau hukum nasional yang berlaku.
- Diwariskan dari generasi ke generasi, meski pun pemakaiannya mungkin tidak terbatas lagi di dalam komunitas terkait saja.

5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Masyarakat setempat yang menerapkan cara hidup tradisional di daerah pedesaan, yang nyaris tak tersentuh teknologi umumnya dikenal sebagai masyarakat suku, komunitas asli atau masyarakat hukum adat, penduduk asli atau masyarakat tradisional. Masyarakat setempat seringkali menganggap diri mereka sebagai penghuni asli kawasan terkait, dan mereka biasanya berhimpun dalam tingkat komunitas atau desa. Kondisi demikian dapat menyebabkan perbedaan rasa kepemilikan antara masyarakat asli/pribumi dengan penghuni baru yang berasal dari luar, sehingga masyarakat setempat seringkali menjadi rekan yang tepat dalam konservasi.

Di sebagian besar penjuru dunia, semakin banyak masyarakat setempat telah berinteraksi dengan kehidupan modern, sehingga sistem nilai mereka telah terpengaruh, dan diikuti penggunaan barang dari luar. Pergeseran nilai akan beresiko melemahnya kedekatan masyarakat asli dengan alam sekitar, serta melunturkan etika

konservasi setempat. Masyarakat tradisional pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan di sekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Masyarakat pedusunan memiliki keunikan khusus seperti kesederhanaan, ikatan emosional tinggi, kesenian rakyat dan loyalitas pada pimpinan kultural seperti halnya konsep-konsep yang berkembang di pedusunan sebagai seluk beluk masyarakat Jawa akan pemahamannya pada : 1) Gusti Allah, 2) Ingkang Akaryo jagad, 3) Ingkang Murbeng Dumadi, 4) Hyang Suksma Adiluwih, 5) Hyang maha Suci, 6) Sang Hyang Manon, 7) Agama Ageman Aji, dan 8) Kodrat Wiradat. Semua itu menjadi pedoman bagi orang Jawa dalam berperilaku, sehingga selalu mempertimbangkan pada besarnya Kekuasaan Gusti Allah dan harus menjaga apa saja yang telah diciptakannya. Di samping itu dalam berperilaku orang akan berpedoman pada berbagai macam hal yang pada hakekatnya mempunyai nilai baik dan buruk serta pada kegiatan yang didasarkan pada benar dan salah.

Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, maka Nababan dalam Suhartini (2009) mengemukakan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional sebagai berikut :

- Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri
- Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama (communal property resource). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama ini dari pihak luar.

- Sistem pengetahuan masyarakat setempat (lokal knowledge sistem) yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas.
- Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam setempat
- Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan sosial tertentu.
- Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumberdaya di luar aturan adat yang berlaku.

Contoh kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dari beberapa daerah yang ada di nusantara:

a. Kearifan lokal masyarakat Suku Bajo terkait pemanfaatan sumber daya di laut Suku Bajo memiliki nilai-nilai dan norma yang mengatur kehidupan mereka. Kearifan lokal tersebut membuat Suku Bajo mampu bertahan hingga sekarang. Kearifan dan pengetahuan lokal tersebut merupakan hasil dari proses yang sangat panjang dari generasi ke generasi. Beberapa kearifan lokal Suku Bajo dalam memperlakukan lingkungannya dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

Suku Bajo memiliki kegiatan yang dinamakan Bapongka atau biasa juga disebut babangi. Bapongka merupakan istilah untuk kegiatan melaut selama beberapa minggu bahkan bulan dengan perahu berukuran kurang lebih 4 x 2 meter yang disebut Leppa dengan mengikutsertakan anak istri (Alwiah dan Utina, 2013).

Selama Bapongka terdapat suatu kearifan yang sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan perairan yaitu berupa larangan atau pamali untuk:

- Tidak boleh membuang air bekas cucian beras
- Arang kayu bekas memasak,
- Ampas kopi,
- Air cabe,
- Air jahe,
- Kulit jeruk, dan
- Abu dapu

Suku bajo dari sejak jaman dahulu sudah mulai memiliki pemahaman jika membuang sampah dapat mencemari lingkungan. Meskipun, sampah yang dibuang merupakan sampah organik dan tidak terlalu memberikan dampak negatif bagi perairan, namun nilai-nilai tersebut perlu dilestarikan dan mungkin direvitalisasi dengan penguatan dan penambahan pemahaman agar larangan membuang limbah berlaku tidak hanya kepada ketujuh benda yang telah disebutkan di atas, namun juga terhadap seluruh limbah dari produk modern yang dibawa ketika Bapongka.

Selain larangan dalam membuang tujuh jenis limbah ketika yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, terdapat pamali lain yang ternyata juga memiliki nilai kelestarian lingkungan. Pamali tersebut adalah larangan untuk menangkap ikan yang berukuran kecil dan memakannya Mereka hanya boleh mengonsumsi ikan yang memiliki ukuran besar atau layak panen. Norma lain yang berlaku adalah menghormati laut. Suku Bajo sangat menghormati laut karena

merupakan sumber penghidupannya. Bagi Suku bajo pamali untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau mengumpat di laut. hal tersebut menunjukkan betapa Suku Bajo sangat menghargai laut. Suku Bajo sangat takut melanggar pamali. Mereka beranggapan akan mendatangkan malapetaka dan musibah apabila melanggar pamali. Malapetaka atau musibah tersebut dapat datang dalam berbagai bentuk seperti tidak memperoleh ikan, badai, ombak besar, dsb

b. Kearifan lokal masyarakat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar

Kearifan lokal suatu daerah atau tempat berbeda-beda. Misalnya untuk menjaga kelestarian hutan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Propinsi Riau dengan cara membuat hutan larangan adat, yaitu melestarikan hutan bersama-sama di dalam masyarakat tersebut dan masyarakat dilarang menebang di hutan larangan adat tersebut. Jika dilanggar akan dikenakan denda seperti, beras 100 kg atau berupa uang sebanyak Rp 6 juta.

c. Kearifan lokal masyarakat Desa Claket

Berbeda dengan desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ada kearifan lokal dalam melestarikan sumber air yaitu dengan upacara “bersih desa”, yaitu berjalan bersama-sama seluruh warga desa sambil membawa makanan menuju sumber mata air Claket. Setelah sampai pada sumber mata air, diadakan acara “Selamatan” seluruh warga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya berupa sumber air sehingga dapat memberi penghidupan seluruh warga yang sehari sebelumnya tempat tersebut dibersihkan terlebih dahulu dan ditanami pohon.

Hampir sama seperti di Jawa, untuk menjaga kelestarian hutan di bali khususnya di Desa Penglipuran bentuk kearifan lokal masarakat setempat yaitu adanya konsep “Hutan Due” yang telah disahkan pada awig-awig (peraturan) desa. Konsep “Hutan Due” yang berarti hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Kayu atau

pun hasil hutan yang ada di hutan itu hanya bisa digunakan untuk keperluan upacara adat. Jika ada orang yang mengambil hasil hutan pada hutan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan aparat desa, maka akan dikenakan sanksi sesuai awig-awig yang telah disepakati.

d. Kearifan lokal masyarakat Bali

Sedangkan untuk masyarakat Bali pada umumnya untuk melestarikan hutan dengan cara mengadakan perayaan hari Tumpek Pengatag yang diadakan setiap 210 hari sekali. Pada upacara ini mengajarkan pada umat manusia bahwa kita wajib bersyukur atas harmoni yang membantu kita tinggal dalam alam kehidupan ini. Menghormati dan menghargai bumi dan seisinya, khususnya tanaman yang ada, memberi isyarat dan makna mendalam agar manusia mengasihi dan menyayangi alam dan lingkungan yang telah berjasa menopang hidup dan penghidupannya

Kalau kita pandang dari segi sosial masyarakat bahwa kearifan lokal itu merupakan media pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar saling menghormati dan saling menyayangi. Baik sesama manusia maupun terhadap lingkungan.

e. Kearifan lokal masyarakat Minangkabau

Di Propinsi Sumatera Barat yang sering juga disebut dengan Ranah Minang, juga terdapat beberapa jenis Kearifan Lokal yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan Tanah dan Air diantaranya Rimbo Larangan, Banda Larangan, Tabek Larangan, Mamutiah Durian, Parak, Menanam Tanaman Keras sebelum Nikah, Goro Basamo dan masih banyak lagi yang lainnya.

- Rimbo Larangan (Hutan Larangan)

Yaitu hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya yang sangat vital sekali sebagai persediaan air sepanjang waktu untuk keperluan masyarakat, selain itu kayu yang tumbuh di hutan juga dipandang sebagai perisai untuk melindungi

segenap masyarakat yang bermukim disekitar hutan dari bahaya tanah longsor. Apabila ada terdapat diantara warga yang akan membuat rumah yang membutuhkan kayu, maka harus minta izin lebih dulu kepada aparat Nagari melalui para pemangku adat untuk menebang kayu yang dibutuhkan dengan peralatan Kapak dan Gergaji tangan.

- Banda Larangan (Sungai, Anak Sungai / Kali Larangan)

Merupakan suatu aliran sungai yang tetap dijaga agar tidak tercemar dari bahan atau benda yang bersifat dapat memusnahkan segenap binatang dan biota lainnya yang ada di aliran sungai sehingga tidak menjadi punah, seperti halnya warga masyarakat tidak boleh menangkap ikan dengan cara Pengeboman, memakai racun, memakai aliran listrik dan lain sebagainya. Untuk panen Ikan dari Banda Larangan tersebut, pihak Pemangku Adat dan Aparat Nagari melaksanakan dengan cara membuka larangan secara bersama-sama masyarakat untuk kepentingan bersama dan hasilnya selain untuk masyarakat juga sebahagian untuk KAS Nagari. Biasanya Banda Larangan ini dibuka sekali setahun atau sekali dua tahun tergantung kesepakatan Para Pemangku Adat.

- Tabek Larangan (tebat larangan)

Yaitu Kolam air yang dibuat secara bersama oleh masyarakat pada zaman dulu dengan tujuan untuk persediaan air bagi kepentingan masyarakat dan didalam Tabek tersebut juga dipelihara berbagai jenis ikan, saat untuk membuka Tabek Larangan tersebut sama dengan seperti di Banda Larangan.

- Mamutiah durian (memutih durian)

Yaitu kegiatan menguliti pohon durian apabila kedatangan salah seorang warga masyarakat pemilik pohon durian yang memanjat dan memetik buah durian sebelum durian itu matang, hal itu dilakukan sebagai sanksi moral bagi masyarakat yang melakukannya karena dipandang tidak mempunyai rasa sosial antar sesama. Setelah pohon Durian dikuliti maka secara berangsur pohon itu akan mati. Biasanya pemilik pohon durian akan mendapatkan hasil semenjak

matahari terbit sampai terbenam, sedangkan disaat malam hari buah durian yang jatuh telah menjadi milik bersama.

- Parak

yaitu suatu lahan tempat masyarakat berusaha tani dimana terdapat keberagaman jenis tanaman yang dapat dipanen sepanjang waktu secara bergiliran, sehingga pada lahan parak ini terdapat nilai ekonomi yang berkelanjutan. Apabila dilihat dari jauh, parak di pandang seolah-olah seperti hutan dan juga berfungsi sebagai penyangga bagi daerah dibawahnya

f. Kearifan lokal masyarakat Desa Ciomas, Jawa Barat

Masyarakat di Desa ini memiliki satu kearifan lokal warisan nenek moyang mereka mengenai pelestarian lingkungan yang sampai saat ini masih dengan teguh mereka jaga. Salah satunya adalah dengan masih menetapkannya Leuweung Larangan (hutan larangan) di kawasan Gunung Sawal sebagai tempat yang harus betul-betul dijaga kelestariannya.

Di samping itu, ada pula beberapa tahapan dalam adat masyarakat Ciomas yang mengedepankan pola-pola sistematis dan bertahap dalam hal pelestarian hutan di lingkungan mereka. Tahapan adat itu terbagi dalam tiga tahap yang begitu sistematis dan penuh perhitungan.

Inilah tahap-tahap dalam adat Masyarakat Ciomas dalam hal menjaga lingkungan hutan agar tetap lestari:

- Kabarataan

Kabarataan adalah sebuah adat yang mengedepankan pada analisis yang mendalam terhadap kerusakan-kerusakan hutan yang terdapat dalam tata wilayah mereka. Dalam adat Kabarataan ini meliputi menghitung berbagai kerusakan hutan, menetapkan waktu pemulihan kerusakan tersebut (Tata Wayah) dan juga rancangan kerja tentang apa-apa saja yang harus dilakukan untuk memulihkan

kerusakan (Tata Lampah). Tidak hanya itu, dalam adat Kabarataan ini juga diadakan upacara penanaman pohon panayogian atau penanda yang disebut dengan nama Ki Pasang, mengingat pohon yang di tanam adalah dua jenis pohon yang sama dan berdampingan. Dalam prosesi adat menanam pohon panayogian biasanya dilakukan pada akhir menjelang rangkaian adat Kabarataan berakhir. Yang membuat saya terkesan adalah, untuk pohon yang di tanam dalam Panayogian ini masyarakat adat mewajibkan untuk hanya menanam jenis pohon yang tumbuh di wilayah itu dan sama sekali tidak dibolehkan untuk menanam pohon yang berasal dari luar daerah tersebut. Hal itu tentu saja dilakukan bukan dengan tanpa alasan sama sekali.

Tujuan utama dari penanaman pohon yang harus dari wilayah tersebut dengan perhitungan bahwa adaftasi sebuah tanaman dengan tanah dan lingkungan baru adakalanya memakan proses yang tidak selamanya berjalan mulus. Jika pohon yang ditanam merupakan tanaman asli dari wilayah tersebut maka diharapkan proses adaptasi dan pertumbuhan dari sang pohon yang baru di tanam bisa lebih mudah dilalui

- Kadewaan

Untuk tahapan berikutnya setelah prosesi adat Kabarataan berakhir maka dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yakni melaksanakan adat Kadewaan. Kadewaan sendiri pada prinsipnya adalah awal dimulainya proses pemulihan hutan dan lingkungan termasuk mata air, sungai, dan aneka tumbuhan di sekitar wilayah tersebut yang pada saat adat Kabarataan dianggap sudah waktunya dipulihkan dari kerusakan-kerusakan. Maka, jika dalam adat Kabarataan adalah berupa analisis yang mendalam untuk mendeteksi kerusakan-kerusakan lingkungan berikut dengan pola-pola apa saja yang akan diambil dalam upaya penyembuhan lingkungan yang rusak tersebut, maka dalam adat Kadewaan ini adalah upaya pelaksanaan dari pemulihan itu sendiri. Dalam Kadewaan ini, masyarakat diwajibkan untuk menanam pohon di tempat-tempat yang dianggap telah rusak. Dan seperti pada adat Kabarataan, pohon-pohon yang

ditanam di sini pun harus berasal dari jenis pohon yang ada di wilayah tersebut.

- Karatuan

Untuk tahapan terakhir dari rangkaian adat ini adalah pelaksanaan adat karatuan. Adat Karatuan adalah sebuah proses berkesinambungan antara terus memulihkan lingkungan dan juga menjaga keberlangsungan pemulihan itu sendiri hingga tercapai sebuah tata lingkungan yang benar-benar subur, bersahabat dan tentu saja bisa diambil manfaatnya oleh penduduk setempat. Maka dari itu, dalam adat karatuan ini sifatnya jangka panjang dan oleh karenanya waktu yang ditetapkan pun adakalanya hingga ratusan tahun.

- g. Kearifan lokal masyarakat Krui-Lampung Barat

Repong Damar atau hutan damar, merupakan model pengelolaan lahan bekas lading dalam bentuk wanatani yang dikembangkan oleh masyarakat Krui di Lampung Barat, yaitu menanam lahan bekas lading dengan berbagai jenis tanaman, antara lain damar, kopi, karet, durian.

- h. Kearifan lokal masyarakat Orang Rimba-Jambi

Hompongan merupakan hutan belukar yang melingkupi kawasan inti pemukiman Orang Rimba (di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi) yang sengaja dijaga keberadaannya yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dari gangguan pihak luar.

- i. Kearifan lokal masyarakat Dayak Iban-Kalimantan Barat

Tembawai merupakan hutan rakyat yang dikembangkan oleh masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat, yang didalamnya terdapat tanaman produktif, seperti durian.

- j. Kearifan lokal masyarakat Maluku

Sasi merupakan aturan adat yang menjadi pedoman setiap warga masyarakat Maluku dalam mengelola lingkungan termasuk pedoman pemanfaatan sumber daya alam.

k. Kearifan lokal masyarakat Maluku

Mamancing Ikan merupakan aturan adat yaitu larangan atau boboso. Pamali Mamancing Ikab ini secara yurisdiksi terbatas pada nilai-nilai adat, dan agama, tetapi konsep property right ini terbentuk dari pranata sosial masyarakat yang telah berlangsung sejak lama dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

l. Kearifan lokal masyarakat Dayak Benuaq-Kalimantan Timur

Simpuk Munan atau lembo bangkak merupakan hutan tanaman buah-buahan (agroforestry) yang dikembangkan oleh masyarakat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur.

m. Kearifan lokal masyarakat To Bentong-Sulawesi Selatan

Koko dan tattakeng sebelum mengenal pertanian padi sawah, orang To Bentong mewariskan lahan bagi keturunannya berupa kebun (Koko) dan lading yang ditinggalkan (Tattakeng). Koko adalah lahan perladangan yang diolah secara berpindah, sedangkan Tattakeng adalah lahan bekas perladangan yang sedang diberakan.

n. Kearifan lokal masyarakat Minahasa-Sulawesi Utara

Mapalus pada masyarakat Minahasa, merupakan pranata tolong menolong yang melandasi setiap kegiatan sehari-hari orang Minahasa, baik dalam kegiatan pertanian, yang berhubungan dengan sekitar rumah tangga, maupun untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

o. Kearifan lokal masyarakat Bolaang Mongondow-Sulawesi Selatan

Moposad dan Moduduran merupakan pranata tolong menolong yang penting untuk menjaga keserasian lingkungan sosial.

p. Kearifan lokal masyarakat Banjar – Kalimantan Selatan

Kapamalian merupakan aturan-aturan (pantangan) dalam pengelolaan lingkungan, misalnya larangan membuka hutan keramat.

q. Kearifan lokal masyarakat Sumba Timur- Nusa Tenggara Timur

Gugus hutan yang disebut Pahomba, terlarang keras untuk dimasuki apalagi untuk diambil hasil hutanya. Pada hakekatnya pohon-pohon di setiap pahomba itu berfungsi sebagai pohon-pohon induk yang dapat menyebarkan benih ke padang-padang rumput yang relatif luas. Karena itu, jika api tidak menghangus matikan anakan pepohonan itu, proses perluasan hutan secara alamiah dapat berlangsung. Pepohonan di pahomba disekitar batang sungai berfungsi sebagai riparian atau tumbuhan tepain sungai yang berfungsi sebagai filter terhadap materi erosi, dan sekaligus berfungsi sebagai sempadan alamiah sungai dan untuk pelestarian air sungai.

r. Kearifan lokal masyarakat Bali

Salah satu teknologi tradisional pemakaian air secara efisien dalam pertanian dilakukan dengan cara Subak. Lewat saluran pengairan yang ada pembagian aliran berdasarkan luas areal sawah dan masa pertumbuhan padi dilakukan dengan menggunakan alat bagi yang terdiri dari batang pohon kelapa atau kayu tahan air lainnya. Kayu ini dibentuk sedemikian rupa dengan cekukan atau pahatan dengan kedalaman berbeda sehingga debit air yang mengalir di satu bagian berbeda dengan debit air yang mengalir di bagian lainnya. Kayu pembagi air ini dapat dipindah-pindah dan dipasang diselokan sesuai dengan keperluan, yang pengaturannya ditentukan oleh Kelihan Yeh atau petugas pengatur pembagian air.

s. Kearifan lokal masyarakat Bali

Tri Hita Karana, suatu konsep yang ada dalam kebudayaan Hindu-Bali yang berintikan keharmonisan hubungan antara Manusia-Tuhan, manusia-manusia, dan manusia-alam merupakan tiga penyebab kesejahteraan jasmani dan rohani. Ini berarti bahwa nilai keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu kearifan ekologi pada masyarakat dan kebudayaan Bali.

t. Kearifan lokal masyarakat Desa Gasang-Jawa Timur

Bersih Deso (bersih desa) adalah suatu acara adat dan sekaligus tradisi pelestarian lingkungan yang masih dilaksanakan masyarakat Desa Gasang sampai sekarang. Dilakukan setiap tahun pada bulan Jawa Selo (Longkang) dipilih dari hari Jumat Pahing. Masyarakat secara berkelompok membersihkan lingkungan masing-masing seperti jalan, selokan umum dan sungai. Setelah selesai melaksanakan bersih deso secara berkelompok mereka menyelenggarakan upacara semacam “sedekah bumi” dengan sajian satu buah buceng besar, satu buceng kecil, sayur tanpa bumbu lombok tanpa daging, berbagai macam hasil bumi yang biasa disebut “pala kependhem” dan “pala gumantung”.

u. Kearifan lokal masyarakat Desa Bendosewu-Jawa Timur

Tradisi bersih desa di Desa Bendosewu dikenal dengan wewaler yang merupakan pesan dari leluhur yang babad desa. Isi pesan adalah “jika desa sudah rejo (damai, sejahtera) maka hendaknya setiap tahun diadakan upacara bersih desa.” Tradisi bersih desa disertai kegiatan kebersihan lingkungan secara serentak, yaitu membersihkan jalan-jalan, rumah-rumah, pekarangan, tempat-tempat ibadah, makam dan sebagainya. Kegiatan ini disebut pula dengan “tata gelar” atau hal yang sifatnya lahiriah. Hal yang berkaitan dengan “tata gelar” dalam bersih desa bagi masyarakat Bendosewu sudah menjadi bagian hidupnya, sehingga tidak perlu diperintah lagi.

v. Kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Sirnaresmi-Jawa Barat

Seren Taun memiliki banyak arti bagi masyarakat kasepuhan diantaranya adalah puncak prosesi ritual pertanian yang bermakna hubungan manusia, alam, dan pencipta-Nya. Seren Taun adalah perayaan adat pertanian kasepuhan sebagai ungkapan rasa syukur setelah mengolah lahan pertanian sengan segala hambatan dan perjuangannya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Seren Taun adalah pesta masyarakat adat Kasepuhan sebagai ungkapan rasa gembira ketika panen datang. Seren Taun juga merupakan pertunjukan kesenian-kesenian tradisional yang ada di masyarakat Kasepuhan. Adat istiadat yang berlaku di dalam Kasepuhan ini mengatur pola kehidupan masyarakat dalam berhubungan dengan sang pencipta (Hablum minallah), hubungan antar manusia (Hablum minan naas) dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya (Hablum minal alam).

w. Kearifan lokal masyarakat Kampung Dukuh-Jawa Barat

Bentuk kearifan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang dikembangkan masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan diwujudkan dalam penataan ruang hutan, pelestarian dan pengelolaan air, pengelolaan lahan dengan pengembangan talun. Selain itu juga diwujudkan dalam pengetahuan tradisional tentang berbagai jenis sumber daya alam, seperti padi varitas lokal. Nilai yang menekankan pentingnya melestarikan lingkungan itu dikuatkan lewat berbagai upacara tradisional, mitos dan tabu. Menurut warga Kasepuhan, hutan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu: Leuweung Kolot atau Leuweung Geledegan atau hutan tua, yaitu hutan yang masih lebat ditumbuhi berbagai jenis pohon dengan kerapatan yang tinggi, dan masih banyak ditemukan binatang liar hidup di dalamnya. Hutan ini masih ada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Leuweung Titipan atau hutan keramat. Hutan ini tidak boleh dimasuki apalagi dieksploitasi oleh siapa pun, kecuali ada izin dari

Abah Anom. Hutan ini akan dimasuki apabila Abah Anom menerima wangsit atau ilapat dari nenek moyang yang memerlukan sesuatu dari kawasan gunung tersebut. Kawasan hutan keramat adalah kawasan Gunung Ciwitali dan Gunung Girang Cibareno; Leuweung Sampalan atau Leuweung bukaan, yaitu hutan yang dapat digunakan dan dieksploitasi serta dibuka oleh warga Kasepuhan. Di sini warga boleh membuka lading, kebun sawah, menggembala ternak, mengambil kayu bakar dan hasil hutan lainnya yang ada. Yang termasuk lahan bukaan adalah lahan di sekitar tempat pemukiman penduduk. Bekas lahan lading ataupun sawah yang sudah dipanen lalu ditanami dengan tanaman musiman dan tanaman keras sehingga membentuk hutan buatan disebut Talun. Tanaman buah-buahan sering digunakan seperti duren, rambutan, atau tanaman lainnya seperti petai, cengkeh, dan sebagainya. Setelan Talun ditanami biasanya akan ditinggal begitu saja. Artinya pemeliharannya tidak begitu intrinsif dibanding dengan kebun.

x. Kearifan lokal masyarakat Lampung

Piil Pasenggiri merupakan falsafah hidup atau pedoman dalam bertindak bagi setiap warga masyarakat Lampung, yakni: menemui muimah (ramah lingkungan), nengah nyappur (keseimbangan lingkungan), sakai sambayan (pemanfaatan lingkungan), dan juluk adek (pertumbuhan lingkungan).

y. Kearifan lokal masyarakat Lahat – Sumatera Selatan)

Undang-Undang Simbur Cahaya yang sebagian substansinya mengatur tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

z. Kearifan lokal masyarakat Sumatra Selatan

Pengetahuan Ke-Kean adalah perhitungan waktu yang tepat untuk menanam jenis tanaman tertentu yang dikaitkan dengan ilmu perbintangan.

K. Gotong Royong Dalam Perspektif Kearifan Lokal

Metode gotong royong merupakan salah satu alternatif pilihan yang dapat dijalankan dalam rangka upaya meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di pedalaman. Kesulitan bersama akan akses pendidikan sudah seharusnya dijawab dengan kekompakan dan persatuan masyarakat, yakni pembangunan pendidikan berbasis swadaya masyarakat sehingga tercipta suatu lembaga pendidikan di masyarakat setempat. Metode gotong royong sebagaimana tersebut merupakan suatu kerja yang dilakukan secara bersama-sama dengan tertata dan teratur, semua anggota masyarakat berdiri pada kewajiban yang sama untuk tujuan bersama.

Metode gotong royong sendiri sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. keberadaan gotong royong tidak dapat dilepaskan akan adanya persamaan keperluan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan secara individualis.

Segala sesuatunya dikerjakan dengan mengandalkan kebersamaan, persatuan dan tentunya semua itu diwujudkan dalam bentuk gotong royong. Kegiatan bergotong royong sebenarnya sudah menjadi tradisi disemua daerah di Indonesia. Kegiatan ini sudah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan bergotong royong. Hal ini sebagaimana kata pepatah yang mengatakan berat sama diangkat, ringan sama dijinjing. Artinya masalah seberat apapun itu tentu saja dapat diselesaikan dengan bersama-sama dan akan terasa lebih ringan. Berbanding terbalik bila segala sesuatu dijalankan dengan secara individualisme.

Sebagaimana analogi yang penulis gambarkan sebagai berikut, misalkan ibarat menyapu dengan sebatang lidi, tentu akan berbeda hasilnya bila dilakukan dengan seikat lidi. Sebatang lidi tidak akan mampu menyelesaikan apapun melainkan hanya sedikit dari potensinya, tetapi dengan seikat lidi ia akan lebih berguna untuk kepentingan yang lebih urgen lagi.

Menurut kamus bahasa Indonesia (2008: 498): gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu membantu). Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu kebersamaan, persatuan dan saling membantu merupakan kebutuhan manusia untuk tetap eksis.

Mengingat pentingnya gotong royong dalam masyarakat, Gurniwan Kamil (1987) menjelaskan secara eksplisit bahwa : Gotong royong sudah tidak dapat dipungkiri lagi sebagai ciri bangsa Indonesia yang turun temurun, sehingga keberadaannya harus dipertahankan. Pola seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap warga yang terlibat di dalamnya memiliki hak untuk dibantu dan berkewajiban untuk membantu, dengan kata lain di dalamnya terdapat azas timbal balik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kelompoknya. Dalam konteks kewajiban, setiap anggota masyarakat Memiliki kewajiban untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu atau terlibat dalam suatu pekerjaan baik untuk kepentingan umum (bersama) maupun saling membantu diantara anggota masyarakat. Setelah turut serta mengerjakan kewajiban barulah memiliki hak untuk diperhatikan, dibantu berdasarkan ketentuan gotong royong yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Rochmadi (2012) menjelaskan bahwa: Gotong royong adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku gotong royong bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Pola hidup yang seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Implementasi nilai dan perilaku gotong royong pada masyarakat Indonesia merupakan bagian esensial dari revitalisasi nilai sosio budaya dan adat istiadat pada masyarakat yang memiliki budaya beragam agar terbebas dari dominasi sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta ideologi lain yang tidak mensejahterahkan

BAB 5

TANTANGAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH PELOSOK/PEDALAMAN

A. Tantangan Pelayanan Publik 2021

Inti dari seluruh proses pemerintahan itu adalah pelayanan publik. Entah berupa jasa publik, barang publik hingga layanan administratif. Semua itu menjadi tanda dari hadirnya negara (*state in practice*) dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan demikian bertolak dari dua rasionalitas. Pertama, pelayanan publik itu politik, soal relasi rakyat sebagai warga dengan pemerintah. Pihak pertama memberikan mandat (suara dalam pemilu, pajak dalam ekonomi); pihak kedua mengonversi mandat itu ke dalam akuntabilitas kinerja. Relasi mandat dan akuntabilitas terlihat nyata pada pemenuhan layanan negara pada warga.

Kedua, pelayanan publik, terutama skala dasar, adalah hak konstitusional warga bagi kualitas keberlangsungan hidup secara individual dan sosial. Begitu fundamentalnya, negara tak saja berkewajiban tetapi juga bisa ditagih dan bahkan digugat tanggung jawab dalam pemenuhannya.

Bagaimana realisasinya di Indonesia, khususnya di daerah sebagai garda depan pelayanan publik? Pengalaman 2020 memberikan sketsa jawaban. Dan, sebagian kelemahan/kegagalan niscaya berulang kita alami pada 2021 jika unjuk kerja birokrasi tak berubah secara mendasar. Cara kita merespons akan jadi batu uji lantaran konteks tantangan strategis masih sama, bahkan pada 2021 bertambah satu lagi yang diyakini secara signifikan menghadirkan lingkungan persoalan baru. Apa tantangan-tantangan krusial ke depan dan antisipasi yang diperlukan sebagai implikasi dari pilihan kebijakan yang kita ambil?

B. Tiga tantangan

Konteks lingkungan pertama yang amat memengaruhi ekosistem dan tata kelola layanan publik tahun ini adalah lanjutan dan pendalaman dari dampak struktural pandemi Covid-19. Kita tahu,

pagebluk ini sungguh telah menguji ketangguhan atau kerapuhan sistem kesehatan, governabilitas sektor publik, fundamen ekonomi dan modal sosial yang ada. Kita lulus bersyarat dalam ujian solidaritas kewargaan dan kapabilitas sosial, namun keteteran dalam ujian ekonomi dan kinerja pemerintahan, serta bagai membuka kotak pandora ketika ujian yang sama kita lakukan atas sistem layanan kesehatan.

Selain faktor kepemimpinan dan strategi komunikasi yang sudah disorot banyak pihak, cara kita merespons juga erat terkait dasar kewenangan penanganan pandemi, dukungan dan ruang fiskal, hingga kapasitas pelaksanaan di lapangan. Status bencana nasional membuat otoritas pemda terbatas dan tak leluasa lantaran harus menunggu delegasi (penugasan) pusat. Ketika pola respons pandemi makin berbasis lokal bahkan komunitas, delegasi mestinya dibarengi dosis desentralisasi.

Pemda yang biasa bekerja leluasa-mandiri (otonom) tampak gagap melangkah ketika delegasi itu mengalir dalam wujud perintah realokasi anggaran, *refocusing* program, hingga realisasi kegiatan. Pada sisi lain, prakondisi dasar seperti kerangka kebijakan hingga satuan data terpadu tidak lekas tersedia ketika layanan esensial berupa jaring pengaman atau bantuan sosial hendak diberikan sebagai bantalan bagi warga terdampak pandemi. Hari ini, kebijakan nasional sudah relatif solid, namun basis data belum benar-benar “duduk”.

Untuk distribusi bantuan sosial (bansos), tak cukup mengubah bentuk natura ke tunai tetapi juga mesti mengeliminasi maladministrasi dan mengintegrasikan data Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga bansos daerah/desa. Bahkan reintegrasi dan soliditas data bisa menjadi awal bagi penyatuan skema bantuan jamak-fragmentatif ke skema tunggal-terkonsolidasi.

Kedua, tantangan baru datang dari pemberlakuan *Omnibus Law* Cipta Kerja yang telah disahkan akhir 2020 tahun lalu lewat UU No 11 Tahun 2020. Beleid ini memang masih menjadi “kitab terbuka” lantaran belum ada respon tunggal atas keberadaannya. Sebagian

elemen masyarakat menempuh jalur yudisial (uji formil dan/atau uji materil) ke Mahkamah Konstitusi. Sebagian lain mendesak ditempuhnya jalur legislatif berupa revisi parsial atas teknis *legal-drafting* dan materi muatan.

Pada sisi lain, pemerintah memilih berfokus menyusun 44 regulasi turunan, baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Beberapa waktu ke depan kita akan menyaksikan bagaimana semua itu berproses dan ke mana ujung akhirnya. Terlepas dari berbagai langkah ini, sudah pasti bahwa UU tersebut akan masuk ke fase pelaksanaan. Persiapan operasional dan strategi implementasi menjadi krusial dalam mengantisipasi eksekusi perubahan maupun mengeksekusi arah baru kebijakan. Selain tata perizinan dan segala aspek di hulu yang mewarnai diskursus kebijakan, soal tata kelola layanan usaha dan pengawasan atas pemenuhannya mesti menjadi bagian dari rencana besar guna dipersiapkan sejak sekarang.

Transformasi perizinan berbasis risiko, misalnya, mensyaratkan cara kerja baru dan perubahan pola relasi pusat dengan daerah maupun pemerintah dengan warga dalam layanan birokrasi ke depan. Pada sisi lain, relaksasi pada ranah hulu (perizinan) menuntut efektivitas ranah hilir (pengawasan). Ketika legalitas usaha tak lagi semuanya berbasis izin tetapi standar dan registrasi, potensi konflik di masyarakat menjadi terbuka. Pada sisi lain, mekanisme keberatan berjenjang mungkin tak banyak ditempuh lantaran pemda tutup mata atas masalah usaha yang izinnnya diberikan pusat.

Peran Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik harus kian kuat guna merespons “lompatan” pengaduan masyarakat maupun imbas bergesernya rezim pidana ke sanksi administrasi atas kisruh perizinan. Ketiga, internal pemerintahan juga menyimpan dinamika tersendiri. Dua situasi yang patut disebut adalah agenda reformasi birokrasi dan kepemimpinan baru di daerah (pilkada). Reformasi birokrasi jelas imperatif. Namun, musim puncak reformasi (pemangkasan eselon, penyetaraan jabatan) terjadi pada 2020-2021 ketika momentumnya justru menghendaki “kapal” yang stabil. Tentu tak boleh surut, namun mesti diperkuat orkestrasi dan

kepemimpinan perubahan dalam mengelola agenda makro, meso dan mikro sektor publik.

Pada level daerah, hasil pilkada memunculkan sejumlah kemenangan para penantang atau pendatang baru. Energi segar diharapkan bertuah bagi pemulihan ekonomi, pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Namun, tak ada masa berbulan madu, mereka mesti lekas menguasai arena (politik dan birokrasi), membuang jauh-jauh niat balas dendam atau balas budi dalam pengisian jabatan, apalagi membancak program layanan warga sebagai ladang berburu rente dan korupsi.

Di masa krisis, ujian kepemimpinan persis terletak pada kemampuan untuk membangun moral kerja tim, merajut kolaborasi dan inovasi, bermental sebagai pelayan rakyat. Tidak gampang, namun demi itu semualah rakyat telah berani bertaruh nyawa hadir di bilik-bilik suara 9 Desember 2020 lalu.

C. Tantangan 2021

Ekosistem pelayanan publik dan cara pemerintah merespons permintaan layanan dari warga memang tidak lagi sama seperti masa manapun dalam sejarah sektor publik kita. Birokrasi sendiri mesti bertransformasi menjadi *learning organization*, para kepala daerah wajib membangun diri sebagai pemimpin perubahan. Kepada mereka nasib warga dalam mengakses perlindungan dan pelayanan negara digantungkan.

Pusat berperan membingkai peran para garda depan itu melalui kebijakan solid, ruang yang kian otonom guna merangsang diskresi dan inovasi, serta pengawasan yang berorientasi preventif, protektif dan berbasis aturan main (sistem integritas) yang efektif. Saat masa pelik, negara tak boleh hadir biasa-biasa saja (*business as usual*) lantaran kesulitan hidup rakyat sungguh berkarakter lain. Krisis mestinya menjadi ruang lahirnya cara baru berpemerintahan. Kesengsaraan hidup jelas memburuk jika pemerintah alih-alih melayani tapi malah menjadi benalu perusak tubuh negara itu sendiri. Kala itu berulang terjadi, maka jika lanskap tata kelola 2020 dan 2021 dibuat relatif longgar demi lancarnya percepatan layanan dan penyerapan anggaran, tahun-tahun mendatang niscaya diisi berbagai tagihan akan tanggung gugat secara hukum dan administrasi. Kita sungguh tak menghendaki itu.

BAB 6

PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA

A. Perilaku Sosial

Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia (Rusli Ibrahim, 2001). Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan diantara satu orang dengan yang lainnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey (1982) dalam Rusli Ibrahim (2001), perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain (Baron & Byrne, 1991 dalam Rusli Ibrahim, 2001). Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung sendiri.

Sesungguhnya yang menjadi dasar dari uraian di atas adalah bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial (W.A. Gerungan, 1978:28). Sejak dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Pada perkembangan menuju kedewasaan, interaksi sosial diantara manusia dapat merealisasikan kehidupannya secara individual. Hal ini dikarenakan jika tidak ada timbal balik dari interaksi sosial maka

manusia tidak dapat merealisasikan potensi-potensinya sebagai sosok individu yang utuh sebagai hasil interaksi sosial. Potensi-potensi itu pada awalnya dapat diketahui dari perilaku kesehariannya. Pada saat bersosialisasi maka yang ditunjukkannya adalah perilaku sosial. Pembentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada aspek eksternal situasi sosial memegang peranan yang cukup penting. Situasi sosial diartikan sebagai tiap-tiap situasi di mana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain (W.A. Gerungan, 1978:77). Dengan kata lain setiap situasi yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dapatlah dikatakan sebagai situasi sosial. Contoh situasi sosial misalnya di lingkungan pasar, pada saat rapat, atau dalam lingkungan pembelajaran pendidikan jasmani.

B. Faktor-Faktor Pembentuk Perilaku Sosial

Baron dan Byrne berpendapat bahwa ada empat kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu :

- Perilaku dan karakteristik orang lain

Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Pada aspek ini guru memegang peranan penting sebagai sosok yang akan dapat mempengaruhi pembentukan perilaku sosial siswa karena ia akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu perbuatan.

- Proses kognitif

Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Misalnya seorang calon pelatih yang terus berpikir agar kelak dikemudian hari menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi atletnya dan orang lain akan terus berupaya dan berproses mengembangkan dan memperbaiki

dirinya dalam perilaku sosialnya. Contoh lain misalnya seorang siswa karena selalu memperoleh tantangan dan pengalaman sukses dalam pembelajaran penjas maka ia memiliki sikap positif terhadap aktivitas jasmani yang ditunjukkan oleh perilaku sosialnya yang akan mendukung teman-temannya untuk beraktivitas jasmani dengan benar.

- Faktor lingkungan

Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah keras pula, ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata.

- Latar Budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi

Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani yang terpenting adalah untuk saling menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap anak.

C. Bentuk dan Jenis Perilaku Sosial

Bentuk dan perilaku sosial seseorang dapat pula ditunjukkan oleh sikap sosialnya. Sikap menurut Akyas Azhari (2004:161) adalah “suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. Sedangkan sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap obyek sosial yang menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap salah satu obyek sosial (W.A. Gerungan, 1978:151-152).

Berbagai bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang pada dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seperti dalam kehidupan berkelompok, kecenderungan perilaku sosial seseorang yang menjadi anggota kelompok akan terlihat jelas

diantara anggota kelompok yang lainnya. Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antarpribadi, yaitu :

1. Kecenderungan Perilaku Peran

✓ Sifat pemberani dan pengecut secara sosial

Orang yang memiliki sifat pemberani secara sosial, biasanya dia suka mempertahankan dan membela haknya, tidak malu-malu atau tidak segan melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai norma di masyarakat dalam mengedepankan kepentingan diri sendiri sekuat tenaga. Sedangkan sifat pengecut menunjukkan perilaku atau keadaan sebaliknya, seperti kurang suka mempertahankan haknya, malu dan segan berbuat untuk mengedepankan kepentingannya.

✓ Sifat berkuasa dan sifat patuh

Orang yang memiliki sifat sok berkuasa dalam perilaku sosial biasanya ditunjukkan oleh perilaku seperti bertindak tegas, berorientasi kepada kekuatan, percaya diri, berkemauan keras, suka memberi perintah dan memimpin langsung. Sedangkan sifat yang patuh atau penyerah menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya, misalnya kurang tegas dalam bertindak, tidak suka memberi perintah dan tidak berorientasi kepada kekuatan dan kekerasan.

✓ Sifat inisiatif secara sosial dan pasif

Orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya suka mengorganisasi kelompok, tidak suka mempersoalkan latar belakang, suka memberi masukan atau saran-saran dalam berbagai pertemuan, dan biasanya suka mengambil alih kepemimpinan. Sedangkan sifat orang yang pasif secara sosial ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan dengan sifat orang yang aktif, misalnya perilakunya yang dominan diam, kurang berinisiatif, tidak suka memberi saran atau masukan.

✓ Sifat mandiri dan tergantung

Orang yang memiliki sifat mandiri biasanya membuat segala sesuatunya dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti membuat rencana sendiri, melakukan sesuatu dengan cara-cara sendiri, tidak suka berusaha mencari nasihat atau dukungan dari orang lain, dan secara emosional cukup stabil. Sedangkan sifat orang yang

ketergantungan cenderung menunjukkan perilaku sosial sebaliknya dari sifat orang mandiri, misalnya membuat rencana dan melakukan segala sesuatu harus selalu mendapat saran dan dukungan orang lain, dan keadaan emosionalnya relatif labil.

2. Kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial

- ✓ Dapat diterima atau ditolak oleh orang lain

Orang yang memiliki sifat dapat diterima oleh orang lain biasanya tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, loyal, dipercaya, pemaaf dan tulus menghargai kelebihan orang lain. Sementara sifat orang yang ditolak biasanya suka mencari kesalahan dan tidak mengakui kelebihan orang lain.

- ✓ Suka bergaul dan tidak suka bergaul

Orang yang suka bergaul biasanya memiliki hubungan sosial yang baik, senang bersama dengan yang lain dan senang bepergian. Sedangkan orang yang tidak suka bergaul menunjukkan sifat dan perilaku yang sebaliknya.

- ✓ Sifat ramah dan tidak ramah

Orang yang ramah biasanya periang, hangat, terbuka, mudah didekati orang, dan suka bersosialisasi. Sedangkan orang yang tidak ramah cenderung bersifat sebaliknya.

- ✓ Simpatik atau tidak simpatik

Orang yang memiliki sifat simpatik biasanya peduli terhadap perasaan dan keinginan orang lain, murah hati dan suka membela orang tertindas. Sedangkan orang yang tidak simpatik menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya.

3. Kecenderungan perilaku ekspresif

- a. Sifat suka bersaing (tidak kooperatif) dan tidak suka bersaing (suka bekerjasama)

Orang yang suka bersaing biasanya menganggap hubungan sosial sebagai perlombaan, lawan adalah saingan yang harus dikalahkan, memperkaya diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak suka bersaing menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya

- b. Sifat agresif dan tidak agresif

Orang yang agresif biasanya suka menyerang orang lain baik langsung ataupun tidak langsung, pendendam, menentang atau tidak patuh padapenguasa, suka bertengkar dan suka menyangkal. Sifat orang yang tidak agresif menunjukkan perilaku yang sebaliknya.

c. Sifat kalem atau tenang secara sosial

Orang yang kalem biasanya tidak nyaman jika berbeda dengan orang lain, mengalami kegugupan, malu, ragu-ragu, dan merasa terganggu jika ditonton orang.

d. Sifat suka pamer atau menonjolkan diri

Orang yang suka pamer biasanya berperilaku berlebihan, suka mencari pengakuan, berperilaku aneh untuk mencari perhatian orang lain.

D. Interaksi Sosial

Interaksi sosial ialah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan bersifat timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tidak saling berbicara atau menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi sebab masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan. Interaksi sosial antar kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Proses interaksi berlangsung karena adanya berbagai faktor, yaitu faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak secara sendiri-sendiri dalam keadaan terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Interaksi sosial pun terjadi apabila memenuhi syarat adanya kontak sosial dan komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial pun bermacam-macam, terbagi dua yaitu proses yang sifatnya asosiatif dan proses yang sifatnya disosiatif.

➤ Pengaruh Sosial dan Kontrol Personal

1. Teori-Teori Perilaku Sosial

a. Teori konformitas: Konformitas adalah Suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas (Sarwono, 2005) :

3. Besarnya kelompok
4. Banyaknya suara
5. Keterpaduan (kohesivitas)

➤ Contoh : remaja akan lebih mendengarkan mendengarkan perkataan teman sekelompoknya dibanding orang tuanya.

1. Status

Contoh : Model rambut tertentu pada selebriti akan lebih banyak diikuti orang lain dibanding orang biasa dengan model rambut yang sama.

2. Tanggapan umum

Contoh : seseorang akan lebih bebas menjawab dalam kuesioner jika tidak diberi nama.

3. Komitmen umum

Contoh : individu individu akan mengikuti mengikuti/bertingkah bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah ia katakan.

b. Teori kepatuhan: Kepatuhan merupakan suatu bentuk pengaruh sosial dimana seseorang hanya perlu memerintahkan satu orang lain atau lebih untuk melakukan satu atau beberapa tindakan.

c. Teori *learned helplessness*: menjelaskan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada tantangan hidup ada banyak orang yang menyerah atau gagal. *Learned helplessness* tersebut dapat menghilangkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa yang sulit, dan memberikan keyakinan bahwa segala usaha itu tidak berguna dalam menghadapi permasalahan (Stoltz, 2000). Menurut Stoltz (2000), *learned helplessness* (ketidakberdayaan yang dipelajari) berhubungan secara negatif dengan pemberdayaan diri. Individu yang tidak dapat diberdayakan secara optimal (individu yang mengalami *learned*

helplessness) tidak dapat mengaktualisasikan diri secara optimal pula. Oleh karena itu ketidakberdayaan yang dipelajari merupakan hambatan tetap bagi pemberdayaan (Stoltz, 2000). Meskipun begitu menurut Stoltz (2000), beberapa orang dapat saja kebal terhadap ketidakberdayaan. Berdasarkan penelitian Seligman (Stoltz, 2000) individu yang menjadi kebal terhadap ketidakberdayaan dan keputusan telah diajarkan sebelumnya tentang tindakan-tindakan “untuk terus berusaha” (imunisasi terhadap ketidakberdayaan dan keputusan), yang merupakan karakteristik seorang climber, yang dapat membentengi dari ketidakberdayaan dan keputusan.

d. Teori *self-fulfilling prophecy*: prediksi yang secara langsung atau tidak langsung membuatnya terwujud sendiri akibat umpan balik positif antara keyakinan dan kelakuan. Sebagai contoh, kalau kita memberikan optimisme kepada orang lain, kinerjanya akan melebihi kapasitas biasanya. Sementara kalau kita memberikan pesimisme, yang terjadi memang akan lebih buruk dari yang seharusnya.

➤ Perilaku Prosocial

Perilaku prososial didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau manfaat kepada individu atau sekelompok individu (Eisenberg, 1989). Dalam hal ini, perilaku prososial bertujuan untuk membantu meningkatkan *well being* orang lain. Meskipun tindakan prososial dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada orang lain, namun perilaku ini dilakukan dengan berbagai alasan. Misalnya, ingin mendapat keuntungan juga berupa imbalan, agar dapat diterima orang lain, sayang dengan seseorang, atau karena memang dengan tulus membantu.

Perilaku prososial ini sering disamakan dengan altruisme, padahal berbeda. Perilaku prososial mempunyai motif-motif tertentu di balik tindakannya. Di dalamnya terdapat altruisme yang merupakan tindakan sukarela yang dilakukan individu atau sekelompok orang untuk menolong orang lain dengan simpati tinggi tanpa

mengharapkan imbalan apapun. Jadi altruisme adalah salah satu motif spesifik dari perilaku prososial.

➤ Eissenberg dan Mussen (dalam Dayakisni, 2009) mengemukakan bahwa perilaku prososial mencakup pada tindakan sebagai berikut:

1. Membagi (*sharing*)

Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat merasakan sesuatu yang dimilikinya. Misalnya keahlian dan pengetahuan.

2. Kerjasama (*cooperative*)

Melakukan kegiatan bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, termasuk mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi.

3. Menyumbang (*donating*)

Memberikan secara materil kepada seseorang atau kelompok untuk kepentingan umum yang berdasarkan pada permintaan, kejadian dan kegiatan.

4. Menolong (*helping*)

Membantu orang lain secara fisik untuk mengurangi beban yang sedang dikerjakan.

5. Kejujuran (*honesty*)

Tindakan dan ucapan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

6. Kedermawanan (*generosity*)

Memberikan sesuatu (biasanya berupa uang dan barang) kepada orang lain atas dasar kesadaran diri.

7. Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain

Melakukan suatu hal untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan orang lain tanpa mengganggu dan melanggar hak dan kesejahteraan orang lain.

.

BAB 7

RAGAM PERSOALAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA DAN DI KOTA

➤ *Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa*

Desa memiliki hak otonomi, namun dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan terhadap hak dalam mengambil kebijakan/tindakan maupun keputusan tidak boleh bertentangan dengan regulasi. Otonomi diberikan karena negara kita memberi ruang untuk eksistensi budaya tradisional dan adat yang berlaku di desa

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pelaksanaan pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Maka desa dengan hak otonomi khusus bisa mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya termasuk terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif desa. Karena dengan pemberian hak otonomi tentu juga melekat kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak serta merta desa "seolah-olah" terlepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/provinsi maupun lembaga pengawas pemerintah lainnya.

Sama halnya dengan instansi pemerintah lain, maka pemerintah desa merupakan instansi penyelenggara layanan untuk masyarakat desa yang dalam pengelolaan layanan juga wajib

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

A. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkungnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Pengertian masing-masing lingkup secara eksplisit telah disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan barang publik meliputi pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana yang ada di desa dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD maupun APBDes. Adapun contoh untuk barang publik di desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna desa, sarana poskamling desa, bangunan perpustakaan desa dan lain sebagainya.

Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaanya menggunakan APBN dan/atau APBD maupun APBDes sebagian atau seluruhnya. Misalnya, pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat di wilayahnya.

Sedangkan pelayanan administratif adalah pelayanan pemerintah desa yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Adapun contohnya, surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang di tanda tangani dan diregister kepala desa hingga camat setempat, surat keterangan desa sebagai pengantar untuk persyaratan administrasi kependudukan, administrasi pelaporan penggunaan dana desa yang secara terbuka juga harus diumumkan pemerintah desa,

pembuatan surat keputusan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa dan lain-lain.

Terkhusus dalam pelayanan administratif, pemerintah desa memiliki peranan penting hampir untuk setiap sektor. Tidak saja kepengurusan adminduk yang memerlukan pengantar atau surat keterangan dari kantor desa bahkan sering ditemui untuk pengurusan dokumen perizinan, pengurusan administrasi pertanahan, pengurusan administrasi kesehatan dan pendidikan juga harus dilengkapi persyaratan tersebut.

B. Tantangan Pelayanan Publik di Desa

Sebagai instansi penyelenggaran layanan, tentu pemerintah desa juga harus bersiap diri. Maka pemerintah desa juga wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan, membuat maklumat pelayanan, menempatkan petugas/pelaksana layanan yang mumpuni atau berkompeten, menyediakan sarana/prasaran dan/atau fasilitas pelayanan publik, membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna layanan dan tentu saja juga harus memberika pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Tentu tidak mudah dalam sekejap memenuhi kewajiban tersebut. Dengan segala keterbatasan tentu akan banyak tantangannya, mulai dari *mindset* masyarakat yang cenderung konservatif, akses informasi yang masih terbatas, pengembangan kompetensi petugas kadang sulit dilakukan karena kondisi teknis dan lain-lain.

Maka dari itu perlu adaptasi yang cepat dan reformasi birokrasi komperehensif untuk bisa menundukkan tantangan tersebut. Dan peran kepala desa menjadi sangat vital untuk bisa mewujudkan pemerintah desa sebagai penyelenggara layanan yang visioner dan inovatif. Sebagai bentuk atensi maka pemerintah pusat menganggarkan pembiayaan berupa dana desa, melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang dari pemerintah daerah hingga kementerian, bahkan pemerintah daerah hingga pusat sering mengadakan lomba desa dengan beragam kategori dan pelabelan

sebagai pemantik setiap desa di Indonesia bisa menunjukkan eksistensi dan peranan penting dalam pembangunan bangsa.

Lalu, apa tantangan utama penyelenggaraan pelayanan publik pemdes? Dari banyak tantangan dan kendala maka berdasarkan pengalaman Ombudsman Babel dalam menangani laporan untuk wilayah desa, tantangan utamanya adalah kompetensi SDM pada pemerintah desa. Regulasi yang makin beragam dan perkembangan teknologi informasi menjadikan ekspektasi masyarakat desa terhadap pelayanan juga kian tinggi. Atas dasar inilah kemudian para petugas pelayanan di desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa yang terdiri dari kepala seksi dan kepala lingkungan hingga ketua RT juga wajib memahami tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dan memahami segala regulasi terkait terutama dalam hal pengambilan keputusan/tindakan maupun kebijakan di desa. Sebab jika tidak sesuai regulasi maka tidak saja pelayanan yang berpotensi maladministrasi namun bisa saja digugat hingga pengadilan.

➤ **Potret Permasalahan Pelayanan Publik di Desa**

Peran pemerintah desa sebagai instansi penyelenggara layanan sangat sentral maka harus pula diimbangi dengan pengembangan kompetensi para petugas layanannya. Para pengguna layanan juga akan terpenuhi hak-haknya untuk pelayanan berkualitas dengan adanya petugas yang berkompeten. Rasanya tidak mungkin kewajiban membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna layanan bisa dilakukan jika petugas layanan sendiri tidak tahu aturan terkait pelayanan publik.

Namun perlu juga dipahami bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan pun punya peran sebagai pengawas layanan. Bentuk peran masyarakat adalah dengan membuat laporan melalui kanal aduan internal penyelenggara yang tersedia atau melalui lembaga pengawas seperti Ombudsman. Maka dari itu, pemerintah desa juga diharapkan tidak memandang aduan masyarakat sebagai sesuatu yang buruk atau negatif dan hanya mengganggu. Justru dengan aduan tersebut maka kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bisa dilakukan.

Menurut data Ombudsman RI pada tahun 2020, permasalahan desa yang diadukan ke mencapai 286 aduan dan untuk sebaran di wilayah Babel ada sekitar 24 aduan yang masuk sampai tahap pemeriksaan, dengan instansi terlapor meliputi pemerintah desa dan BPD. Dari data juga terlihat bahwa laporan terkait pelayanan desa dalam tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Terhadap lingkup layanan yang dilaporkan didominasi lingkup layanan administratif.

Laporan yang sering disampaikan ke Ombudsman meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa (sekretaris desa, kepala seksi dan kepala dusun) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu ketua RT. Jenis permasalahan ini cenderung dilaporkan pasca pilkades selesai dilaksanakan dan bergantinya kepala desa. Sama halnya juga dengan pemilihan anggota BPD yang dilaporkan karena diduga proses pemilihannya tidak sesuai prosedur.

Untuk permasalahan lainnya yaitu, dugaan tidak memberikan layanan kepada masyarakat berupa permohonan informasi terkait proyek tertentu yang menggunakan dana desa, dugaan adanya konflik kepentingan pemerintah desa dan BPD terhadap masuknya investor ke desa dengan membuat kesepakatan tanpa musyawarah dengan masyarakat, dugaan permintaan imbalan berupa uang terhadap pelayanan surat pernyataan penguasaan fisik tanpa ada regulasi jelas yang mendasarinya, dugaan petugas yang tidak berkompeten terhadap pemberian penjelasan ke masyarakat terhadap produk layanan tertentu, dugaan penyalahgunaan wewenang aparat desa atau BPD terhadap pemberian suatu bantuan tertentu kepada masyarakat yang cenderung berpihak maupun diskriminatif, dugaan perbuatan tidak patut pejabat desa baik pada pemerintah desa maupun BPD dalam melayani masyarakat dan lain sebagainya.

Terhadap ragamnya laporan di wilayah Babel ada beberapa faktor yang kemudian membuat masyarakat desa merasa pelayanan di desa kurang maksimal, yaitu sering ditemukan bahwa belum utuhnya pemahaman penyelenggara layanan di desa terhadap regulasi yang

ada, merasa superior karena menjadi pejabat di desa sehingga pelaksanaan kewenangan tidak mempertimbangkan AUPB dan asas-asas penyelenggaraan layanan publik dan tidak dilakukan pengadministrasian yang baik terhadap proses pelayanan.

Perlu atensi khusus untuk meminimalisir maladministrasi pelayanan di desa. Tanggung jawab tersebut tidak saja melekat kepada pejabat desa sebagai petugas layanan. Namun optimalisasi peran pembinaan dari pemerintah kabupaten hingga pusat sangat penting untuk *mengupgrade* kompetensi para petugas layanan di desa. Tentu saja terhadap teknisnya harus tetap memperhatikan adat istiadat, kearifan lokal dan kondisi desa tersebut.

Dan perlu dijadikan catatan, semakin meningkatnya aduan layanan oleh masyarakat desa maka belum tentu pelayanan di desa juga buruk karena bisa jadi ini indikator bahwa masyarakatnya sudah mulai memahami bahwa peran aktif masyarakat sangat penting demi peningkatan layanan publik. Harapan kita tentu adalah bagaimana penyelenggaran pelayanan dan pengguna layanan di desa bisa sama-sama memahami tugas dan fungsinya sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Makin baik layanan di desa maka akan menunjukkan kualitas desanya. (MA)

BAB 8

GLOBALISASI DAN KEARIFAN LOKAL DI NEGARA BERKEMBANG

A. Defenisi Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam dekade belakangan ini sangat banyak diperbincangkan. Perbincangan tentang kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal dan dengan pengertian yang bervariasi.

Secara Etimologi Kearifan Lokal terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Lokal berarti setempat dan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Menurut rumusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Sistem pemenuhan kebutuhan mereka pasti meliputi seluruh unsur kehidupan, agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Pengertian lain namun senada tentang kearifan lokal juga diungkapkan oleh Zulkarnain dan Febriamansyah berupa prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan ditransformasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat. [3]

Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan

telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, pemertahanan adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.

B. Defenisi Globalisasi

Kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Dan Globalisasi juga merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata, sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

Salah satu ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia adalah Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh

perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam WTO (*World Trade Organization*).

Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial.

Sementara itu Erhard Eppler mengatakan bahwa globalisasi menyebabkan kekuasaan pemerintah terbatas. Gerakan modal global adalah kekuatan yang membatasi kekuasaan pemerintah untuk mengambil tindakan dan memaksanya untuk menganut suatu kebijakan yang tidak tercantum dalam manifesto setiap partai politik. gerakan modal global memaksa seluruh negara, tidak peduli siapa yang memerintah, untuk terlibat dalam suatu persaingan menarik penanaman modal ke dalam negari.

C. Macam-Macam Globalisasi

1. Globalisasi Perekonomian

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

- Globalisasi Produksi
- Globalisasi pembiayaan
- Globalisasi tenaga kerja
- Globalisasi jaringan informasi

■ Globalisasi Perdagangan

Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Dibawah ini ada beberapa kebijakan dan keburukan globalisasi ekonomi, diantaranya:

1. kebijakan globalisasi ekonomi
 - ✓ Produksi global dapat ditingkatkan
 - ✓ Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu Negara
 - ✓ Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri
 - ✓ Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih bai
 - ✓ Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi
2. keburukan globalisasi ekonomi
 - Menghambat pertumbuhan sektor industri
 - Memperburuk neraca pembayaran
 - Sektor keuangan semakin tidak stabil
 - memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka

panjang

➤ Globalisasi Kebudayaan

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan

seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau *world culture*) telah terlihat semenjak lama. Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

1. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
2. Penyebaran prinsip multikebudayaan (*multiculturalism*), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
3. Berkembangnya turisme dan pariwisata.
4. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
5. Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
6. Bertambah banyaknya event-event berskala global

D. Pengaruh Globalisasi terhadap Kearifan Lokal

Suatu kenyataan yang sudah dinikmati manusia di era globalisasi adalah kemakmuran, kemudahan dan kenyamanan. Namun demikian era yang serba mudah dan nyaman menimbulkan pengaruh positif dan juga hal negatif yang akan mengancam dan sulit untuk dihindari. Globalisasi menyebabkan segala aspek kehidupan terpenaruhi, misalnya sistem ekonomi, budaya dan lingkungan hidup manusia.

Era globalisasi dalam hal ini perkembangan teknologi dan informasi memberi andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan teknologi juga menjadi indikator kemajuan suatu

negara. Perkembangan ekonomi akan menjadi lebih cepat apabila didukung oleh faktor kemajuan teknologi. Teknologi merupakan langkah lanjut dari peranan, modal dan jasa untuk perkembangan ekonomi. Makin canggih teknologi berarti makin tinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Namun demikian kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak-dampak positif pada sistem ekonomi, dampak negatif juga muncul secara bersamaan. Hal ini juga dapat menjurus kepada pemborosan sumber daya alam, meningkatkan kriminalitas dan timbulnya berbagai masalah akibat semakin makmurnya dan sejahteranya ekonomi suatu negara, sementara di daerah atau negara lain.

Selain dampak terhadap perekonomian globalisasi juga berdampak terhadap sosial budaya masyarakat (kearifan lokal). Globalisasi telah mendorong terjadinya pergeseran atau perubahan terhadap sistem atau aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi memiliki andil yang sangat besar dalam menggiring remaja-remaja kita kearah dekandensi moral. Rusaknya mental dan akhlak remaja kita diakibatkan oleh gaya hidup yang kapitalis,materialistik dan individualistik. Selain itu menjamurnya situs-situs internet yang menyajikan gambar-gambar vulgar yang bisa diakses secara bebas semakin menambah deretan kerusakan remaja.

Hal tersebut di atas menyebabkan kearifan-kearifan yang berlaku dalam masyarakat mulai terkikis. Masyarakat memiliki adat yang dikenal sebagai ada kedaerahan (kerifan lokal) yang merupakan symbol kebangsaan, namun saat ini, hampir tidak lagi makna yang berarti di era globalisasi. Kita sulit memberikan batasan-batasan yang jelas antara budaya lokal dan budaya barat.

- Berikut dampak globalisasi terhadap kaarifan lokal:
- 1. Persegaran dan pergantian manusia;
- 2. Kebebasan terkekang;
- 3. Kepribadian terhimpit;

4. Obyektivitas manusia;
5. Mentalitas teknologi;
6. Krisis teknologi dan
7. Nilai etika dan moral ditinggalkan (bergeser).

E. Cara Meredam Pengaruh Globalisasi terhadap Kearifan Lokal

Dari uraian di halaman-halaman sebelumnya, maka jelas betapa besar pengaruh globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kearifan lokal. Olehnya itu, yang perlu kita pikirkan adalah cara-caya yang dapat dilakukan untuk meredam pengaruh globalisasi terhadap kearifan lokal:

1. Rehumanisasi

Mengembalikan martabat manusia di era globalisasi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan adaptasi populasi yang bersangkutan. Perkembangan nilai-nilai agama, etika, hukum, dan kebijakan lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan informasi dan teknologi. Olehnya itu masalah tersebut harus segera ditangani. Artinya lebih jauh manusia harus dipandang secara utuh baik lahir maupun batin, sehingga pembangunan selalu harus mengarah kepada terwujudnya peningkatan kesejahteraan manusia seutuhnya antara lahiriah dan batinia. Apabila ini tidak diperhatikan maka laju kehancuran peradaban manusia tidak akan dapat diimbangi oleh laju rehumanisasi oleh karena semuanya pihak harus mengambil bagian dan kontribusi positif.

2. Kemampuan Memilih

Dengan semakin banyaknya pilihan di era globalisasi, maka akibat yang timbul adalah kesulitan dalam memilih. Pendidikan pada umumnya diarahkan pada cara produksi bukan pada cara konsumsi. Ini menyebabkan nilai-nilai kearifan lokal terkikis dan berefek pada menurunnya antara yang mungkin dan yang terjadi, bahkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk sudah sangat susah untuk dibedakan.[8]

Segala yang teknis mungkin akan dikerjakan, tidak dipertentangkan dan disaring berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya yang didukung oleh aspek moral keagamaan, sosial, dan aspek-aspek yang terkait seharusnya menentukan apa yang mungkin diteliti dan dikembangkan kemudian tidak dilakukan jika tidak sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku.

3. Revitalisasi

Perlunya upaya positif untuk mencegah distorsi biokultural yang berkelanjutan. Pembuangan akan menuju ke suatu kebudayaan baru di masa depan, sehingga dipersiapkan persiapan-persiapan menyeluruh. Usaha-usaha revitalisasi akan banyak dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh faktor-faktor dalam maupun luar negeri.

BAB 9

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS MASYARAKAT

Otonomi daerah yang bermakna kewenangan daerah dalam hal pengelolaan rumahtangga daerahnya, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus diatur oleh pemerintah daerah dan DPRD. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah diharapkan mampu mengawal terselenggaranya otonomi daerah sejalan dan mengarah pada tercapainya tujuan pemberian otonomi tersebut.

Fokus utama kebijakan publik dalam Negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Wikipedia, 2008). Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi.

Dari perspektif masyarakat, hal penting dari pelayanan publik adalah adanya suatu standar pelayanan public yang jelas: *apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, dan bagaimana bentuk pelayanan itu.*

➤ Agar kebijakan tersebut terwujud secara efektif, maka diperlukan setidaknya 3 hal:

1. Adanya perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) sehingga produk keputusan dapat diketahui publik.
2. Struktur pelaksana dan pembiayaan yang jelas.
3. Kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan public mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak (Wikipedia, 2008).

Perubahan global ini telah mengubah lingkungan dimana pemerintahan beroperasi, menantang peran tradisional negara, dan memperkenalkan **aktor-aktor baru** pada proses pembangunan dan

kepemerintahan (*governance*). Transformasi global ini juga menuntut reformulasi peran dan tanggung jawab para pegawai negeri sebagai pengelola sumber-sumber publik dan penjaga mandat kepercayaan masyarakat. Eskalasi perubahan global ini juga telah menimbulkan isu-isu moral seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, *crony capitalism*, “*sweatheart deal*” *privatization*, dan perilaku pemerintah yang tidak profesional dan etis lainnya (UNDESA, 2000).

➤ ***Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik***

Sebagai bagian dari respon terhadap tantangan global di atas, telah terjadi pergeseran paradigma dalam pelayanan publik.

1. Dari *problems-based services* ke *rights-based services*. Pelayanan sosial yang dahulunya diberikan sekadar untuk merespon masalah atau kebutuhan masyarakat, kini diselenggarakan guna memenuhi hak-hak sosial masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional dan konvensi internasional.

2. Dari *rules-based approaches* ke *outcome-oriented approaches*. Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan yang berorientasi kepada hasil. Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi menjadi kata kunci yang semakin penting.

3. Dari *public management* ke *public governance*. Menurut Bovaird dan Loffler (2003), dalam konsep manajemen publik, masyarakat dianggap sebagai klien, pelanggan atau sekadar pengguna layanan sehingga merupakan bagian dari *market contract*. Sedangkan dalam konsep pemerintahan publik, masyarakat dipandang sebagai warga negara yang merupakan bagian dari *social contract*.

➤ **Ruang Lingkup (Menata) Pelayanan Publik**

Dasar:

1. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. UU No.31 Tahun 1999 j.o. UU No.20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK.
5. Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. SK Men PAN No:63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Pelayanan Publik.

Pelayanan publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/Kep/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Keputusan No. 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyatakan bahwa *“Hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”*.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publiknya bertanggung jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat. Pernyataan layanan prima perlu digarisbawahi karena ini menyangkut standar kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan publik haruslah berkategori “prima”. Karena pada dasarnya masyarakat adalah warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah. Dengan demikian kata “prima” ini haruslah menjadi misi yang akan menjiwai setiap unit layanan publik. Konsekuensinya, apabila kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dirasakan tidak prima, maka pada dasarnya penyedia layanan publik dianggap tidak mempunyai kinerja.

➤ Kata '*publik*' itu sendiri secara garis besar dapat digolongkan dalam dua bentuk:

1. Publik yang berada di wilayah ekstern, yaitu publik di luar lembaga, organisasi, instansi, perusahaan yang memiliki kepentingan dengan lembaga tersebut.
2. Publik yang berada di wilayah intern, yaitu publik yang berada dalam lingkungan suatu lembaga, organisasi, instansi atau perusahaan. Misalnya seluruh karyawan dalam lembaga tersebut adalah merupakan publik intern dari lembaga tersebut.

Ruang lingkup layanan publik meliputi segala aktivitas layanan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi dengan UU No. 11/2005, pada 28 Oktober 2005.

Terminologi layanan publik sekarang ini pun sudah mengalami perluasan makna. Manajemen pelayanan pada sektor publik umumnya dipahami sebagai keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan pemerintah yang secara operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan-badan hukum lain milik pemerintah (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik: 2007). Layanan publik dimaknai sebagai dua pengertian:

1. Pelayanan oleh negara kepada masyarakat, baik diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah maupun badan hukum lain milik pemerintah.
2. Pelayanan yang diberikan oleh swasta kepada masyarakat sebagai *customer*-nya.
3. Pengertian kedua ini seringkali tidak dikategorikan sebagai layanan publik, tetapi dimaknai sebagai layanan pada sektor swasta. Kepuasan masyarakat atau pengguna layanan publik akan berkorelasi positif dengan derajat pelayanan yang mereka peroleh. Suatu layanan akan dianggap bernilai jika konsumen merasakan kepuasan (Fitzsimmons dan Fitzsimmons: 2006). Tingkat kepuasan ini dipengaruhi oleh 5 variabel, yakni (1)

service quality (kualitas pelayanan), (2) *product quality* (kualitas produk), (3) *price* (harga), (4) *situation* (situasi), dan (5) *personality* (sikap personil pelayanan) (Subroto dan Natalisa: 2004).

Pada dimensi kualitas pelayanan persepsi konsumen terhadap pelayanan terkait dengan lima aspek yang spesifik yaitu: *reliability* (kemampuan dan keandalan dalam menyediakan layanan publik), *responsiveness* (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan layanan yang cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan masyarakat/pelanggan/konsumen), *assurance* (kemampuan, keramahan, dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat/ konsumen/pelanggan), *empathy* (sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan pelayanan), dan *tangible* (kualitas pelayanan yang terukur secara fisik berupa sarana perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi), dan lain-lain (Parasuraman. et al. dalam Zeithaml et al., 2006).

BAB 10

SINERGITAS PEMBANGUNAN DI BALUTAN

KEARIFAN LOKAL

A. Ancaman Ekologis dan Sosial Budaya Masyarakat Sumba ekapur Sirih

Pulau Sumba terletak di Barat-Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 96 KM di sebelah selatan pulau Flores 295 di sebelah barat daya pulau Timor dan 1.125 km di sebelah barat laut Darwin, Australia. Pulau Sumba berada pada busur luar kepulauan Nusa Tenggara Timur dan pada busur tersebut pulau Sumba terletak antara pulau Sumbawa dan Pulau Timor. Secara astronomis Sumba Timur membentang antara 119°45'-120° BT dan 9°16'-10°20' LS.

Luas Kabupaten Sumba Timur adalah 7000,5 km² atau 7000, 500 Ha, dengan bagian terbesar adalah daratan bagian Timur Pulau Sumba, dan empat pulau kecil yaitu Pulau Salura (03,50 km²), Pulau Mengkudu (0,2 km²), Pulau Kotak (01,00 km²), dan Pulau Nusa (0,55 km²). (*Sumber; pemda kab. Sumba Timur*).

Kabupaten Sumba Timur seperti daerah lainnya di NTT terus bergerak- berubah- berkembang dengan irama sendiri. Bumi belahan Timur marapu, Sumba Timur adalah fakta, adalah masalah, adalah harapan.

Sebagai fakta dan masalah, betapa perjalanan sangat panjang telah dilalui dengan berjuta kendala pembangunan. Sebagai harapan justru di tengah berjuta kendala pembangunan itulah berbagai kiat dan upaya maksimal terus dipacu demi Sumba Timur yang makmur-sejahtera, bahagia seperti dipaterikan baitan adatnya ; Matawai Amahu Pada Njara Hamu.

Baitan adat yang sangat filosofis sungguh mencambuk secara konstruktif, bagaimana karakter geografis jadi pijakan tuntutan. Betapa bumi air Sumba Timur itu sendiri menurut Dr. Robert Lawang adalah sumber energi sosial positif, seperti juga daerah lain di NTT.

Sumba Timur dengan sungai-sungainya, dengan perairan laut yang mengitari bagian utara selatan dan timur plus sejumlah pulau-

pulau kecilnya, dengan daratan yang berbukit – bergelombang atau daratan yang luas membentang adalah sumber energi sosial positif itu.

Pelajaran dari masa lalu, Catur Program Pembangunan Sumba Timur dengan pola pendekatan Humanis dituaskan sebagai kiat operasional fungsional, penajamannya dengan penjabarannya, dengan sangat memperhatikan kearifan lokal. Sumba Timur ternyata tidak hanya melekat dengan kebudayaan marapu yang begitu mengakar tetapi juga dengan ramuan-menu kebudayaan dari luar/seberang seperti Arab, Cina, Jawa, Bima, Sabu, Ende/Flores. Sumba Timur telah terbuka sudah sejak dahulu kala dan akan terus terbuka, semakin menganga-melebar dan menantang. Sejarah pembangunan Sumba Timur tidak lagi dalam balutan budaya dan filosofi “*Matawai Amahu Pada Njara Hamu*”, catatan punulis kali ini coba melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana penataan pembangunan Sumba Timur berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal yang semakin tergerus arus perkembangan teknologi.

Fakta dan masalah seperti pada catatan di atas menunjukkan bahwa pemimpin terdahulu sudah jauh memikirkan bagaimana membangun Sumba Timur dengan pendekatan berbasis humanis-kearifan lokal. Namun, fakta hari ini jauh keluar dari jalan menuju Matawai Amahu Pada Njara Hamu.

Semaraknya peternakan yang menjadi karakter Sumba Timur tidak lagi dirasakan hingga generasi saat ini, bagaimanapun sejarah Sumba Timur dalam dunia perternakan dahulu kala mendapat pujian yang luar biasa. Masih teringat ketika orang-orang Sumba dulu menyebut nama rerumputan di padang sabana mereka dengan sebutan khas seperti *Mapoe mbelar pingi*, *Mapoe rara*, *Mapoe bara*, *Roemba mini*, *Mapoe pendji*, *Kamala litap* dan masih banyak lagi sebutan budayanya.

B. Padang penggembalaan Ternak (Hilang) Vs Perkebunan Tebu (Hadir)

Sebagai bumi peternakan, Sumba Timur mempunyai lahan penggembalaan yang sangat karakteristik, Sumba Timur adalah daerah padang penggembalaan yang membukit-mengelombang

dengan hamparan daratan di berbagai tempat. Sejauh-jauh mata memandang. Sumba Timur memiliki luas padang penggembalaan 215.797 Ha yang dialiri sekitar 88 buah sungai utama. Tanah tandus 12.521 Ha, semak/padang/alang 592,152,14 Ha. Yang lainnya hutan 66.199,86 Ha, Kebun 21.391, 76 Ha, sawah 2.982,74 Ha dan desa/kota 4.796, 5 Ha. Dan memiliki 33 jenis rumput yang sangat berguna bagi ternak. (Sumber : Dinas Peternakan Kab. Sumba Timur, 2002)

Dalam beberapa tahun terakhir sektor peternakan di kabupaten Sumba Timur semakin berkurang. Banyak faktor yang mempengaruhi sektor ini salah satunya akibat adanya alih fungsi lahan padang penggembalaan ternak menjadi ladang perkebunan tebu yang sampai saat ini masih terus dipertanyakan kehadirannya oleh masyarakat Sumba Timur.

Dalam pengamatan penulis ruang wilayah kelola rakyat hari ini semakin sempit akibat adanya alih fungsi lahan oleh PT. MSM. Dahulunya padang difungsikan sebagai tempat penggembalaan ternak kini tidak lagi bisa diakses secara baik oleh peternak. Belum lagi persoalan daya dukung lingkungan yang tentu saja mengalami dampak dari alih fungsi lahan tersebut.

➤ **Potret Buruh Perkebunan Tebu**

Dembi Tamar (45) seorang perempuan yang berprofesi sebagai buruh harian lepas perkebunan tebu PT. Muria Sumba Manis di Desa Matawai Maringu, Kabupaten Sumba Timur adalah potret nyata betapa ironisnya kehidupan buruh yang hak-haknya diabaikan oleh perusahaan. (Baca; *“Bau Amis” dibalik manisnya Gula*). Dembi Tamar dahulunya seorang patani yang kini beralih profesi menjadi buruh diperkebunan tebu harus menahan penderitaan selama 21 bulan di rumahnya.

Kasus kecelakaan yang dialami Dembi Tamar saat sedang bekerja di kebun tebu yang kemudian tidak mendapatkan perhatian dan akses dari perusahaan menjadi catatan buruk sejarah investasi di kabupaten Sumba Timur. Inilah gambaran umum kasus yang terjadi di perkebunan tebu. Dan masih banyak lagi kasus baik itu

pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, hilangnya situs-situs budaya Sumba.

➤ **Peternak yang Kehilangan Padang Penggembalaan**

Ekspansi perkebunan tebu PT. Muria Sumba Manis 52.000 Ha menjadi ancaman serius keberlanjutan ekologis dan ruang wilayah kelola rakyat. Di atas penulis sudah menggambarkan secara umum sektor-sektor unggulan yang seharusnya tidak diganggu dengan berbagai model pendekatan pembangunan yang baru (*bukan dalam arti menolak*) yang bila dilihat secara detail, strategi pembangunan (*investasi perkebunan*) ini belum disiapkan secara matang oleh pihak pemerintah terkait dampak dari kebijakan tersebut.

Tiga tahun terakhir di Sumba Timur begitu maraknya investasi perkebunan monokultur seperti tebu dan lain-lain menjadi salah satu faktor utama munculnya berbagai konflik antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Bahkan bisa dianalisa alih fungsi lahan ini menjadi biang kerok berkurangnya lahan dan ternak di kabupaten Sumba Timur.

Data Dirjen Planologi kehutanan merilis jumlah hutan primer di Sumba Timur pada tahun 2009 hanya 4,5 persen dari total luas daratan. Perkebunan tebu PT. MSM di kabupaten Sumba Timur-NTT memiliki wilayah konsesi seluas 52.000 Ha konsesi perusahaan ini berada di 30 Desa di 6 Kecamatan di Sumba Timur.

Potret masyarakat peternak Sumba Timur kini tidak bisa kita temui seperti dahulu kala, ada perubahan dan pergeseran yang begitu besar terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Tersingkirnya petani/peternak dari tanahnya untuk digiring menjadi buruh industri yang murah menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat Sumba saat ini.

Berawal dari sinilah konflik agraria dan kemiskinan terus berakumulasi menjadi bibit-bibit lahirnya gejolak sosial yang lebih luas. (*perjalanan yang belum berakhir*). Krisis ekologis yang dirasakan saat ini dari kehadiran perkebunan tebu sudah semakin masif, daya dukung lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas tidak lagi menjadi refrensi dari industri perkebunan di pulau Sumba.

Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi, seperti ketika perusahaan memakai hutan lindung *Mbula* di Desa Wangi lewat dinas Kehutanan melalui mekanisme Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Hutan lindung *Mbula* merupakan sumber kehidupan masyarakat sekitar pesisir, bukan saja manfaat ekonomi dan ekologis, namun manfaat sosial budaya pun kian terancam hilang akibat konsesi lahan perkebunan. Inilah fakta dimana pemerintah daerah pun mengaminkan keinginan perusahaan tanpa memikirkan dampak sosial bagi masyarakat yang bergantung pada alam.

Air yang terdapat dalam hutan *Mbula* dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengairi perkebunan tebu, disisi lain daya dukung lingkungan tidaklah cukup seperti data yang dirilis oleh sebuah lembaga akademis menyatakan bahwa kebutuhan air untuk perkebunan tebu rata-rata dalam sehari mencapai 7.500 meter kubik. Ini jumlah yang sangat besar. Kondisi pulau Sumba yang rentan dengan perubahan iklim kini menjadi perhatian serius untuk memulihkan tanah ini dengan cara yang bijaksana.

Keseimbangan manusia dengan alam perlu dijaga dengan perilaku dan karakter pembangunan yang ramah terhadap lingkungan sekitar. Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan haruslah berpijak pada nilai dan budaya pelestarian. Kelestarian budaya, nilai dan lingkungan di Sumba tentu membutuhkan sentuhan kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur baru NTT.

C. Kearifan Lokal Masyarakat Di Dunia

1. Pengetahuan Kearifan Lokal Berperan Pecahkan Masalah Global

Aspek kearifan lokal ternyata tidak hanya menjadi suatu tinggalan kebudayaan atau yang bersifat tradisional. Kearifan lokal ternyata dapat menunjang berbagai ilmu pengetahuan dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Demikian disampaikan Guru Besar Emeritus Leiden University, Belanda Prof. Dr. L. Jan Slikkerveer saat menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional “Indigenous Knowledge for Sustainable Development” yang digelar Universitas Padjadjaran secara virtual, Kamis (10/12).

Ahli Etnobotani ini menjelaskan, modernisasi ternyata memberikan dampak pada menguatnya permasalahan sosial. Modernisasi menurutnya tidak menjadikan situasi ekonomi dan sosial budaya masyarakat membaik. Kesenjangan sosial justru semakin meningkat.

Dari studi yang sudah dilakukan, Prof. Jan menunjukkan bahwa bentuk praktik dan kelembagaan kearifan lokal di tingkat akar rumput ternyata berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial. Sayangnya, dominasi pengetahuan modern kerap mengalahkan eksistensi pengetahuan lokal. “Dominasi pengetahuan global yang membuat pengetahuan lokal terpinggirkan, meskipun memiliki potensi besar,” ujar peneliti di Leiden Ethnosystem and Development Programme (LEAD) Leiden University ini.

Peran kearifan lokal tidak hanya untuk pembangunan sosial ekonomi. Sektor pertanian, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan kesehatan masyarakat juga perlu sentuhan kearifan lokal. “Meski sering diabaikan, kearifan lokal nyatanya memberikan kunci bagi banyak solusi berkelanjutan,” ucapnya.

2. Pelopor Kajian Kearifan Lokal

Guru Besar penerima Doktor Honoris Causa dari Unpad tahun 2005 silam ini telah banyak berkecimpung meneliti di bidang etnosains. Beberapa risetnya juga banyak yang berkolaborasi dengan akademisi Unpad. Salah satu kiprahnya bersama Guru Besar FISIP Unpad (alm) Prof. Kusnaka Admiharja adalah mengembangkan pusat kajian etnosains bernama “Indonesian Resource Center for Indigenous Knowledge (Inrik)” di Unpad pada 1994. Pendirian pusat kajian ini juga difasilitasi penuh oleh Rektor ke-8 Unpad Prof. Maman P. Rukmana.

Inrik Unpad berfokus pada kajian tentang pengetahuan, adat istiadat, hingga kultur dari masyarakat Indonesia. Pusat kajian tersebut pada saat itu menjadi pusat kajian pertama yang berfokus pada pengembangan kajian budaya lokal di Indonesia. “Semua karya rintisan kajian peneliti Inrik Unpad di bidang etnosains memberikan kontribusi sebagai studi pertama dari kearifan lokal di Indonesia,”

kata Prof. Jan. Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad Wina Erwina, PhD mengatakan, aktivitas Inrik Unpad terus bertahan hingga kini. Eksistensi kajian etnosains di Unpad terus dipertahankan oleh para Rektor Unpad.

Guna mempertahankan eksistensi kajian etnosains, Unpad mulai menerbitkan “Indigenous Knowledge (IK) Journal” pada Januari 2021 mendatang. IK Journal yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad bersama Inrik Unpad merupakan jurnal internasional *open access* yang menerbitkan laporan penelitian empiris, tinjauan sistematis, evaluasi program, dan laporan kasus yang berfokus pada komunitas di kawasan budaya.

3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal menjadi bahan wacana dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Berikut ini beberapa contoh tentang bangkitan kesadaran terhadap pentingnya kearifan lokal. Akibat industrialisasi yang terus berekspansi secara cepat, terjadilah kerusakan lingkungan. Polusi, banjir, tanah longsor dan pemanasan global (global warning) merupakan byproduct dari industrialisasi, yang bahkan sampai sekarang diyakini oleh para penganut developmentalisme sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Penggunaan bahan bakar, konversi lahan produktif menjadi real estat dan pabrik menyebabkan kesusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan ternyata menimbulkan penderitaan di banyak tempat. Itu semua menggambarkan bagaimana parahnya kerusakan lingkungan yang menimbulkan penderitaan masyarakat lokal akibat pembangunan yang tidak berorientasi pada kearifan lokal.

Contoh lainnya bisa dilihat dalam dimensi hubungan antarmanusia. Dalam tradisi Jawa yang sesungguhnya diwarnai oleh ajaran Islam, manusia diharuskan untuk menjalin silaturahmi. Orang bertemu muka, bercanda, berbincang-bincang dengan keakraban. Mereka memiliki waktu yang longgar untuk bercengkerama sehingga hubungan batin menjadi kuat karena bisa melihat ekspresi teman atau tetangganya. Tetapi, dalam kehidupan modern, akibat teknologi

informasi, orang merasa cukup berkomunikasi dengan teknologi informasi, misalnya telepon. Manusia modern telah kehilangan sentuhan-sentuhan keakraban sesama. Tradisi gotong royong di kampung-kampung tradisional sesungguhnya merupakan institusi untuk menguatkan keakraban dan tanggung jawab sosial. Ada nilai-nilai (*values*) yang tidak bisa digantikan oleh sistem baru, misalnya dengan urunan untuk membayar tenaga orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas kolektif di suatu komunitas tertentu.

➤ **Keadaban**

Menyadari pentingnya kearifan lokal. Maka tugas kita sekarang ialah menemukan kearifan lokal dan memfungsikannya untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang berkeadaban. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat semacam itu, dalam bahasa rakyat Indonesia, adalah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan berada di bawah naungan keampunan Allah (*wa rabb ghafur*); juga masyarakat yang diberkahi oleh Allah (*barakat min al-sama' wa al-ardl*); masyarakat yang aman damai (*aminan muthma'innan*). Masyarakat seperti itu tidak akan lahir secara tiba-tiba, tetapi dari proses yang melibatkan usaha manusia, yang salah satunya ialah pertimbangan terhadap pentingnya kearifan lokal.

Pada masyarakat Jawa, misalnya, kearifan lokal bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap sesama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam dalam pengertian yang lebih luas. Dalam hubungan manusia, kita masih menemukan budaya kewajaran (*ngono yo ojo ngono*), toleransi (*tepo seliro*), gotong royong, ketulusan, penghormatan terhadap yang lebih tua, termasuk orang tua, guru dan lain-lain. Dalam hubungan dengan hewan, kita menemukan betapa akrabnya manusia dengan makhluk Allah itu, misalnya tradisi angon wedus (kambing), memelihara sapi di kandang yang dekat dengan rumah. Ini berbeda dengan ternak ayam dalam masyarakat modern yang penuh dengan kekejaman karena ingin memperbesar produksi untuk memenuhi konsumsi masyarakat modern. Dalam hubungannya dengan alam, masyarakat masih

memelihara hubungan yang akrab sehingga tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara sembrono. Industrialisasi yang tidak memperhatikan kearifan lokal mengakibatkan malapetaka baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar maupun bagi warga dunia dalam jangka panjang.

**4. Budaya dan Kearifan Lokal di Era Global:
Pentingnya Pendidikan Bahasa dan Seni Suminto
A. Sayuti**

1. Sebagai bangsa, kita memiliki kosa-budaya yang begitu melimpah ruah. Apapun bentuk dan wujudnya, budaya bangsa tersebut merupakan dan menjadi modal dan identitas, benteng, serta sekaligus sebagai “paspor utama,” terlebih lagi, dalam tata pergaulan dan tegur-sapa global. Menjadi modal dan identitas karena dengan dan melalui budaya kita dikenal oleh dan memperkenalkan diri kepada bangsa-bangsa lain. Budaya merupakan modal dan identitas kita dalam berelasi dan berinteraksi dengan “yang lain,” yang bukan kita, liyan, the others.

Pengakuan bangsa-bangsa lain atas tingginya nilai-nilai budaya yang kita miliki, misalnya saja, merupakan “paspor,” yang melegitimasi bahwa secara kultural kita sah bergaul dan berposisi setara dengan mereka. Sementara itu, proses berelasi dan berinteraksi dengan “yang lain” itu juga meniscayakan masuknya beragam nilai secara tak terhindarkan, yang dalam sejumlah hal acapkali bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah lama terinternalisasi dan diyakini. Dalam konteks inilah, nilai-nilai yang inheren dalam kosa-budaya bangsa berfungsi sebagai benteng. Akan tetapi, yang menjadi persoalan mengapa kecenderungan materialistik dan hedonik makin hari makin mengedepan di tengah kehidupan masyarakat, dan bersamaan dengannya: nilai-nilai dan karakter kebangsaan kita juga terasa kian pudar (untuk tidak mengatakan dalam proses “mulai dilupakan”), padahal kita memiliki modal dan identitas, paspor, serta benteng budaya yang kokoh. Adakah yang salah dalam mengelola sistem dan mekanisme kebudayaan dalam konteks kebangsaan kita, dan sederet pertanyaan kultural lain.

Dalam konstelasi seperti dikemukakan di atas, posisi pendidikan bahasa dan seni sebagai “proses pembudayaan” pun layak dipertanyakan: sudahkah ia menunaikan imperatif ideologis, edukatif, dan kultural sebagai fungsi-fungsi utama dalam praksisnya. Terdapat paling tidak empat alasan yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini. Pertama, dalam keseluruhan dan keutuhannya, kebudayaan merupakan lahan dan habitat utama bagi persemaian benih-benih karakter, tempat identitas dan kepribadian tumbuh dan berkembang.

Kedua, kebudayaan memerlukan upaya pemeliharaan, pengembangan, dan pemberdayaan melalui, antara lain, pendidikan, utamanya dalam mencerahkan pentingnya norma/nilai, perilaku, dan benda-benda budaya kepada masyarakat. Ketiga, nilai-nilai luhur budaya bangsa akan menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat apabila praksis pendidikan bahasa dan seni dilepaskan dari bingkai dan orientasi budaya. Keempat, fungsi kebudayaan sebagai sumber nilai bisa saja lama-kelamaan akan hilang apabila tidak didukung oleh masyarakat yang sadar dan terdidik. Butir-butir ini menunjukkan adanya hubungan resiprokal dan dialektis antara pendidikan bahasa dan seni di satu sisi, dan kebudayaan pada sisi yang lain: sebuah relasi yang penting bagi upaya penggalian dan pengembangan kearifan lokal dalam konteks nation and character building di era global.

2. Masuknya beragam nilai yang berasal dari “luar” (sebagai “pusat”) melalui beragam piranti modern, sebagai akibat yang tak terhindarkan dari proses global, telah memberi warna dan corak tersendiri pada sendi-sendi kehidupan budaya bangsa. Derasnya arus global dari pusat ke “pinggiran” antara lain mengakibatkan munculnya situasi “ketertinggalan budaya,” dan sangat mungkin, “longsor budaya.” Ketertinggalan budaya melanda sebagian besar masyarakat negara berkembang (sebagai “pinggiran”) dalam upayanya mencapai strata modernis bersamaan dengan membanjirnya informasi.

Simbol budaya baru, kadang-kadang, diberi makna tidak pada tempatnya. Teknologi yang berkembang begitu pesat dan canggihnya juga menyebabkan pola komunikasi masyarakat berubah dengan

cepat. Pengetahuan dan pengalaman manusia dibentuk oleh berbagai informasi yang dapat disimpan dan ditransmisikan dengan kecepatan yang begitu dahsyat dan dapat menjangkau kawasan yang begitu luas. Bahasa lisan digantikan peranannya oleh citra-citra visual. Sikap utilitarian, materialis, dan hedonis mengedepan berbarengan dengan munculnya pergeseran yang terus-menerus. Akibatnya, pandangan dunia masyarakat pun pecah, tercabik, dan salah-tempat (dislokasi). Ini semua bisa diperhitungkan sebagai tantangan sekaligus ancaman bagi nilai-nilai, karakter, dan identitas bangsa. Proses persemukaan, persinggungan, dan “persetubuhan” budaya yang tengah dan akan terus terjadi tersebut benar-benar akan menjadi sesuatu yang membahayakan apabila di dalam sistem dan mekanisme kebudayaan dalam konteks kebangsaan tidak disediakan ruang, peluang, atau kemungkinan perubahan. Karena apa? Sesuatu akan menjadi langgeng bilamana dirinya terbuka bagi perubahan dan pembaharuan. Dalam hubungan ini, berpikir dan bertindak strategis pun menjadi penting dan mendesak. Perancangan dan pelaksanaan berbagai upaya yang muara akhirnya pada terciptanya kekenyalan identitas bangsa dalam menghadapi dan memasuki berbagai proses tersebut perlu segera dilakukan agar nilai-nilai budaya dapat dirawat selayaknya dan yang mulai pudar akan dapat dicahayaakan kembali.

Ketika muncul kesadaran bahwa yang lokal selalu menjadi korban marginalisasi sehingga terpinggirkan, seluruh masyarakat (etnik) yang ada merasa perlu meredefinisi diri sendiri dan budayanya. Memasuki “kandang” budaya lokal, di satu sisi, dapat diperhitungkan sebagai dasar bagi upaya menciptakan situasi sadar budaya bangsa. Hanya saja, tindakan ini bisa saja memunculkan paradoks di sisi lainnya, yakni ketika ia ditafsirkan secara linear bahwa kita akan hidup di masa depan, bukan di masa lalu. Bahkan, ketika proses ini menjadi eksklusif, ia menjadi tantangan tersendiri karena yang tercipta bukan lagi kesadaran bersama dalam konteks nation state, melainkan semangat etno-nasionalisme.

Oleh karena itu, orientasinya harus diarahkan pada kesejatian fitrah manusia sebagai pelaku yang sadar untuk bertindak mengatasi

dunia dan realitas yang (mungkin bisa) memusuhi dan menindasnya, yang secara keseluruhan berada dalam bingkai kebersamaan dengan liyan (“yang lain,” the other). Konsekuensinya, sistem dan mekanisme budaya lokal dan translokal tetap harus dipelihara, dikembangkan, dan diberdayakan bersama.

Persilangan dialektis antara liyan dan dorongan untuk mencipta dan mencipta ulang identitas lokal yang independen dalam suatu proses transformasi yang berkesinambungan menjadi imperatif untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah menyiapkan sebuah habitat agar figur-figur yang terlibat di dalamnya mampu menghayati nilai lokal, dan sekaligus mampu membuka ruang tegur-sapa dengan liyan dalam dirinya: untuk menjadi lokal sekaligus translokal dan global. Pendek kata, agar masyarakat memiliki kekenyalan budaya yang memadai.

Persoalan nilai lokal dan translokal tersebut memang memunculkan dilema: apakah nilai-nilai yang ada itu diolah secara kreatif (dalam arti didialogkan dengan nilai “yang lain”) melalui rekonsiliasi yang seimbang, atau ia dimanfaatkan begitu saja sehingga terjadi homogenisasi nilai dan sekaligus dominasi atas nilai yang lain melalui rekonsiliasi subordinasi.

Yang jelas, upaya apapun yang dipilih dan dilakukan hendaknya tidak terjebak menjadi upaya penghapusan melalui rekonsiliasi eliminasi. Kebijakan apapun yang diambil dan mengatasnamakan kepentingan publik, karenanya, kebijakan itu harus selalu didasarkan pada wawasan kultural. Situasi polifonik dan multikultural harus menjadi dasar utamanya. Implikasinya, habitat budaya kewargaan yang sehat harus disiapkan, yakni suatu habitat yang meniscayakan tersedianya ruang dan peluang bagi partisipasi penuh dan interaksi yang terbuka bagi semua unsur masyarakat yang beragam.

Hal tersebut penting karena mereka yang tetap menghayati nilai-nilai budaya lokalnya dikhawatirkan akan menjadi kaum marginal yang kurang dimunculkan dalam konstelasi informasi translokal dan global, dan seringkali kurang diuntungkan secara

material. Oleh karena itu, upaya membangun kesadaran terhadap adanya kearifan lokal sebagai sebuah realitas budaya, yang juga berfungsi dalam memposisikan identitas budaya, bagi masyarakat tertentu sebagai pencirinya, pada akhirnya harus menjadi spirit yang tidak boleh diabaikan dalam konteks menjaga nilai-nilai kebangsaan agar tidak pudar dan agar nilai-nilai itu tetap dihayati dalam situasi apapun.

Sebagai bangsa yang bhineka, Indonesia memiliki dua macam sistem budaya yang keduanya harus dipelihara, dikembangkan, dan diberdayakan yakni sistem budaya nasional dan sistem budaya etnik lokal. Sistem budaya nasional adalah sesuatu yang hingga kini masih berproses terus. Sistem ini berlaku secara umum untuk seluruh bangsa Indonesia, tetapi sekaligus berada di luar ikatan budaya etnik lokal yang manapun. Nilai-nilai budaya yang terbentuk dalam sistem budaya nasional itu bersifat menyongsong masa depan.

Dalam hubungan ini, kenyataannya, nilai-nilai tersebut hakikatnya merupakan “serat-serat irisan” yang terbentuk tatkala dua atau lebih budaya etnik lokal bersemuka, bersinggungan, dan saling memperkaya atas dasar persamaan-persamaan yang ada di antaranya. Jadi, nilai-nilai budaya lokal tertentu menjadi bercitra translokal/nasional karena dipadu dengan nilai-nilai lain yang sesungguhnya diderivasikan dari nilai-nilai budaya lama yang terdapat dalam berbagai sistem budaya etnik lokal.

Kearifan-kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jatidiri bangsa secara translokal (nasional). Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat budaya bangsa memiliki akar. Budaya etnik lokal seringkali berfungsi sebagai sumber atau acuan bagi penciptaan-penciptaan baru, misalnya dalam bahasa, seni, tata masyarakat, teknologi, dan sebagainya, yang kemudian ditampilkan dalam perikehidupan lintasbudaya. Karenanya, upaya penggalian kearifan lokal pada dasarnya untuk mencari, dan akhirnya untuk menetapkan identitas bangsa, yang mungkin hilang karena proses persilangan dialektis, atau karena akulturasi dan transformasi yang telah, sedang, dan akan terus terjadi sebagai sesuatu

yang tak terelakkan. Upaya menemukan identitas bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan budaya bangsa di atas dasar identitas daerah-daerah Nusantara. Jadi, ujung akhir situasi sadar budaya yang ingin dicapai bukanlah situasi nekrofil, yakni perasaan cinta kepada segala sesuatu yang bendawi/wujudiyah yang tidak berjiwa kehidupan, melainkan situasi biofil, yakni perasaan cinta kepada segala sesuatu yang maknawiah yang berjiwa kehidupan. Dengan cara demikian, seluruh warga bangsa diharapkan memiliki kekenyalan budaya yang memadai dalam menghadapi tantangan global.

3. Budaya Barat yang sudah maju secara ekonomis dan teknologis secara tak terhindarkan telah melanda kita dengan begitu kuat sehingga kita merasa kehilangan (sebagian) identitas tradisional bangsa. Munculnya keinginan untuk membangun kembali identitas bangsa, pada hakikatnya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sarana yang penting untuk menyeleksi, dan bukannya melawan, pengaruh budaya “lain.” Gerakan nativisme bisa saja dipandang naif, akan tetapi ia merupakan suatu reaksi logis apabila diletakkan dalam perspektif budaya yang berubah sangat cepat.

Dengan selalu memperhitungkan kearifan lokal lewat dan dalam proses budaya, keniscayaan masyarakat terperangkap dalam situasi menjadi masyarakat yang terasing dari realitas dirinya, yang “menjadi ada” dalam pengertian “menjadi seperti liyan dan bukannya dirinya sendiri,” dapat dihindari. Jadi, penempatan hasil upaya penggalian kearifan-kearifan lokal dalam proses budaya harus selalu dimaknai dalam konteks upaya menyiapkan masyarakat memiliki kekenyalan budaya, dan bukannya sebagai domestikasi atau penjinakkan sosial budaya. Dikatakan demikian karena upaya menggali dan menyadari kembali kearifan lokal dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas, dan sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh budaya liyan.

Nilai-nilai kearifan lokal tersebut meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan karakter dan identitas, yang pada

gilirannya akan memunculkan sikap budaya yang mandiri, penuh inisiatif, dan kreatif. Perawatan, pengembangan, dan pemberdayaan kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual memiliki arti penting bagi berkembangannya suatu masyarakat, terutama jika dilihat dari sudut kekenyalan budaya, di samping juga mempunyai arti penting bagi identitas daerah yang bersangkutan. Karya-karya seni budaya yang menempatkan nilai-nilai lokalnya sebagai sumber inspirasi kreatif, bagi daerah yang bersangkutan akan mendorong munculnya sikap bangga terhadap budaya dan daerahnya. Karya-karya kreatif itu bisa saja ditampilkan dalam wajah atau wacana translokal sehingga memiliki sumbangan yang besar bagi terciptanya identitas baru bagi bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal, yang juga meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu, dengan demikian, juga berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. Anggapan bahwa yang relevan dengan kehidupan hanyalah “masa kini dan di sini” juga dapat dihindari. Kearifan lokal dapat dijadikan semacam jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang, demi menyiapkan masa depan dan generasi mendatang. Pada gilirannya, ia pun dapat dijadikan semacam simpai perekat budaya antargenerasi, dan menghindarkan diri dari situasi ahistoris.

Dalam konteks tersebut, pemosisian pendidikan bahasa dan seni secara strategis menjadi penting. Pendekatan multikultural --yang menghindari sifat satu arah, kognitif, dan eksklusif; juga menghindari superioritas, primordialisme, dan eksklusivisme nilai tertentu-- merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh. Melaluinya, pemahaman nilai-nilai bersama dan upaya kolaboratif mengatasi masalah-masalah bersama diupayakan, potensi nilai yang bersifat trans- dicahayaakan. Nilai tenggang rasa antarsesama dijadikan dasar utama, di samping keserbanekaan keyakinan, tradisi, adat, dan serat-serat budaya lainnya ditempatkan sewajar-wajarnya melalui tegur-sapa yang ramah. Semua itu dapat terlaksana apabila materi dalam

proses pendidikan bahasa dan seni diperhitungkan sebagai “rumah” pengalaman kemanusiaan kita.

Dalam dan melalui proses semacam itu, kita “merumahkan” pengalaman-pengalaman kita yang tidak pernah singular. Jika butir-butir tersebut mampu kita implementasikan dalam rangka nation and character building, niscaya histeria sosial, situasi yang rentan terhadap sawan budaya, atau schizofrenia kultural, dapat dihindari. Pendidikan karakter niscaya menghindari terbentuknya manusia-manusia yang berwajah garang, yang wataknya dan perilakunya keras, brutal, dan agresif, yang salah satu kehendak besarnya adalah memusuhi yang lain, yang satu ingin menguasai dan menindas yang lain.

Pendidikan karakter niscaya berupaya membentuk manusia yang mampu menghargai harkat dan hak-hak azasi, dan bukannya membentuk manusia yang hanya menjadi pendusta bagi hati nurani diri mereka sendiri. Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, dengan demikian, hakikatnya merupakan upaya menyiapkan dan membentuk sebuah masyarakat yang keberlangsungannya didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Untuk mewujudkannya, “angan-angan” segelintir manusia (yang kebetulan sedang “berkuasa,” misalnya saja), tidak boleh mengalahkan konvensi, common sense, dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada, apalagi yang sudah terwujud dalam kaidah hukum; pertumbuhan organisasi-organisasi kewargaan juga perlu disemai, bukan malah ditekan; perbedaan pendapat juga tidak boleh dibungkam. Dengan demikian, upaya pengembangan yang dilaksanakan sudah seharusnya mampu pula menemukan, menghidupkan, dan menyegarkan kembali semangat kebebasan, individualitas, kemanusiaan, dan toleransi dalam jiwa. Untuk itu, keutamaan kecendekiawanan dan pengayaan kultural merupakan keniscayaan, yaitu keniscayaan untuk menanamkan ke dalam dirinya prinsip-prinsip etika dan kebenaran moral yang berasal dari cita-cita peradaban dan warisan intelektual yang benar-benar berakar pada kultur sendiri.

4. Pengintegrasian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam proses pendidikan bahasa dan seni mengandaikan bahwa

siswa/mahasiswa akan mengkonstruksikan pengetahuan atau menyemaikan benih-benih nilai positif dalam dirinya sebagai hasil “pemikiran” dan interaksinya dalam konteks sosial-budaya yang mengepung dan mengkondisikannya. Siswa/mahasiswa diharapkan mampu menciptakan makna yang saheh bagi dirinya berdasarkan interaksi antara pengetahuan yang telah dimiliki, diketahui, dan dipercayai; dengan gejala, gagasan, atau informasi baru yang diperoleh di dalam proses pendidikan yang ditempuhnya. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimaksud harus dihadirkan dalam kelas pembelajaran/ perkuliahan.

Penempatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai konteks pendidikan bahasa dan seni berpotensi mendekatkan dan menyadarkan peserta-didik terhadap lingkungan kehidupannya: dari adat istiadat dan benda-benda budaya tempat nilai-nilai itu melekat dan bersemayam di dalamnya. Dengan demikian, strategi penghadiran lingkungan budaya merupakan bagian dari proses penebaran benih dan pembumian nilai. Ketika siswa/mahasiswa berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan (budaya), sesungguhnya mereka sedang berada dalam periswa belajar. Lingkungan budaya merupakan sebuah “lokus” untuk mendapatkan pengalaman (-pengalaman baru). Kearifan lokal yang diintegrasikan dalam praksis pendidikan bahasa dan seni akan menciptakan medan eksplorasi bagi siswa/mahasiswa dalam memahami dan menghayati nilai tertentu. Mereka tidak hanya ngerti, tetapi juga nglakoni dan ngrasakke, berinteraksi dengannya melalui beragam proses: knowing, doing, dan being pun terintegrasi.

Ketika hasil penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditautkan dengan, dan diintegrasikan dalam pendidikan bahasa dan seni, terdapat tiga alternatif yang dimungkinkan. Pertama, pendidikan tentang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tertentu. Alternatif ini menempatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai subjek dan objek kajian. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tertentu dipelajari dalam satu program studi khusus: tentang budaya dan untuk budaya. Dalam hal ini, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tidak terintegrasi dengan disiplin keilmuan

lain. Kedua, pendidikan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal terjadi pada saat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tertentu diperkenalkan kepada siswa/mahasiswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari suatu konsep tertentu. Belajar dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal meliputi pemanfaatan beragam hal yang inheren di dalamnya: menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip, serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur tertentu. Ketiga, pendidikan melalui nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan strategi yang memberikan kesempatan kepada siswa/mahasiswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya melalui beragam perwujudan budaya yang berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tertentu. “Produk-produk” budaya yang diwujudkan siswa/mahasiswa, misalnya saja poster, karangan, lukisan, lagu, ataupun puisi yang bertema nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tertentu, dapat diperhitungkan untuk melihat seberapa jauh peserta-didik memperoleh pemahaman proses tertentu, dan seberapa besar kreativitasnya dalam rangka pencapaian kompetensi tertentu.

5. Akhirnya, ketika etnisitas dipahami sebagai sebuah konsep kultural yang berpusat pada pembagian norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, simbol, dan praktik-praktik kultural, maka kearifan lokal sesungguhnya menjadi sarana yang utama dalam mengikat keutuhan etnisitas itu. Oleh karena itu, ketika kearifan lokal diintegrasikan dalam praksis pendidikan bahasa dan seni, model-model pembelajaran yang dipilih dan dikembangkan perlu dilakukan secara cermat. Dalam hubungan ini, paling tidak terdapat 6 (enam) model yang perlu dicermati, yakni model pohon, model kristal, model sangkar burung, model jamur, model amuba, dan model DNA.

Dalam “model pohon,” akar proses pengembangan yang dilakukan berada dalam nilai-nilai lokal dan tradisi, tetapi menyerap sumber-sumber eksternal yang relevan dan berguna untuk tumbuh keluar. Dalam kaitan ini, pengembangan pembelajaran kearifan lokal

dalam konstelasi pendidikan translokal (nasional) dan global tetap mengedepankan, karena memerlukan, akar-akar budaya lokal. Tujuan utamanya adalah menyiapkan pribadi lokal yang berwawasan internasional, yakni individu yang utamanya bertindak pada tataran lokal, tetap ia/mereka berkembang secara global.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum pembelajaran kearifan lokal harus didasarkan pada nilai-nilai dan aset budaya lokal itu sendiri, tetapi sekaligus menyerap teknologi dan wawasan global yang cocok untuk mendukung pengembangan komunitas berikut individu-individunya sebagai warga lokal. Model ini diharapkan mampu mendorong komunitas lokal untuk memelihara nilai-nilai tradisional, identitas kultural, dan akumulasi pengetahuan lokalnya karena tumbuh, berkembang, dan berinteraksi dengan asupan energi dari sumber-sumber eksternal. Pertumbuhan komunitas lokal yang berhasil akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan komunitas dan pengetahuan global.

Akan tetapi, jika akar kulturalnya sempit dan miskin, pertumbuhan komunitas dan individu lokal akan menjadi begitu terikat dan menyakitkan. Untuk menghindari hal itu, juga untuk menghindari jebakan pertumbuhan dan perkembangan yang hanya bersifat teknis jangka pendek, dinamisasi kultural harus dilakukan juga secara berbarengan. Dengan cara demikian, pengetahuan global yang dikonversikan ke dalam pengetahuan lokal tidak terbatas pada bias kultural, yang seringkali berkedok sikap “selektif.”

Kunci proses pengembangan “model kristal” terletak pada kesadaran bahwa pemekaran kearifan lokal berfungsi untuk mengkristalisasikan dan mengakumulasi pengetahuan eksternal (translokal dan global) yang cocok dengan bentuk-bentuk yang sudah ada. Dalam kaitan ini, pengembangan lebih diarahkan untuk mengakumulasi pengetahuan eksternal yang ada di sekitar yang lokal.

Implikasinya, desain kurikulum dan pembelajaran diorientasikan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan nilai-nilai kelokalan yang paling mendasar sebagai landasan fundamental untuk mengakumulasi sumber-sumber pengetahuan eksternal yang relevan

dan signifikan bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan. Yang pertama dan utama adalah pemahaman terhadap struktur pengetahuan kelokalan sebagai dasar ketika pengetahuan dan kearifan yang bersifat eksternal diakumulasi. Model ini diharapkan mampu menyiapkan manusia lokal yang memiliki sejumlah pengetahuan global, yakni pribadi-pribadi yang mampu berpikir dan bertindak lokal dengan memunculkan teknik-teknik global. Dalam model ini, konflik antara kebutuhan lokal dan pengetahuan global yang diserap dan diakumulasi dalam pengembangan komunitas dan individu lokal, dapat diminimalkan.

Karena, asupan global hal-hal yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki lebih mudah untuk diidentifikasi. Eksternalisasi yang berlebihan juga lebih mudah dikendalikan. Hanya saja, tidak mudah untuk mendapat seperangkat nilai atau hasil-hasil lokal yang baik yang dapat digunakan untuk mengkristalisasikan dan melokalisasikan pengetahuan dan kearifan lokal yang berdaya guna dan membuahkan hasil secara penuh. Tipe-tipe dan hakikat yang asli lokal itu sendiri bisa saja hanya mengkristalkan hal-hal sama saja dengan yang sudah ada.\

Proses pengembangan “model sangkar burung” terbuka bagi kehadiran sumber-sumber dan pengetahuan global, tetapi membatasi perkembangan lokal dan interaksi yang bersifat eksternal untuk menetapkan suatu kerangka kerja. Pengembangan pembelajaran kearifan lokal sebagai bagian dari budaya lokal dalam keseluruhannya dalam konstelasi yang lebih luas memerlukan kerangka kerja lokal yang berfungsi protektif dan selektif. Dalam kaitan ini, desain kurikulum hendaknya memiliki kerangka kerja lokal dengan batas-batas ideologis dan norma-norma sosial yang jelas. Harapannya, semua aktivitas edukasional memiliki fokus lokal yang jelas ketika bersemuka dengan pengetahuan dan masukan global. Perhatian dan kesetiaan lokal hendaknya menjadi bagian utama pendidikan.

Model ini diharapkan mampu menyiapkan manusia lokal dengan wawasan global yang terbatas, yakni pribadi-pribadi yang bertindak lokal dengan pengetahuan global yang sudah disaring.

Kerangka kerja yang disiapkan diharapkan mampu menjamin relevansi lokal, membantu menghindari hilangnya identitas lokal, dan memproteksi interes lokal dari globalisasi yang berlebihan. Hanya saja, penetapan batas-batas sosial dan kultural yang tepat untuk menyaring dampak global dan untuk menjamin relevansi lokal bukan hal yang mudah dilakukan. Karena, batas-batas tersebut bisa saja terlampaui ketat dan tertutup, sehingga interaksi penting dengan dunia luar menjadi terkendala, di samping pertumbuhan pengetahuan lokal juga cenderung terhambat.

Dalam prosesnya, “model DNA” mengidentifikasi dan mencangkok elemen-elemen kunci yang lebih baik yang berasal dari pengetahuan global untuk menggantikan komponen-komponen lokal yang sudah tidak lagi berdaya dalam rangka pengembangan. Implikasinya, desain kurikulum hendaknya sangat selektif, baik terhadap pengetahuan lokal maupun global. Tujuannya untuk memilih elemen-elemen yang terbaik dari keduanya. Pemahaman terhadap kelemahan dan kekuatan elemen, baik pengetahuan lokal maupun global, merupakan hal yang penting dalam rangka menumbuhkan sikap terbuka bagi pencangkokan elemen-elemen apapun yang baik dalam konteks lokal.

Cara ini diharapkan mampu menyiapkan manusia dengan elemen campuran antara yang lokal dan global, yakni pribadi-pribadi yang mampu bertindak dan berpikir dengan pengetahuan campuran lokal dan global. Dalam model ini, investigasi rasional dan transplantasi elemen dan pengetahuan yang valid terbuka lebar hampir tanpa kendala lokal dan kultural. Dalam rangka mempelajari dan memperbaiki perkembangan dan praktik-praktik lokal, model ini lebih efisien. Akan tetapi, identifikasi terhadap kelemahan dan kekuatan elemen-elemen tertentu belum tentu benar, baik secara kultural maupun sosial.

Di samping itu, asumsi yang menyatakan pencangkokan dan penggantian dapat dilakukan dengan mudah tanpa resistensi kultural dan tanpa dampak sosial yang negatif terhadap perkembangan individu dan komunitas lokal, merupakan asumsi yang terlampaui

mekanistik. Yang diutamakan dalam “model jamur” adalah proses pencernaan tipe-tipe pengetahuan global sebagai nutrisi bagi individu dan perkembangan lokal.

Artinya, pengetahuan lokal berfungsi untuk mencerna sejumlah pengetahuan global dan mengkonversikannya menjadi nutrisi lokal demi pengembangan individu dan komunitas lokal. Implikasinya, kurikulum dan pembelajaran diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi dan mempelajari apakah pengetahuan global itu bernilai dan penting. Aktivitas pendidikan didesain untuk mencerna pengetahuan global yang kompleks ke dalam bentuk-bentuk yang tepat sehingga dapat disuap oleh individu-individu lokal demi pertumbuhan yang diperlukan.

Model ini diharapkan mampu menyiapkan manusia yang dilengkapi dengan tipe pengetahuan global tertentu, yakni pribadi-pribadi yang dalam hal bertindak dan berpikir bergantung pada pengetahuan global yang relevan. Dalam model ini, pencernaan dan penyerapan elemen-elemen pengetahuan global yang berguna lebih mudah disiapkan daripada menghasilkan pengetahuan lokal dari awal. Akar demi pertumbuhan dan pengembangan didasarkan pada pengetahuan global sebagai alternatif nilai-nilai atau budaya lokal. Akan tetapi, model ini mengutamakan proses pencernaan dan penyerapan satu-arah terhadap pengetahuan eksternal.

Dalam prosesnya, “model amuba” membuat pengetahuan global benar-benar berguna dengan hambatan lokal yang paling minimal. Artinya, pengetahuan lokal difungsikan untuk mendayagunakan dan mengakumulasi secara maksimal pengetahuan global dalam konteks lokal. Implikasinya, kurikulum hendaknya memasukkan rentangan pengetahuan dan perspektif global secara penuh. Hambatan kultural dan nilai-nilai lokal dapat diminimalkan dalam desain kurikulum dan pembelajaran agar sikap terbuka secara total terhadap pembelajaran global dapat ditumbuhkan. Model ini diharapkan mampu menyiapkan manusia yang terbuka dan flkesibel tanpa identitas lokal apapun, yakni bertindak dan berpikir global dan

cair. Kekuatan model ini terletak pada keterbukaan dan fleksibilitasnya terhadap seluruh eksposur global.

Dalam mengakumulasi sumber-sumber dan pengetahuan global, hambatan lokal dan kultural sedikit, sehingga perkembangan individu dan komunitas lokal memiliki kesempatan menguntungkan yang lebih luas. Akan tetapi, model ini berpotensi menghilangkan nilai-nilai lokal dan identitas kultural. Sangat dimungkinkan komunitas lokal akan kehilangan panduan dan solidaritas sosial sepanjang proses globalisasi.

6. Keenam model pengembangan yang dikemukakan di atas dapat dijadikan alternatif pengembangan pembelajaran kearifan lokal. Pilihan terhadapnya lebih ditentukan arah orientasi pembelajaran kearifan lokal sebagai bagian penting budaya lokal dalam keseluruhannya.

Berdasarkan luasnya dependensi pengetahuan global dan orientasi nilai dan kultur lokal, tampak bahwa model amuba dan jamur kurang relevan dan kurang signifikan karena dependensi globalnya sangat kuat. Model pohon, kristal, dan sangkar burung memiliki orientasi lokal lebih kuat, sedangkan model DNA terletak di antara dua kelompok tersebut. Dengan demikian, terdapat dua orientasi utama. Pertama, orientasi pengembangan pembelajaran kearifan lokal bisa saja secara total menolak pengetahuan dan keterlibatan global, tetapi secara kuat menekankan relevansi dan keterlibatan komunitas lokal dalam merancang dan melaksanakan pendidikan.

Nilai-nilai lokal yang ada, identitas kultural, pengalaman komunitas, dan pengetahuan lokal merupakan bagian-bagian inti pendidikan. Kedua, orientasinya adalah pendidikan yang terikat oleh tempat secara tradisional, yang diisolasi dari komunitas lokal dan jagat luar. Tujuan pendidikan, isi kurikulum, dan praktik pedagogis dipelihara agar tidak berubah untuk kurun waktu yang lama dan sangat kecil relevansinya dengan pengalaman komunitas keseharian. Terdapat kesenjangan besar antara pendidikan yang diberikan dengan realitas global dan lokal.

Dua titik ekstrem tersebut niscaya tidak menguntungkan ketika pembelajaran kearifan lokal diperhitungkan sebagai komponen strategis kebudayaan dalam fungsi ideologis, pedagogis, dan kulturalnya.

Perkembangan individu dan komunitas lokal sering kehilangan tradisionalitasnya ini pada saat berhadapan dengan tantangan serius dalam era baru transformasi dan globalisasi. Oleh karena itu, ke depan, pengembangan hendaknya diorientasikan pelokalan dan pengglobalan sekaligus. Ini merupakan skenario yang ideal, yang menekankan baik lokalisasi maupun globalisasi dalam pendidikan bahasa dan seni. Pengintegrasian keduanya dapat dilakukan melalui model pohon, kristal, sangkar burung, dan DNA. Skenario ini bertujuan melokalkan pengetahuan dan sumber-sumber global dan membuatnya valid dan relevan dengan konteks lokal.

Di samping itu juga bertujuan untuk mengglobalkan kesempatan dan pengalaman edukasional bagi para siswa dan meluaskan wawasan internasional mereka. Apabila orientasi pengembangan pembelajaran kearifan lokal diarahkan pada lokalisasi dan globalisasi sekaligus, konsepsi belajar dan pembelajaran tentang, melalui, dan dengan kearifan lokal menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam praktik pelaksanaannya.

Proses pembelajaran yang cenderung menekankan pencapaian kurikulum dan penyampaian materi secara tekstual semata harus segera ditinggalkan dan diganti dengan pengembangan kemampuan belajar, kreativitas, dan logika berpikir siswa. Situasi dan posisi siswa/mahasiswa sebagai penerima pasif semua informasi yang disampaikan guru/dosen, juga harus segera didinamisasikan sehingga dominasi guru/dosen, ketergantungan pada pada buku teks, dan kebenaran tunggal dalam proses pembelajaran sedikit demi sedikit dapat ditinggalkan. Dalam kaitan ini, pembelajaran bermakna harus diciptakan dan dirancang secara kreatif, sehingga memungkinkan terjadi interaksi dan negosiasi untuk penciptaan arti dan konstruksi makna dalam diri setiap siswa/mahasiswa dan guru/dosen, termasuk pemanfaatan kearifan lokal sebagai budaya lokal dalam pembelajaran.

Hal ini penting untuk diperhitungkan karena secara konstruktivistik, siswa mengkonstruksikan pengetahuan atau menciptakan makna sebagai hasil dari pemikiran dan interaksinya dalam suatu konteks sosial. Bukankah setiap individu menciptakan makna dan pengertian baru, berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dan dipercayai, dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari.

Karena kearifan lokal juga merupakan “rumah pengalaman kemanusiaan,” keterlibatan dan “persinggahan” siswa/mahasiswa dengannya dalam pembelajaran memungkinkan mereka belajar lebih banyak dari apa yang seharusnya. Dengan cara demikian, siswa/mahasiswa pun belajar tentang budaya komunitasnya – termasuk miskonsepsi yang inheren dalam budaya tersebut. Persentuhan siswa/mahasiswa dengan beragam bentuk budaya dalam proses pembelajaran sekaligus berarti terbukanya ruang dan peluang bagi mereka untuk secara bebas menggali prinsip-prinsip “keilmuan” berdasarkan konteks yang sudah dikenalnya, menemukan hal-hal yang bermakna di sekelilingnya (dalam komunitas budayanya), dan mendorongnya untuk membuka dan menemukan hal-hal yang baru. Pada akhirnya, mereka pun diharapkan mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, yang memiliki kedaulatan penuh atas dirinya.

D. Ragam Kearifan Lokal Di Indonesia

1. Pengertian Kearifan Lokal

Pengertian dari kearifan lokal yaitu nilai, gagasan, atau pandangan yang bersumber dari sebuah tempat dan didalamnya juga terdapat sifat bijaksana. Tidak hanya itu, adanya nilai-nilai yang baik yang nantinya dapat diikuti dan kemudian dipercayai oleh sejumlah masyarakat di suatu tempat serta sudah diikuti dengan cara turun temurun. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kearifan lokal.

a. Awig-Awig diLombok Barat dan Bali

Awig-Awig merupakan sebuah aturan adat yang dapat dijadikan suatu pedoman agar bisa bertindak dan juga bersikap terutama didalam hal berinteraksi. Dan juga didalam hal seperti

mengolah sumber daya alam dan juga lingkungannya. Dan kearifan lokal tersebut terdapat di daerah Bali dan Lombok Barat.

b. Bebie di Sumatera Selatan

Bebie merupakan suatu tradisi didalam menanam dan kemudian menanam padi secara bersama-sama, hal tersebut memiliki tujuan yaitu untuk agar suatu proses permanenan dapat dengan cepat terselesaikan. Apabila panennya tersebut telah selesai, maka akan adaperayaan yang menjadi suatu bentuk dari rasa syukur atas proses panen yang berhasil dan juga sukses. Kearifan lokal Bebie ini terdapat di Muara Enim, lebih tepatnya berada di Sumatera Selatan.

c. Hutan Larang Adat di Riau

Kearifan lokal mempunyai suatu tujuan agar masyarakat yang berada disekitarnya dapat dengan bersama-sama melestarikan hutan yang berada disana. Seperti contohnya yaitu adanya suatu peraturan mengenai tak diperbolehkannya menebang hutan secara sembarangan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka pelakunya akan dikenakan denda yaitu sebesar 100 kg beras ataupun bisa berbentuk uang yang jumlahnya sebesar Rp 6.000.000.

d. Cingcowong di Jawa Barat

Cingcowong merupakan sebuah jenis upacara yang berguna untuk meminta hujan, tradisi cingcowong ini juga sudah dilakukan dengan turun temurun oleh masyarakat Luragung untuk bisa melestarikan budayanya. Dan tradisi ini juga bisa menunjukkan suatu permintaan kepada Yang Maha Kuasa apabila tak ada kepatuhan di tiap perintah-Nya.

e. Repong Damar di Lampung Barat

Repong Damar merupakan salah satu kearifan lokal yang sering disebut juga dengan hutan damar. Repong Damar ini adalah model dari pengelolaan pada suatu lahan bekas lading didalam suatu bentuk wanatani yang kemudian dapat dikembangkan oleh masyarakat Lampung Barat di Krui. Tradisi ini menanami lahan bekas lading dengan berbagai macam jenis tanaman, contohnya yaitu seperti karet, damar, durian dan juga kopi.

f. Tembawai di Kalimantan Barat

Tembawai adalah sebuah hutan rakyat yang juga dikembangkan oleh rakyat Dayak Iban yang terletak di Kalimantan Barat. Didalam hutan tersebut juga memiliki berbagai jenis tumbuhan yang produktif seperti pohon durian.

g. Pamali memancing ikan di Maluku Utara

Pamali memancing ikan adalah suatu aturan adat yakni berupa larangan maupun boboso. Dan pamali memancing ikan ini juga secara yurisdiksi sangat terbatas kepada adat, nilai-nilai dan juga agama. Akan tetapi konsep dari property right itu terbentuk dari pranata sosial pada masyarakat yang sudah berlangsung sangat lama didalam mengatur suatu pemanfaatan sumberdaya laut dan juga pesisir. Kearifan lokal ini terdapat didaerah Desa Bobaneigo yang ada di Maluku Utara.

h. Koko dan Tattakeng di Sulawesi Selatan

Sebelum diperkenalkannya pertanian seperti padi sawah, rakyat To Bentong sudah mewariskan lahan untuk para keturunannya berbentuk kebun atau Koko dan juga lading yang sudah ditinggalkan atau Tattakeng. Koko merupakan suatu lahan perladangan yang bisa diolah dengan cara berpindah. Sementara Tattakeng merupakan suatu lahan bekas perladangan yang tengah diberakan. Kearifan lokal ini terletak di Minahasa provinsi Sulawesi Utara.

i. Moposad Dan Moduduran di Sulawesi Selatan

Moposad dan Moduduran adalah suatu pranata mengenai tolong menolong yang sangat penting untuk dapat menjaga sebuah keserasian dari lingkungan sosial. Kearifan lokal ini terletak di Bolaang Mongondow, provinsi Sulawesi Selatan.

j. Pahomba di Nusa Tenggara Timur

Pahomba atau yang biasa disebut juga dengan gugus hutan merupakan suatu tempat yang dilarang keras untuk dimasuki, terlebih lagi dengan niatan untuk mengambil hasil hutannya. Dan pada hakikatnya, pohon-pohon di tiap pahomba tersebut memiliki fungsi menjadi pohon-pohon induk yang bisa menyebarkan benih kedalam padang rumput yang cukup luas.

Oleh sebab itu, Apabila api tak menghangus dan mematikan anakan dari pepohonan tersebut, proses dari perluasan hutan yang secara alamiah bisa berlangsung. Pepohonan yang ada dipahomba dan disekitaran batang sungai memiliki fungsi menjadi suatu filter terhadap materi erosi dan juga secara sekaligus menjadi sempadan alamiah sungan yang berguna untuk pelestarian air sungai.

k. Ke-kean di Sumatera Selatan

Pengetahuan mengenai kekean merupakan suatu perhitungan waktu yang sesuai untuk bisa menanam berbagai jenis tumbuhan tertentu yang berkaitan dengan ilmu perbintangan.

l. Balingkea di Sulawesi Tengah

Balingkea adalah suatu kategori dari pandangan mengenai hutan menurut pendapat dari orang Toro. Balingkea merupakan bekas kebun yang umurnya mulai dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Seringnya balingkea diolah untuk tumbuhan palawija yang berbentuk ubi kayu, jagung, rica, kacang-kacangan dan juga sayur-sayuran.

m. Rimba Kepungan Sialang di Riau

Para masyarakat melayu telah mengenal suatu pembagian hutan tanah yang juga terdiri atas 3 bagian, yaitu tanah perladangan, rimba larangan dan juga rimba kepungan sialang.

n. Hompongan di Jambi

Hompongan adalah suatu hutan belukar yang juga melingkupi suatu kawasan inti dari pemukiman Orang Rimba, atau lebih tepatnya dikawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas di provinsi Jambi. Hal tersebut dengan sengaja dijaga ketat keberadaannya karena memiliki fungsi menjadi suatu banteng pertahanan dari gangguan pihak dari luar.

o. Sasi dari Maluku

Sasi adalah suatu adat yang menjadis suatu pedoman dari tiap warga masyarakat Maluku didalam mengelola lingkungan yang termasuk pedoman dari pemanfaatan dari sumber daya alam.

E. Kebijakan Pelestarian Kearifan Lokal

1. Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Produktif

Kearifan lokal adalah pandangan dari suatu tempat yang bersifat bijaksana dan bernilai, baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun. Kearifan lokal tersebut menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Dengan cara mewarisi pengetahuan secara turun temurun, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Setiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal tersebut akan selalu berhubungan dengan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal akan selalu terhubung pada kehidupan manusia yang hidup di lingkungan hidup yang arif. Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda yang berada didalamnya baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara perlahan akan membawa pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya, baik itu membawa pengaruh yang positif maupun negatif. Oleh sebab itu, manusia harus menyadari bahwa

segala aktivitas yang dilakukan harus dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungannya dengan menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan tersebut.

Lingkungan memiliki unsur-unsur didalamnya, yaitu biotik, abiotik dan sosial budaya. Biotik merupakan unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad renik lainnya. Sedangkan, abiotik merupakan segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, dan lain-lain. Dan sosial budaya terdiri dari unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri.

Lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat diperlukan sebagai penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya, pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan, seperti tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup; terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Kelestarian lingkungan dipengaruhi oleh lingkungan yang didominasi dengan struktur buatan manusia yang merupakan lingkungan binaan. Bangunan dan infrastruktur buatan manusia bertanggung jawab untuk sebagian besar penggunaan energi, penggunaan banyak air, dan menghasilkan sejumlah besar limbah. Idealnya, sebuah bangunan harus beroperasi seefisien mungkin. Efisiensi merupakan salah satu dasar dari desain yang berkelanjutan,

yang memengaruhi semua aspek proyek, mulai dari penentuan lokasi, perencanaan ruang, penggunaan material, dan sistem. Oleh sebab itu, para perencana dan perancang bangunan selain menciptakan bangunan yang indah harus juga memperhatikan efisiensi, kenyamanan serta pengaruh keberadaan bangunan tersebut terhadap lingkungan disekitarnya. Efisiensi energi merupakan inti praktik desain hijau saat ini.

Pembangunan-pembangunan tersebut yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang merupakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem.

Pengukuran atas pemanfaatan sumber daya pada ekosistem yang dilakukan secara seminimal mungkin guna menghasilkan produksi semaksimal mungkin dan juga merupakan suatu kegiatan yg menghasilkan sesuatu, berupa hal baru yg di dapat dari membaca, benda, tulisan, dan hal baik lainnya disebut produktif . Terdapat dua cara pandang produktivitas, yaitu cara pandang tradisional dan cara pandang modern. Cara pandang Tradisional membandingkan antara output fisik dengan input sumber daya yang digunakan sedangkan cara pandang modern membandingkan antara output fisik dengan kualitas yang dihasilkan.

Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas diantaranya efesiensi, efektivitas, dan kualitas. Efesiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan

dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi berorientasi kepada masukan. Sedangkan, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar persentase target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya. Dan kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas. Meskipun kualitas sulit diukur secara matematis melalui rasio output/input, namun jelas bahwa kualitas input dan kualitas proses akan meningkatkan kualitas output.

Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada seluruh sektor mulai dari peningkatan produktivitas masyarakat, pemerintah hingga sektor swasta. Peningkatan produktivitas pada sektor swasta berarti meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil peningkatan produktivitas perusahaan terbukti telah memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari para pekerja perusahaan itu sendiri sampai dengan konsumen. Peningkatan produktivitas perusahaan juga memberikan manfaat besar kepada pemerintah dalam hal peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja yang sangat dibutuhkan seiring dengan berkembangnya tuntutan pasar kerja. Oleh karena itu pemerintah berupaya secara terus menerus untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan produktivitas perusahaan.

Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada seluruh sektor mulai dari peningkatan produktivitas masyarakat, pemerintah hingga sektor swasta. Peningkatan produktivitas pada sektor swasta berarti meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil peningkatan produktivitas perusahaan terbukti telah memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari para pekerja perusahaan itu sendiri sampai dengan konsumen. Peningkatan produktivitas perusahaan juga memberikan manfaat besar kepada pemerintah dalam hal peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja yang sangat dibutuhkan seiring dengan berkembangnya tuntutan pasar kerja. Oleh karena itu pemerintah berupaya secara terus menerus

untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan produktivitas perusahaan.

Peningkatan produktivitas pada sektor masyarakat meningkatkan produktivitas lingkungan. Peningkatan pada sektor pemerintah meningkatkan produktivitas lembaga dan pada sektor swasta meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil peningkatan produktivitas perusahaan terbukti telah memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari para pekerja perusahaan itu sendiri sampai dengan konsumen. Peningkatan produktivitas perusahaan juga memberikan manfaat besar kepada pemerintah dalam hal peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja yang sangat dibutuhkan seiring dengan berkembangnya tuntutan pasar kerja. Oleh karena itu pemerintah berupaya secara terus menerus untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan produktivitas swasta seperti perusahaan, produktivitas pemerintah seperti lembaga, dan produktivitas masyarakat seperti lingkungan.

Produktivitas masyarakat pada lingkungan hidup dapat dilakukan secara lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya alam pada ekosistem secara produktif dan melakukan pelestarian lingkungan secara arif, maka dapat mewujudkan lingkungan yang produktif dengan kearifan lokal yang berkelanjutan.

2. DPD RI Akan Perjuangkan Pelestarian Kearifan Lokal

Ketua DPD RI mengatakan DPD RI akan menjalin kerjasama kemitraan dengan daerah-daerah lain pada sektor budaya. Terutama dalam rangka optimalisasi pelestarian nilai-nilai budaya kedaerahan. “DPD RI senantiasa akan memperjuangkan kebijakan yang mendukung pelestarian nilai-nilai budaya serta kearifan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya saat membuka acara Gebyar Budaya Betawi di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta (10/10).

Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh stakeholder untuk menyadari betapa pentingnya membangun

kebudayaan di daerah-daerah Indonesia. Karena budaya menjadi cerminan jati diri bangsa dalam memperkuat pondasi Pancasila. “Tujuannya bukan semata-mata memunculkan simbol tetapi dapat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individual, sosial maupun dalam lingkup institusi negara,” ucapnya.

Menurut Lanyalla, Pancasila yang sudah ada harus diperkuat baik secara sistematis dan metodologi. Salah satunya dalam penguatan budaya bangsa sehingga bisa berfungsi bagi kerja sosial sekaligus menopang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Ketua DPD RI mengatakan DPD RI akan menjalin kerjasama kemitraan dengan daerah-daerah lain pada sektor budaya. Terutama dalam rangka optimalisasi pelestarian nilai-nilai budaya kedaerahan. “DPD RI senantiasa akan memperjuangkan kebijakan yang mendukung pelestarian nilai-nilai budaya serta kearifan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya saat membuka acara Gebyar Budaya Betawi di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta (10/10).

Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh stakeholder untuk menyadari betapa pentingnya membangun kebudayaan di daerah-daerah Indonesia. Karena budaya menjadi cerminan jati diri bangsa dalam memperkuat pondasi Pancasila. “Tujuannya bukan semata-mata memunculkan simbol tetapi dapat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individual, sosial maupun dalam lingkup institusi negara,” ucapnya.

Menurut Lanyalla, Pancasila yang sudah ada harus diperkuat baik secara sistematis dan metodologi. Salah satunya dalam penguatan budaya bangsa sehingga bisa berfungsi bagi kerja sosial sekaligus menopang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Salah satunya Gebyar Budaya Betawi ini yang bertujuan penguatan bangsa. Bahkan, budaya juga mampu meningkatkan promosi pariwisata, budaya, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal. Harapan saya nanti acara ini bisa juga dilaksanakan di setiap provinsi,” ujar Lanyalla.

Senator dari Jawa Timur itu menyatakan bahwa penyelesaian dari semua masalah kebangsaan dan kenegaraan haruslah menyentuh aspek mendasar yaitu kebudayaan. Artinya, upaya pembangunan nasional dan sosial hanya upaya tambal sulam jika gagal menyentuh aspek mendasar. “Untuk itu kita harus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dari dasar yaitu kebudayaan,” terang Lanyalla.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Jakarta Sylviana Murni mengatakan tujuan kegiatan ini mencerminkan bahwa DPD RI menjadi Rumah Kebangsaan, alhasil kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat. Kedepan, DPD RI akan mengadakan event-event kebudayaan dari 34 provinsi yang ditampilkan di parlemen. “Jadi saya merasa bangga, Jakarta bisa menjadi pionir dari seluruh kebudayaan di setiap provinsi. Kita berencana akan mengadakannya di sini,” tuturnya.

Anggota Komite III berharap kedepan DPD RI harus terus memberikan penguatan kebangsaan agar terwujudnya tujuan nasional. Selain itu, dengan hadirnya kebudayaan dari setiap provinsi maka otomatis akan memperkuat NKRI. “Tentu saja basisnya adalah penguatan daerah itu sendiri, dengan kearifan lokalnya. Jika kita mampu melestarikan kearifan lokalnya seperti di Jakarta. Artinya, penguatan pilar-pilar dari bawah (budaya) maka NKRI memiliki kekuatan pondasi,” kata Sylviana.

F. Manfaat Kearifan Lokal Dalam Konteks Pembangunan Di Indonesia

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia—yang kita kenal sebagai Nusantara—kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan

seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip.

Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Secara faktual dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang sarat kebijakan dan filosofi hidup nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis. Korupsi yang merajalela hampir di semua level adalah bukti nyata pengingkaran terhadap kearifan lokal yang mengajarkan “bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”; “hemat pangkal kaya”.

2. Kearifan Lokal sebagai Identitas dan Ideologi Bangsa

Boni Hargens (2011) dalam tulisannya di *Kompas* menyatakan bahwa arus modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi semestinya tidak meniadakan suatu negara jatuh dalam percaturan global asal saja negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat.

Selain etika moral yang bersumber pada agama, di Indonesia juga terdapat kearifan lokal yang menuntun masyarakat kedalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Kita mengenal pepatah “gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit”, “bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian” yang mengimplikasikan ajakan untuk membangun etos kerja dan semangat untuk meraih keunggulan. Dalam hal keharmonisan sosial dan alam, hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. Dalam suku tertentu yang bermukim di pedalaman juga dikenal kearifan lokal yang bersifat menjaga dan melestarikan alam sehingga alam (misalnya kayu di hutan) hanya dimanfaatkan seperlunya, tidak dikuras habis.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak, semestinya Indonesia telah menjadi negara besar yang maju. Namun, di tingkat Asia Tenggara saja posisi kita di bawah Singapura yang miskin sumber daya alam dengan luas wilayah lebih kurang hanya seluas Jakarta. Sumber daya alam yang melimpah di negeri ini kadang-kadang juga tidak menjadi berkah. Gas alam diekspor ke luar negeri dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga jual untuk pasar dalam negeri. Hutan dieksploitasi secara luar biasa untuk mengejar perolehan devisa yang pada akhirnya hanya mendatangkan kerusakan ekosistem alam yang disusul dengan bencana (banjir;longsor).

Kebijakan ekonomi pemerintah acap kali hanya berpihak pada kepentingan pemodal kuat. Padahal, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945—yang oleh para pendiri republik ini diciptakan untuk mengakomodasi kearifan lokal yang ada di negeri ini (seperti gotong royong dan kekeluargaan)—dengan tegas mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam yang ada dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Secara faktual, dapat kita saksikan pertumbuhan *mini market* yang sangat subur yang mematikan warung rumah tangga.

Sementara itu, dalam masyarakat sendiri sering terjadi tindak kekerasan yang mereduksi nilai toleransi. Dalam konteks perubahan nilai sosiokultural juga terjadi pergeseran orientasi nilai. Masyarakat cenderung makin pragmatis dan makin berorientasi pada budaya uang serta terperangkap dalam gaya hidup konsumtif yang disodorkan kekuatan global kapitalisme.

Dalam realitas Indonesia kini, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kearifan lokal yang kita miliki mirip benda pusaka, yang kita warisi dari leluhur, kita simpan dan kita pelihara, tetapi kita tidak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehingga pusaka tersebut sia-sia merespons tantangan zaman yang telah berubah.

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal dan realitas Indonesia kini, *Kompas* edisi 20 April 2011 menampilkan dua tulisan yang

relevan, yakni “Saya Mohon Ampun” oleh Radhar Panca Dahana dan “Pembangunan Gerus Kearifan Lokal” oleh Wasisto Raharjo Jati. Dalam tulisannya, Radhar Panca Dahana mencemaskan perilaku para elit negeri ini yang antara sadar dan tidak sadar telah menjadi agen kepentingan dan keserakahan ekonomi dan politik negara maju (sehingga Indonesia hanya dijadikan sekadar pasar sambil dikuras habis sumber daya alamnya). Sementara itu, Wasisto Raharjo Jati mengemukakan bahwa pembangunan di Indonesia yang terpaku pada pertumbuhan ekonomi semata telah mengabaikan kearifan lokal dan menimbulkan potensi konflik vertikal dan horizontal di kemudian hari. Karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung pemerintah juga telah menjejalkan “budaya uang” sehingga cenderung mengurangi dan meniadakan kearifan dan budaya lokal.

Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya). Sekadar contoh, kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam telah menghasilkan pendopo dalam arsitektur Jawa. Pendopo dengan konsep ruang terbuka menjamin ventilasi dan sirkulasi udara yang lancar tanpa perlu penyejuk udara.

Pendopo adalah salah satu contoh bagaimana kearifan lokal warisan masa lampau telah memberikan kepada kita konsep arsitektur yang lega, nyaman, dan hemat energi. Sekarang ini, kita mempersoalkan krisis energi dan menyerukan hemat energi. Namun, gedung dan rumah dibangun dengan konsep bangunan tertutup sehingga memerlukan penyejuk udara yang boros energi.

Kearifan lokal dalam wujud gotong royong juga kita kenal di warung rakyat (misalnya warteg). Di warung tersebut dipraktikkan penggiliran pengelolaan warung sebagai implementasi nilai gotong royong dalam tata sosial dan ekonomi: memberi peluang kerja dan peluang mencari nafkah bagi kerabat dan warga sekampung; itu

adalah salah satu kearifan lokal warisan masa lampau yang masih diberlakukan oleh sebagian masyarakat.

Di negeri ini, ada sesuatu yang aneh dan janggal: kearifan lokal di tingkat akar rumput acap kali berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi (sehingga mengundang investor asing dan memberikan banyak kemudahan, termasuk dalam hal regulasi, sambil mengabaikan kearifan lokal yang tumbuh di akar rumput (Radhar Panca Dahana dan Wasisto Raharjo Jati, 2011).

Pancasila sebagai ideologi negara pada dasarnya telah mengkomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara (antara lain nilai gotong royong sehingga salah satu sila Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”). UUD 1945 (yang dijiwai oleh Pancasila) juga mengamanatkan hal yang sama, terutama dalam Pasal 33. Akan tetapi, saat ini Pancasila dapat dikatakan menjadi sekadar aksesori politik belaka.

Memaknai kearifan lokal tampaknya tidak dapat dipisahkan dari konstelasi global. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisinya yang strategis menjadikan Indonesia senantiasa menjadi incaran negara maju sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Hingga kini pun setelah pemerintahan berganti beberapa kali, pemerintah tidak dapat menunjukkan independensinya: banyak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan ekonomi dan politik global daripada berpihak pada kepentingan rakyat dalam negeri. Tentang hal itu dapat dibaca tulisan Radhar Panca Dahana (2011) yang secara satiris mengatakan bagaimana kekuasaan pemerintahan telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan ekonomi global.

Kearifan lokal (yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai identitas bangsa) tidak akan bermakna apa pun tanpa dukungan ideologi yang berpihak kepadanya. Dalam konstelasi global, ketika perang dingin telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet (dan negara yang masih menganut Marxisme pun telah menerapkan sistem ekonomi kapitalistik seperti Cina dan Vietnam), tanpa ideologi yang berpihak pada kepentingan nasional, kita akan semakin kehilangan

identitas dalam percaturan global dan hanyut dalam arus globalisasi yang “didikte” oleh negara maju.

3. Kearifan Lokal: antara Pusaka dan Senjata

Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang tidak hanya terdapat dalam sastra tradisional (sastra lisan atau sastra tulis) sebagai refleksi masyarakat penuturnya, tetapi terdapat dalam berbagai bidang kehidupan nyata, seperti filosofi dan pandangan hidup, kesehatan, dan arsitektur. Dalam dialektika hidup-mati (sesuatu yang hidup akan mati), tanpa pelestarian dan revitalisasi, kearifan lokal pun suatu saat akan mati. Bisa jadi, nasib kearifan lokal mirip pusaka warisan leluhur, yang setelah sekian generasi akan lapuk dimakan rayap. Sekarang pun tanda pelapukan kearifan lokal makin kuat terbaca.

Kearifan lokal acap kali terkalahkan oleh sikap masyarakat yang makin pragmatis, yang akhirnya lebih berpihak pada tekanan dan kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh, di salah satu wilayah hutan di Jawa Barat, mitos pengeramatan hutan yang sesungguhnya bertujuan melestarikan hutan/alam telah kehilangan tuahnya sehingga masyarakat sekitar dengan masa bodoh memabat dan mengubahnya menjadi lahan untuk berkebun sayur (*Kompas*, 23 April 2011). Ungkapan Jawa tradisional *mangan ora mangan waton kumpul* (‘biar tidak makan yang penting berkumpul [dengan keluarga]’) sekarang pun makin kehilangan maknanya: banyak perempuan di pedesaan yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk bekerja di mancanegara dengan risiko terpisah dari keluarga daripada hidup menanggung kemiskinan dan kelaparan.

Kearifan lokal hanya akan abadi kalau kearifan lokal terimplementasikan dalam kehidupan konkret sehari-hari sehingga mampu merespons dan menjawab arus zaman yang telah berubah. Kearifan lokal juga harus terimplementasikan dalam kebijakan negara, misalnya dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal kita. Untuk mencapai itu, perlu implementasi ideologi negara (yakni Pancasila) dalam berbagai kebijakan negara. Dengan

demikian, kearifan lokal akan efektif berfungsi sebagai senjata—tidak sekadar pusaka—yang membekali masyarakatnya dalam merespons dan menjawab arus zaman.

Revitalisasi kearifan lokal dalam merespons berbagai persoalan akut bangsa dan negara ini, seperti korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial hanya akan berjalan dengan dukungan kebijakan negara dan keteladanan. Tanpa itu, kearifan lokal hanya merupakan aksesori budaya yang tidak bermakna. Kearifan lokal di banyak daerah pada umumnya mengajarkan budaya malu (jika berbuat salah). Akan tetapi, dalam realitas sekarang, budaya malu itu telah luntur. Peraturan yang ada pun kadang-kadang memberi peluang kepada seorang terpidana atau bekas terpidana untuk menduduki jabatan publik. Jadi, budaya malu sebagai bagian dari kearifan lokal semestinya dapat direvitalisasi untuk memerangi korupsi, apalagi dalam agama pun dikenal konsep halal—haram (uang yang diperoleh dari korupsi adalah haram).

Di antara berbagai penggerusan kearifan lokal saat ini, di sisi lain kita masih menyaksikan pemanfaatan kearifan lokal, misalnya di dunia medis terjadi pengembangan obat herbal yang merupakan warisan leluhur di bidang medis yang kemudian disempurnakan dengan standar farmakologi yang berlaku. Jadi, itu adalah salah satu wujud kearifan lokal yang telah memperoleh revitalisasi dalam masyarakat.

Di tengah derasny arus investasi asing di bidang kuliner yang merambah ke negeri ini (seperti Kentucky Fried Chicken, Mc Donald, dan Pizza Hut), kita masih dapat menyaksikan menu kuliner lokal (masakan Sunda, Padang, dan Yogya) tetap eksis dan sebagian hadir dalam tata kelola restoran modern. Itu adalah revitalisasi kearifan lokal di bidang kuliner.

Sementara itu, gotong royong sebagai wujud kearifan lokal kita tampaknya belum terimplementasikan dalam perekonomian nasional yang makin didominasi oleh asing dan perusahaan multinasional dengan semangat neoliberalisme dan neokapitalisme. Perekonomian nasional yang berpijak dan tumbuh dari rakyat

setidaknya mencerminkan identitas dan nasionalisme kita. Ketergantungan ekonomi pada asing akan menyebabkan kita dengan mudah didikte oleh kekuatan ekonomi dan politik asing dan hal itu akan mencederai kedaulatan kita sebagai bangsa.

4. Kebudayaan sebagai Pendorong Pembangunan Nasional

Indonesia memiliki tradisi dan sumber pengetahuan lokal yang sangat kaya dan hidup. Kedua hal tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk membantu melaksanakan rencana pembangunan nasional”, ujar Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dalam sambutannya di seminar nasional pada tanggal 4 April 2017 tentang “Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional”, yang diselenggarakan oleh Bappenas dan didukung oleh KSI.

Kebudayaan harus dianggap sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Bapak Menteri menggarisbawahi bahwa Indonesia hanya dapat menjadi bangsa yang besar apabila mampu mengejawantahkan kebudayaan ke dalam pembangunan nasional.

Seminar tersebut diselenggarakan untuk mewujudkan pembuatan kebijakan yang lebih baik dalam pembangunan nasional, yang tidak meninggalkan kearifan lokal, dimana hal tersebut telah diperoleh dan dikumpulkan selama bertahun-tahun melalui pengalaman langsung, dan tercermin dalam ekspresi kebudayaan. Kearifan lokal dapat memberikan masukan yang signifikan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional tanpa memicu perlawanan lokal.

Pembangunan nasional bukanlah hanya terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tapi juga peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, memahami kebudayaan lokal merupakan sesuatu yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam sektor pendidikan, misalnya, kurikulum nasional belum tentu cocok untuk diterapkan di komunitas

atau suku lokal tertentu. Saur “Butet” Marlina Manurung adalah seorang antropolog dan ahli pendidikan, dan dalam presentasinya mengatakan bahwa bagi anak-anak dari suku terpencil, pendidikan bukanlah untuk mengejar nilai yang tinggi. Pendidikan bagi mereka berarti memperoleh dan menguasai hal-hal untuk membela diri dan lingkungan mereka agar tidak dieksploitasi. Sokola Rimba yang didirikannya merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan program literasi dan advokasi bagi Masyarakat Adat dan Terpinggirkan di seluruh nusantara. Melalui pendidikan dari sudut pandang berbeda, mereka dapat mewariskan kebudayaan dan kearifan mereka ke generasi berikutnya. Lagu daerah, serta norma dan nilai tradisional, dapat ditulis dan didokumentasikan dalam bahasa ibu mereka sendiri.

Melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam lima tahun terakhir, Banyuwangi telah berhasil mendorong perekonomiannya dengan memanfaatkan kebudayaan, melalui berbagai acara dan perayaan. Pada 2012, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyelenggarakan 12 acara kebudayaan, sedangkan di tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 70 acara kebudayaan kepada turis lokal dan asing. Peningkatan pariwisata ini telah membuat pendapatan asli daerah Banyuwangi melonjak, sehingga meningkatkan perekonomian setempat, dari salah satu PDB per kapita terendah di Jawa Timur, menjadi tiga teratas hanya dalam lima tahun. Contoh lain bagaimana kebudayaan dapat mendongkrak perekonomian ke arah yang lebih baik dapat dilihat di Bali, yang sudah sangat terkenal di dunia, kebudayaan batik Jawa, dan Karnaval Busana Jember atau *Jember Fashion Carnival* (JFC), yang telah menelurkan puluhan Karnaval lain di seluruh negeri. Pimpinan karismatik JFC, Dynand Fariz, membawakan presentasi penuh warna terkait bagaimana kebudayaan dapat digunakan untuk menyokong pariwisata dan sektor usaha.

Kisah keberhasilan Banyuwangi dan Jember dapat diadaptasi dan direplikasi di daerah lain di Indonesia, dalam rangka membantu mewujudkan pembangunan nasional lewat kebudayaan. Karena setiap daerah memiliki kebudayaan uniknya masing-masing, replikasi ini sebaiknya difokuskan pada metodenya, seperti penggunaan teknologi informasi. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak memperbolehkan pengembang untuk membangun pusat perbelanjaan modern dalam Kabupaten. Sebaliknya, pemerintah daerah telah membangun mal daring yang menjual berbagai produk lokal. Hal ini menarik tidak hanya pembeli domestik, tapi juga internasional.

Di tingkat nasional, tantangan untuk menggabungkan kebudayaan ke dalam pembangunan nasional berada pada aspek koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam isu-isu terkait kebudayaan. Ini adalah salah satu isu penting yang dibahas dalam seminar tersebut. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan bahwa pemerintah harus juga memberikan perhatian kepada praktisi kebudayaan di wilayah terpencil, dan tidak hanya fokus pada mereka yang tinggal di kota-kota besar.

Pemerintah harus berperan aktif dalam melindungi, mengelola, dan memberikan arahan dan strategi untuk memanfaatkan kebudayaan sebagai aset pembangunan nasional. Menurut Melani Budianta, Profesor Kajian Kebudayaan Universitas Indonesia, pemerintah juga harus mampu menentukan sasaran dari pembangunan nasional berbasis kebudayaan. Prinsip dasarnya, ujar Budianta, adalah melalui kebijakan inklusif yang non-diskriminatif, berdasarkan partisipasi masyarakat lokal. Kebijakan yang demikian menjamin tidak seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Ia juga mendorong agar setiap daerah mengembangkan potensi kebudayaannya sendiri dan membangun sinergi kebudayaan antar warga masyarakat yang dapat memberikan wawasan berharga kepada pemerintah terkait arah dari pembangunan nasional. Menggabungkan kebudayaan ke dalam pembangunan merupakan cara untuk

membentuk dan melestarikan identitas Indonesia sebagai bangsa dengan kebudayaan yang kaya raya

G. Sinergitas Pembangunan Di Balutan Kearifan Lokal

1. Ancaman Ekologis dan Sosial Budaya Masyarakat Sumba ekapur Sirih

Pulau Sumba terletak di Barat-Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 96 KM di sebelah selatan pulau Flores 295 di sebelah barat daya pulau Timor dan 1.125 km di sebelah barat laut Darwin, Australia. Pulau Sumba berada pada busur luar kepulauan Nusa Tenggara Timur dan pada busur tersebut pulau Sumba terletak antara pulau Sumbawa dan Pulau Timor. Secara astronomis Sumba Timur membentang antara 11945'-120° BT dan 9°16'-10°20' LS.

Luas Kabupaten Sumba Timur adalah 7000,5 km² atau 7000, 500 Ha, dengan bagian terbesar adalah daratan bagian Timur Pulau Sumba, dan empat pulau kecil yaitu Pulau Salura (03,50 km²), Pulau Mengkudu (0,2 km²), Pulau Kotak (01,00 km²), dan Pulau Nusa (0,55 km²). (*Sumber; pemma kab. Sumba Timur*).

Kabupaten Sumba Timur seperti daerah lainnya di NTT terus bergerak- berubah- berkembang dengan irama sendiri. Bumi belahan Timur marapu, Sumba Timur adalah fakta, adalah masalah, adalah harapan.

Sebagai fakta dan masalah, betapa perjalanan sangat panjang telah dilalui dengan berjuta kendala pembangunan. Sebagai harapan justru di tengah berjuta kendala pembangunan itulah berbagai kiat dan upaya maksimal terus dipacu demi Sumba Timur yang makmur-sejahtera, bahagia seperti dipaterikan baitan adatnya ; Matawai Amahu Pada Njara Hamu.

Baitan adat yang sangat filosofis sungguh mencambuk secara konstruktif, bagaimana karakter geografis jadi pijakan tuntutan. Betapa bumi air Sumba Timur itu sendiri menurut Dr. Robert Lawang adalah sumber energi sosial positif, seperti juga daerah lain di NTT.

Sumba Timur dengan sungai-sungainya, dengan perairan laut yang mengitari bagian utara selatan dan timur plus sejumlah pulau-

pulau kecilnya, dengan daratan yang berbukit – bergelombang atau daratan yang luas membentang adalah sumber energi sosial positif itu.

Pelajaran dari masa lalu, Catur Program Pembangunan Sumba Timur dengan pola pendekatan Humanis dituaskan sebagai kiat operasional fungsional, penajamannya dengan penjabarannya, dengan sangat memperhatikan kearifan lokal. Sumba Timur ternyata tidak hanya melekat dengan kebudayaan marapu yang begitu mengakar tetapi juga dengan ramuan-menu kebudayaan dari luar/seberang seperti Arab, Cina, Jawa, Bima, Sabu, Ende/Flores. Sumba Timur telah terbuka sudah sejak dahulu kala dan akan terus terbuka, semakin menganga-melebar dan menantang. Sejarah pembangunan Sumba Timur tidak lagi dalam balutan budaya dan filosofi “*Matawai Amahu Pada Njara Hamu*”, catatan punulis kali ini coba melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana penataan pembangunan Sumba Timur berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal yang semakin tergerus arus perkembangan teknologi.

Fakta dan masalah seperti pada catatan di atas menunjukkan bahwa pemimpin terdahulu sudah jauh memikirkan bagaimana membangun Sumba Timur dengan pendekatan berbasis humanis-kearifan lokal. Namun, fakta hari ini jauh keluar dari jalan menuju Matawai Amahu Pada Njara Hamu.

Semaraknya peternakan yang menjadi karakter Sumba Timur tidak lagi dirasakan hingga generasi saat ini, bagaimanapun sejarah Sumba Timur dalam dunia perternakan dahulu kala mendapat pujian yang luar biasa. Masih teringat ketika orang-orang Sumba dulu menyebut nama rerumputan di padang sabana mereka dengan sebutan khas seperti *Mapoe mbelar pingi*, *Mapoe rara*, *Mapoe bara*, *Roemba mini*, *Mapoe pendji*, *Kamala litap* dan masih banyak lagi sebutan budayanya.

2. Padang penggembalaan Ternak (Hilang) Vs Perkebunan Tebu (Hadir)

Sebagai bumi peternakan, Sumba Timur mempunyai lahan penggembalaan yang sangat karakteristik, Sumba Timur adalah daerah padang penggembalaan yang membukit-mengelombang

dengan hamparan daratan di berbagai tempat. Sejauh-jauh mata memandang. Sumba Timur memiliki luas padang penggembalaan 215.797 Ha yang dialiri sekitar 88 buah sungai utama. Tanah tandus 12.521 Ha, semak/padang/alang 592,152,14 Ha. Yang lainnya hutan 66.199,86 Ha, Kebun 21.391, 76 Ha, sawah 2.982,74 Ha dan desa/kota 4.796, 5 Ha. Dan memiliki 33 jenis rumput yang sangat berguna bagi ternak. (Sumber : Dinas Peternakan Kab. Sumba Timur, 2002)

Dalam beberapa tahun terakhir sektor peternakan di kabupaten Sumba Timur semakin berkurang. Banyak faktor yang mempengaruhi sektor ini salah satunya akibat adanya alih fungsi lahan padang penggembalaan ternak menjadi ladang perkebunan tebu yang sampai saat ini masih terus dipertanyakan kehadirannya oleh masyarakat Sumba Timur.

Dalam pengamatan penulis ruang wilayah kelola rakyat hari ini semakin sempit akibat adanya alih fungsi lahan oleh PT. MSM. Dahulunya padang difungsikan sebagai tempat penggembalaan ternak kini tidak lagi bisa diakses secara baik oleh peternak. Belum lagi persoalan daya dukung lingkungan yang tentu saja mengalami dampak dari alih fungsi lahan tersebut.

➤ **Potret Buruh Perkebunan Tebu**

Dembi Tamar (45) seorang perempuan yang berprofesi sebagai buruh harian lepas perkebunan tebu PT. Muria Sumba Manis di Desa Matawai Maringu, Kabupaten Sumba Timur adalah potret nyata betapa ironisnya kehidupan buruh yang hak-haknya diabaikan oleh perusahaan. (Baca; *“Bau Amis” dibalik manisnya Gula*). Dembi Tamar dahulunya seorang patani yang kini beralih profesi menjadi buruh diperkebunan tebu harus menahan penderitaan selama 21 bulan di rumahnya.

Kasus kecelakaan yang dialami Dembi Tamar saat sedang bekerja di kebun tebu yang kemudian tidak mendapatkan perhatian dan akses dari perusahaan menjadi catatan buruk sejarah investasi di kabupaten Sumba Timur. Inilah gambaran umum kasus yang terjadi di perkebunan tebu. Dan masih banyak lagi kasus baik itu

pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, hilangnya situs-situs budaya Sumba.

➤ **Peternak yang Kehilangan Padang Penggembalaan**

Ekspansi perkebunan tebu PT. Muria Sumba Manis 52.000 Ha menjadi ancaman serius keberlanjutan ekologis dan ruang wilayah kelola rakyat. Di atas penulis sudah menggambarkan secara umum sektor-sektor unggulan yang seharusnya tidak diganggu dengan berbagai model pendekatan pembangunan yang baru (*bukan dalam arti menolak*) yang bila dilihat secara detail, strategi pembangunan (*investasi perkebunan*) ini belum disiapkan secara matang oleh pihak pemerintah terkait dampak dari kebijakan tersebut.

Tiga tahun terakhir di Sumba Timur begitu maraknya investasi perkebunan monokultur seperti tebu dan lain-lain menjadi salah satu faktor utama munculnya berbagai konflik antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Bahkan bisa dianalisa alih fungsi lahan ini menjadi biang kerok berkurangnya lahan dan ternak di kabupaten Sumba Timur.

Data Dirjen Planologi kehutanan merilis jumlah hutan primer di Sumba Timur pada tahun 2009 hanya 4,5 persen dari total luas daratan. Perkebunan tebu PT. MSM di kabupaten Sumba Timur-NTT memiliki wilayah konsesi seluas 52.000 Ha konsesi perusahaan ini berada di 30 Desa di 6 Kecamatan di Sumba Timur.

Potret masyarakat peternak Sumba Timur kini tidak bisa kita temui seperti dahulu kala, ada perubahan dan pergeseran yang begitu besar terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Tersingkirnya petani/peternak dari tanahnya untuk digiring menjadi buruh industri yang murah menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat Sumba saat ini.

Berawal dari sinilah konflik agraria dan kemiskinan terus berakumulasi menjadi bibit-bibit lahirnya gejolak sosial yang lebih luas. (*perjalanan yang belum berakhir*). Krisis ekologis yang dirasakan saat ini dari kehadiran perkebunan tebu sudah semakin masif, daya dukung lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas tidak lagi menjadi refrensi dari industri perkebunan di pulau Sumba.

Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi, seperti ketika perusahaan memakai hutan lindung *Mbula* di Desa Wangi lewat dinas Kehutanan melalui mekanisme Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Hutan lindung *Mbula* merupakan sumber kehidupan masyarakat sekitar pesisir, bukan saja manfaat ekonomi dan ekologis, namun manfaat sosial budaya pun kian terancam hilang akibat konsesi lahan perkebunan. Inilah fakta dimana pemerintah daerah pun mengaminkan keinginan perusahaan tanpa memikirkan dampak sosial bagi masyarakat yang bergantung pada alam.

Air yang terdapat dalam hutan *Mbula* dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengairi perkebunan tebu, disisi lain daya dukung lingkungan tidaklah cukup seperti data yang dirilis oleh sebuah lembaga akademis menyatakan bahwa kebutuhan air untuk perkebunan tebu rata-rata dalam sehari mencapai 7.500 meter kubik. Ini jumlah yang sangat besar. Kondisi pulau Sumba yang rentan dengan perubahan iklim kini menjadi perhatian serius untuk memulihkan tanah ini dengan cara yang bijaksana.

Keseimbangan manusia dengan alam perlu dijaga dengan perilaku dan karakter pembangunan yang ramah terhadap lingkungan sekitar. Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan haruslah berpijak pada nilai dan budaya pelestarian. Kelestarian budaya, nilai dan lingkungan di Sumba tentu membutuhkan sentuhan kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur baru NTT.

BAB 11

KEPEMIMPINAN GLOBAL DI LAUTAN KEARIFAN LOKAL

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global yang semakin meningkat dewasa ini menuntut perusahaan atau organisasi untuk mampu menangkap peluang bisnis baik secara lokal maupun internasional. Perekonomian global dengan segala pernik-perniknya banyak menawarkan dampak yang positif terutama terjadinya interaksi antara negara dengan perekonomian yang telah maju dengan negara-negara dengan perekonomian yang sedang berkembang. Interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama ekonomi sehingga mampu membawa manfaat seperti pengenalan teknologi baru, adanya akses ke pasar baru dan terjadinya penciptaan industri baru.

Kunci utama untuk memenangkan persaingan di pasar global dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan menciptakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Selain itu juga dalam era globalisasi suatu perusahaan juga dituntut untuk mampu melakukan praktek-praktek manajemen yang berorientasi pada keterbukaan (*transparency*), fokus pada perubahan, berinovasi secara terus menerus dan mampu mengembangkan kepemimpinan yang bersifat kolektif. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mampu menerapkan praktek-praktek manajemen yang berorientasi pada keterbukaan dan terciptanya sistem tata kelola yang baik (*good corporate governance*) maka diperlukan sistem pengelolaan perusahaan yang melibatkan seluruh komponen perusahaan khususnya komponen sumber daya manusia (*human resources*). Peran sumber daya manusia sebagai aset berharga (*valuable asset*) dan sebagai motor penggerak perusahaan sangat diperlukan. Peran dan fungsi yang dituntut dari sumber daya manusia bukan pada peran-peran yang bersifat mendasar dan tradisional seperti *recruitment* dan *staffing* namun lebih kepada peran dan fungsi yang bersifat bisnis dan strategis seperti sebagai partner bisnis (*business partner*) dan bagian dari anggota team manajemen (*management team member*).

Kepemimpinan merupakan faktor penting yang mempengaruhi inovasi organisasi. Inovasi melalui kreativitas merupakan faktor penting bagi keberhasilan dan keunggulan kompetitif organisasi. Kepemimpinan telah menjadi diakui sebagai adanya kepatuhan. Kepemimpinan memberikan makna bagi mereka dalam institusi dengan mendefinisikan dan yang mendukung nilai-nilai organisasi. Organisasi yang sukses memerlukan kepemimpinan dan manajemen, tetapi ini tidak perlu selalu digabungkan dalam satu pribadi. Kedua kepemimpinan dan manajemen dapat tersebar dalam sebuah organisasi. Ada bukti bahwa kepemimpinan suportif secara positif terkait dengan pembelajaran organisasi dan inovasi. Hal ini memungkinkan dukungan kepemimpinan pembangunan tim dan memberikan mereka arah, energi, dan dukungan untuk proses perubahan serta kohesi meningkat (Hsiao, H. C., and Jen-Chiang Chang, 2011).

Menurut Kauppinen, Kepemimpinan dan kekuasaan terkait satu sama lain dalam berbagai cara. Kepemimpinan mengacu pada kekuasaan publik, yaitu posisi orang dalam organisasi dan masyarakat yang memberikan mereka berarti untuk menggunakan kekuasaan atas individu lain, kelompok, dan organisasi. Kepemimpinan didefinisikan sebagai pengaruh pribadi atas orang lain, yaitu yang berpengaruh pada perilaku mereka dengan tujuan hasil yang lebih baik dalam pekerjaan mereka. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan adalah kegiatan yang bermuatan nilai, sedangkan manajemen lebih berorientasi praktis. Manajemen lebih lanjut tentang pengendalian dan administrasi, sedangkan kepemimpinan adalah tentang inovasi dan inspirasi. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa orang pemimpin memimpin, sedangkan manajer mengelola tugas. Namun, dua melakukan tumpang tindih, dan sering sulit untuk kepemimpinan yang terpisah dari manajemen. Tidak ada manajemen tanpa kepemimpinan dan begitu pula sebaliknya.

Konsep kepemimpinan telah diteliti pada berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan untuk pengembangan organisasi, dan para

pemimpin telah mempelajari hal yang berhubungan dengan kualitas, kompetensi, serta perilaku yang membuat mereka "besar". Diskusi tentang kepemimpinan telah membuat perbedaan antara pendekatan transaksional dan transformasional. Pandangan transaksional berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan yang dipimpin. Pandangan ini sesuai dengan teori sifat perspektif yang berargumen bahwa kepemimpinan hanya berdasarkan karakteristik individu orang tersebut. Perspektif ini telah ditolak dan sifat-sifat sendiri telah terbukti menjadi prediktor buruk dari munculnya pemimpin dan kinerja organisasi. Kepemimpinan transformasional adalah perspektif yang lebih inklusif dan memfokuskan perhatian pada proses "menjadi" seorang pemimpin, namun masih tetap fokus pada perpindahan individu dari pengikut menjadi pemimpin (Hoyt, M.A *et al*, 2008).

Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Beberapa isu penting dalam 20 tahun terakhir adalah proliferasi dari metode pengembangan kepemimpinan dan pentingnya resonansi emosional seorang pemimpin dengan atau dampak pada orang lain. Pemimpin berwawasan global mampu menjaga dan memberdayakan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur lokal.

B. Pembahasan

Menurut Anonim (2008), Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (inner peace) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir

menjadi pemimpin sejati. Jadi pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal (*leadership from the inside out*).

Kepemimpinan tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan pekerjaan, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya. *"I don't think you have to be waering stars on your shoulders or a title to be leadar. Anybody who want to raise his hand can be a leader any time"*,dikatakan dengan lugas oleh General Ronal Fogleman,Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat.

Seorang pemimpin sejati tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang dipimpinnya. Bahkan ketika misi atau tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri. Pemimpin sejati adalah seorang pemberi semangat (encourager), motivator, inspirator, dan maximizer.

Konsep pemikiran seperti ini adalah sesuatu yang baru dan mungkin tidak bisa diterima oleh para pemimpin konvensional yang justru mengharapkan penghormatan dan pujian (*honor & praise*) dari mereka yang dipimpinnya. Kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang didasarkan pada kerendahan hati (humble). Pelajaran mengenai kerendahan hati dan kepemimpinan sejati dapat kita peroleh dari kisah hidup Nelson Mandela. Seorang pemimpin besar Afrika Selatan, yang membawa bangsanya dari negara yang rasialis menjadi negara yang demokratis dan merdeka.Selama penderitaan 27 tahun penjara pemerintah Apartheid, justru melahirkan perubahan dalam diri Beliau. Sehingga Beliau menjadi manusia yang rendah hati dan mau memaafkan mereka yang telah membuatnya menderita selama bertahun – tahun.

Kenneth Blanchard mengatakan bahwa kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya.

Perubahan karakter adalah segala – galanya bagi seorang pemimpin sejati. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, dan visi serta misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati.

Menurut Anonim (2008), sebuah jenis kepemimpinan yaitu Q Leader memiliki 4 makna terkait dengan kepemimpinan sejati, yaitu:

1. Q berarti kecerdasan atau *intelligence*. Seperti dalam IQ berarti kecerdasan intelektual, EQ berarti kecerdasan emosional, dan SQ berarti kecerdasan spiritual. Q leader berarti seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan IQ, EQ, SQ yang cukup tinggi.
2. Q leader berarti kepemimpinan yang memiliki kualitas (*quality*), baik dari aspek visioner maupun aspek manajerial.
3. Q leader berarti seorang pemimpin yang memiliki qi (dibaca ‘chi’ dalam bahasa Mandarin yang berarti kehidupan).
4. Q qolbu atau *inner self*. Seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang sungguh– sungguh mengenali dirinya (qolbunya) dan dapat mengelola dan mengendalikannya (*self management*).

Seorang pemimpin Q berarti menjadi seorang pemimpin yang selalu belajar dan bertumbuh senantiasa untuk mencapai tingkat atau kadar Q (intelligence-quality-qi-qolbu) yang lebih tinggi dalam upaya pencapaian misi dan tujuan organisasi maupun pencapaian makna kehidupan setiap pribadi seorang pemimpin.

Rangkuman kepemimpinan Q dalam 3 aspek penting yang disingkat menjadi 3C, yaitu:

1. Perubahan karakter dari dalam diri (*character chage*).
2. Visi yang jelas (*clear vision*).
3. Kemampuan atau kompetensi yang tinggi (*competence*).

Ketiga hal tersebut dilandasi oleh suatu sikap disiplin yang tinggi untuk senantiasa bertumbuh, belajar dan berkembang baik secara internal (pengembangan kemampuan intrapersonal, kemampuan teknis, pengetahuan,dll) maupun dalam hubungannya dengan orang lain (pengembangan kemampuan interpersonal dan metode kepemimpinan). Seperti yang dikatakan oleh John Maxwell, *“The only way that I can keep leading is to keep growing. The the day I stop growing, somebody else takes the leadership baton. That is way it always it.”*

Menurut Broome *et al.*, kepemimpinan menawarkan dukungan kinerja dan aplikasi keterampilan melalui suatu metode seperti program pelatihan, *coaching* dan *mentoring*, pembelajaran tindakan, dan tugas perkembangan. Menggabungkan instruksi dengan pengaturan bisnis yang nyata membantu orang mendapatkan keterampilan penting dan memungkinkan organisasi untuk menyerang yang relevan, penting, *real-time* isu. Tujuan dari pengembangan kepemimpinan akhirnya melibatkan pengetahuan. Oleh karena itu, pengembangan berarti memberikan kesempatan orang untuk belajar dari pekerjaan mereka daripada membawa mereka dari pekerjaan mereka untuk belajar. Hal tersebut penting untuk mengintegrasikan pengalaman satu sama lain dan dengan metode yang berkembang lainnya. Negara pengembangan kepemimpinan seni sekarang terjadi dalam konteks pekerjaan yang sedang berlangsung inisiatif yang terkait dengan imperatif bisnis strategis. Program pelatihan tak lagi ada penekanan dari manajemen senior. Rancangan program melibatkan kelompok-kelompok kerja (horisontal) atau beberapa organisasi (vertikal).

Beberapa kecenderungan terjadi memiliki peran utama dalam memahami masa depan, praktek kepemimpinan dan pengembangan kepemimpinan. Peran kritis perubahan konteks dalam pengembangan kepemimpinan adalah

1. Kompetensi kepemimpinan.
2. Globalisasi / internasionalisasi kepemimpinan konsep, konstruksi, dan pengembangan metode

3. Peran teknologi
4. Meningkatkan minat dalam integritas dan karakter pemimpin;
5. Tekanan untuk menunjukkan laba atas investasi;
6. Cara berpikir tentang sifat kepemimpinan dan pengembangan kepemimpinan.

Pemimpin didefinisikan sebagai karisma ketika orang mengikuti seseorang karena dia dianggap luar biasa atau berkualitas. Menurut Ruyadi, Y (2010). Karisma muncul dari pancaran kualitas kepribadian yang sangat dikagumi oleh kebanyakan orang, seperti jujur, dapat dipercaya, tegas, konsisten, pemberani, dan cerdas. "Semua ini dapat membangkitkan lahirnya 'pesona gaib', yakni kekuatan-kekuatan yang bersifat gaib dan luar biasa yang diberikan hanya kepada segelintir manusia untuk memilikinya

Menurut Carmeli, A *et al.* (2011), kekuasaan pemimpin bertujuan untuk mengembangkan sebuah tim untuk memimpin tanpa kehadiran pemimpin formal dan untuk mendukung otonomi tim tersebut. Hal tersebut mirip dengan kepemimpinan partisipatif, yang "melibatkan penggunaan prosedur pengambilan keputusan, orang lain dapat memungkinkan terpengaruh atas keputusan pemimpin". Salah satu bentuk partisipatif kepemimpinan adalah partisipasi konsultatif yang hanya untuk demokrasi di tempat kerja, kekuasaan pimpinan muncul ketika CEO mendorong anggota *The Top Management Team* (TMT) melakukan kontrol terhadap proses keputusan dan memfasilitasi mereka melaksanakan keputusannya. Pelaksanaan kontrol tidak melibatkan konsultasi saja, tetapi berbagi kewenangan keputusan dengan anggota dan mendorong mereka untuk mempengaruhi satu sama lain, biasanya melalui pengambilan keputusan dalam interaksi kelompok, tetapi juga di luar konteks pertemuan TMT.

CEO yang secara konsisten menunjukkan memberdayakan kepemimpinan memfasilitasi integrasi perilaku TMT dan dengan cara ini mereka secara tidak langsung mengembangkan keyakinan potensi

tim yang menguntungkan di antara anggota. Potensi tim didefinisikan sebagai anggota "keyakinan umum tentang kemampuan tim pada seluruh tugas dan konteksnya". Potensi tim bukan tentang kemampuan kelompok yang sebenarnya, melainkan mengacu pada persepsi kelompok tentang kemampuannya untuk keberhasilan mengatasi tantangan dan melakukan tugas. Pemimpin memainkan peran utama dalam menanamkan efektivitas pada karyawan dan menginspirasi mereka untuk percaya pada kemampuan untuk berhasil melaksanakan tugas pekerjaan.

Integrasi perilaku merupakan variabel antara yang membantu untuk menjelaskan keefektifan yang relatif dari TMT untuk mempengaruhi kinerja perusahaan. Pertama, pemimpin memanfaatkan komunikasi untuk keyakinan bahwa tim dapat mencapai tujuan utama kolektif. Kepercayaan dari pemimpin mendorong anggota untuk lebih percaya sepenuhnya pada kemampuan tim. Kedua, memberdayakan perilaku pemimpin model kolaboratif dan mendorong pengikut secara bersama berkomitmen untuk tujuan kelompok. Ketiga, para pemimpin memperkuat peningkatan perilaku kerja sama antara anggota tim melalui pembujukan verbal dan permohonan persisten atas kolaborasi. Anggota tim berwenang mengembangkan kepercayaan diri bahwa mereka dapat berkolaborasi dengan sukses tanpa tergelincir oleh destruktif intra-tim konflik. Hasil dari berbagai pengaruh positif pada perilaku kolaboratif tim adalah keberhasilan kerjasama tersebut meningkatkan potensi kepercayaan tim.

Sementara itu zaman telah berubah, tantangan kehidupan global sudah terasa dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak jarang globalisasi juga melahirkan eksese negatif terhadap melemahnya kearifan budaya lokal. Globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan di bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi membawa negara-negara di dunia masuk ke dalam sistem jaringan global, satu dunia telah mengubah menuju peradaban dunia baru. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi

bangsa Indonesia sebab dengan kecanggihan teknologi itu seluruh informasi yang datang dari berbagai belahan dunia dapat diakses langsung di mana saja dan kapan saja. Apabila tidak diantisipasi dengan memperkuat filter budaya dan agama, maka globalisasi akan dapat merugikan terhadap eksistensi nilai-nilai budaya bangsa.

Nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat di Indonesia sudah merupakan milik bangsa sebagai potensi yang tak ternilai harganya untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Menurut Anonim (2008), kearifan lokal yaitu *spirit local genius* yang disepadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, kilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan berkenaan dengan penyelesaian masalah yang relative pelik dan rumit. Dalam suatu local (daerah) tentunya selalu diharapkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang (harmonis). Kehidupan yang penuh kedamaian dan suka cita. Kehidupan yang dipimpin oleh pimpinan yang dihormati bawahannya. Kehidupan yang teratur dan terarah yang dipimpin oleh pimpinan yang mampu menciptakan suasana kondusif. Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah. Serangkaian masalah tidaklah boleh didiamkan. Setiap masalah yang muncul haruslah diselesaikan. Jiwa kepemimpinan akan mampu menanggulangi setiap masalah yang muncul. Tiga hal untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan:

1. Kepemimpinan dapat dibina, seperti pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, kita dapat memupuk kondisi-kondisi yang menimbulkan kepemimpinan adat, khususnya nilai pemikiran kemandirian. Alasan utama mengapa globalisasi adalah disfungsiional bagi negara berkembang adalah bahwa hal itu menumbuhkan semacam ketergantungan antitesis terhadap munculnya kepemimpinan adat. Pembinaan kepemimpinan tergantung secara signifikan pada konteks: itu adalah orang yang dalam situasi tersebut membangkitkan kepemimpinan.

2. Orang dapat dikembangkan. Bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai manusia, dalam keyakinan dan perilaku mereka, perhatian mereka dan menghormati diri sendiri.

3. Kita dapat mengembangkan praktek manajerial, tidak terpisah dari kepemimpinan tetapi intrinsik untuk itu. Pemisahan Itu hanya mendorong pandangan heroik kepemimpinan, naik di atas alas, terputus dari fungsi sehari-hari organisasi. Pemimpin sejati adalah berhubungan, di lapangan: mereka harus mengelola, hanya sebagai manajer harus memimpin. Kita dapat mendorong pengembangan manajemen di kelas manajer yang membawa bersama-sama dengan rekan-rekan mereka untuk mencerminkan berpikir tentang pengalaman mereka sendiri.

Kepemimpinan tradisional yang mencerminkan gaya kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepatuhan dan loyalitas, mengedepankan kepentingan orang lain (masyarakat) serta nilai toleransi yang tinggi, serta memberikan contoh yang baik kepada yang dipimpinnya dengan mengutamakan nilai-nilai moral di dalam masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Akan tetapi, tipe ini mencerminkan proses penguasaan, terlepas dari hal ini tipe kepemimpinan ini lebih mengutamakan aspek moral karena aspek moral sangat menentukan berjayanya dan tidak berjayanya seorang pemimpin karena moral merupakan landasan dan kriteria utama dari masyarakat, maka tidak diragukan lagi bahwa proses kepemimpinan ini mendapat simpati dari masyarakatnya. Tipe pemimpin seperti ini harus rela mengorbankan harta bahkan jiwanya untuk kepentingan masyarakat, tipe pemimpin ini harus bertindak sebijaksana mungkin dalam rangka mengayomi, menuntun dan mensejahterakan.

Mentransformasikan nilai, pemikiran atau ajaran di masa lalu untuk ditarik ke masa kini, memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Hal tersebut dikarenakan budaya luhur (kearifan lokal) menjadi diskursus. Ketika menjadi pemimpin, orang Jawa memiliki beberapa semboyan dan pandangan hidup yang selalu harus dilaksanakan agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik karena diiringi dengan sikap-sikap yang arif dan bijaksana. Sikap dan pandangan itu antara lain ialah seorang pemimpin harus dapat *hamangku*, *hamengku*,

hamengkoni. *Hamangku* diartikan sebagai sikap dan pandangan yang harus berani bertanggung jawab terhadap kewajibannya, *hamengku* diartikan sebagai sikap dan pandangan yang harus berani *ngrengkuh* (mengaku sebagai kewajibannya dan *hamengkoni* dalam arti selalu bersikap berani melindungi dalam segala situasi. Jadi, seorang pemimpin dalam pandangan masyarakat Jawa itu harus selalu berani bertanggung jawab, mengakui rakyatnya sebagai bagian dari hidupnya dan setiap saat harus selalu melindungi dalam segala kondisi dan situasi.

Ungkapan yang paling populer dalam dunia pendidikan adalah *ing arsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Ungkapan ini juga berasal dari bahasa Jawa dan mengandung nilai-nilai yang sangat baik untuk panutan seorang pemimpin. Apabila seseorang benar-benar ingin disebut sebagai seorang pemimpin, dia harus selalu berada di depan untuk memberikan contoh yang baik dalam bentuk sikap, ucapan, dan tindakan yang selalu konsisten. Manakala seorang pemimpin berada di tengah tengah rakyatnya, dia harus *mangun karsa* (memberi semangat) agar rakyat tidak mudah putus asa jika menghadapi segala macam cobaan. Ketika dia ada di belakang dia harus selalu *tut wuri handayani* (mau mendorong) agar rakyatnya selalu maju.

Ketika seorang pemimpin memiliki sikap dan pandangan hidup yang baik rakyat akan selalu *melu handarbeni, melu hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani* dalam arti segala prestasi yang dicapai dalam suatu tempat atau negara akan selalu dijaga oleh rakyatnya dengan baik karena rakyat merasa ikut memiliki *melu handarbeni*, dan jika ada orang lain yang akan merusak tatanan yang sudah mapan, rakyat juga akan ikut membela *melu hangrungkebi*. Namun, semua itu dilakukan setelah mengetahui secara pasti duduk persoalan mana yang benar dan mana yang salah dengan *mulat sarira hangrasa wani* (mawas diri).

Berdasarkan pandangan di atas, seorang pemimpin akan semakin berwibawa dan dapat menyelesaikan segala persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru. Karena kewibaannya itulah seorang

pemimpin memiliki kekuatan sehingga akan berani *nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake*, artinya segala persoalan dapat diselesaikan sendiri dengan baik tanpa harus merendahkan martabat orang lain yang bermasalah dengan dirinya. Karena kewibawaan itu pulalah. Seorang pemimpin harus selalu bersikap dermawan kepada orang lain yang kekurangan. Seorang pemimpin sejati memiliki sikap dan pandangan *weweh tanpa kelangan* (memberi tanpa harus kehilangan sesuatu) karena seorang pemimpin *sugih tanpa bandha* (kaya tanpa harta). Itulah beberapa ungkapan yang merupakan kearifan lokal dalam budaya Jawa yang penuh dengan nilai-nilai luhur untuk seorang pemimpin. Sebaiknya ungkapan-ungkapan seperti mulai diajarkan dan dikenalkan pada generasi muda saat ini agar ke depan ketika mereka memimpin memiliki dasar nilai dan moral yang kuat. Untuk seorang pemimpin kearifan-kearifan lokal dalam budaya tersebut patut diterapkan dan dihayati karena mengandung nilai-nilai yang sangat luhur. Apabila semua pemimpin *eling 'ingat'* semua pepatah, ungkapan dan nilai-nilai budaya niscaya selama memimpin akan selalu didukung oleh rakyatnya

C. Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal Daerah

Ditengah era globalisasi dewasa ini, melirik sejarah dan kearifan lokal budaya masa lampau merupakan sikap yang cukup bijaksana. Mengapa? Ternyata, tanpa kita sadari, banyak manfaat serta informasi budaya hasil kreativitas dan warisan *karuhun* (warisan leluhur) yang bisa digali dan diungkap dimasa kini.

Salah satu sumber informasi budaya masa lampau yang sangat penting adalah *naskah*, yang dapat dipandang sebagai dokumen budaya, karena berisi berbagai data dan informasi ide, pikiran, perasaan, dan pengetahuan sejarah serta budaya dari suatu bangsa atau kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Sebagai sumber informasi, dapat dipastikan bahwa naskah-naskah *buhun* (kuno) termasuk salah satu unsur budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial budaya masyarakat yang melahirkan dan

mendukungnya, tertulis pada kertas, daun lontar, kulit kayu, bilahan bambu, atau rotan, dll.

Naskah-naskah tersebut secara umum isinya mengungkapkan peristiwa masa lampau yang menyiratkan aspek kehidupan masyarakat, terutama tentang keadaan sosial dan budaya, yang meliputi: sistem religi/keagamaan, teknologi dan benda materiil, mata pencaharian hidup/ekonomi, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan/pendidikan, bahasa, dan seni (Koentjaraningrat, 187; Suryani NS., 2010: 48).

Seberapa penting sebuah ‘naskah kuno’ bagi peradaban dan perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat masa kini? Naskah sebagai dokumen budaya sudah tidak dikenal lagi. Meskipun sebenarnya masih menarik untuk digali, ungkap, dan bahkan dapat dijadikan sekadar tuntunan moral dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang.

Penggalian teks naskah-naskah baik Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Batak, dan lain-lain dapat membantu mengungkap kearifan lokal budaya bangsa dimasa silam yang berkaitan dengan masalah “konsep dan pola kepemimpinan”. Dengan mengacu pada kearifan bangsa sendiri pasti akan lebih membumi, sebab sudah menjadi filosofi, tradisi, dan budaya yang mengakar dan teruji ratusan dan bahkan ribuan tahun sesuai dengan geografis, situasi dan karakter masyarakat itu sendiri, di mana saat ini cenderung -- untuk tidak mengatakan terlalu sering -- berorientasi pada konsep kepemimpinan model Eropa/Barat yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa.

Tetapi, bukan berarti kemudian anti dengan konsep Barat. Konsep yang baik dari Barat tetap bisa digunakan sebagai referensi, namun tidak abai terhadap kearifan lokal dengan mengutamakan dan melakukan penggalian konsep-konsep kearifan lokal yang sudah teruji. Adapun konsep Barat bisa berperan sebagai pendukung dari konsep kearifan lokal sehingga konsep-konsep, ilmu, dan filosofi lokal bisa menjadi Tuan di rumah sendiri.

Untuk itu, selayaknya kita mau bercermin terhadap kebudayaan bangsa sendiri. Mencerna kearifan lokal yang terpendam

dalam khazanah budaya peninggalan nenek moyang. Khususnya yang tercermin dalam *naskah* dan berhubungan dengan masalah kepemimpinan.

Sejatinya, bangsa ini kaya dengan kearifan lokal rupa-rupa kepemimpinan. Kearifan lokal kepemimpinan itu, diantaranya dikenal dengan istilah “*parigeuing*” (mengingat, menyadarkan, *eling*), sebagaimana tertuang dalam naskah Sunda *buhun* abad 16 (1518 M), berkenaan tuntunan moral atau pedoman bagi pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinannya agar berhasil dan dicintai, baik oleh rakyat maupun bawahan. Di dalamnya berkaitan erat dengan segala aspek kehidupan antara pemimpin dengan yang dipimpinnya serta aspek ‘real’ yang terjadi di masyarakat kini.

Masalah kepemimpinan terungkap dalam naskah Sunda Abad ke-16 sebagaimana disebutkan dalam naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* (SSK), *Fragmen Carita Parahiyangan* (FCP), *Amanat Galunggung* (AG), dan *Sanghyang Hayu* (SH). Naskah-naskah tersebut berupa daun lontar, beraksara serta berbahasa Sunda *buhun* (kuno) yang bisa jadi kurang dikenali dan dipahami lagi oleh sebagian masyarakat dimasa kini.

Seorang pemimpin menurut naskah SSK, harus menjiwai konsep ‘tiga rahasia’ sebagai peneguh alam buana agar berhasil mencapai kejayaan atau lebih dikenal dengan konsep *Tri Tangtu Dibuana* yang dikemas dalam konsep ‘*trigeuing*’ (tiga peringatan) yakni: sebagai *Prabu*, *Hulun*, *Palanka* (Pemimpin, Abdi, Negara) atau lebih spesifik *parigeiung*, *geuing*, *upageuing* (Pemimpin, Sandang, Papan). Ada pun yang tertulis dalam naskah SH, ketiga rahasia tersebut dibagi menjadi lima bagian sehingga jumlahnya menjadi lima belas karakter yang harus mendarah daging dalam diri pemimpin, yaitu:

1. *Budi* (bijak)-*Guna* (arif)-*Pradana* (saleh/utama/mulya)
2. *Kaya* (sehat)-*Wak* (bersabda)-*Cita* (hati)
3. *Pratiwi* (membumi)-*Akasa* (angkasa)-*Antara* (madya)
4. *Mata* (penglihatan)-*Tutuk* (ucapan)-*Talinga* (pendengaran)

5. *Bayu* (ucapan/angin)-*Sabda* (itikad/perbuatan)-*Hedap* (kalbu/pikiran).

Disamping itu, seorang pemimpin dalam naskah ini juga harus berpegang teguh kepada prinsip *astaguna* (delapan kearifan), yaitu: *Animan* (lemah lembut, santun); *Ahiman* (tegas); *Mahiman* (cerdas, berwawasan luas); *Lagiman* (terampil, cekatan); *Prapti* (tepat sasaran); *Prakamya* (ulet dan tekun); *Isitwa* (jujur, benar); dan *Wasitwa* (terbuka).

Salah satu prasyarat untuk menjadi pemimpin yang sempurna, ebelum seseorang menjadi pimpinan ia harus bisa menjadi seorang abdi yang setia dulu (*satya dikahulunan*), yakni harus mempunyai sifat-sifat tidak pernah mengeluh, tidak mudah kecewa, tidak sulit diperintah, tidak pernah iri dengki, tidak pernah goyah kesetiiaannya, tidak pernah melanggar pantangan, tidak mencelakakan sesama (*Mulah luhya, Mulah kuciwa, Mulah ngontong dipiwarang, Mulah nyetnyot tineung urang, deungdeungeun sakahulunan*). Disamping itu sebagai seorang Abdi juga harus memiliki kepribadian *opat* larangan (empat larangan), tidak mudah tersinggung, merajuk, menggerutu, menyerah (*mulah babarian, mulah pundungan, mulah kukulutus, mulah humandeouar*).

Pemimpin yang legendaris atau namanya harum mewangi menurut SSK adalah pemimpin yang memiliki sifat *Dasa Prasanta*, yaitu sepuluh cara memberi perintah yang baik yang mampu menenangkan hati. Berdasarkan SSK, seorang pemimpin digelar sebagai tokoh, jika pribadinya sudah melekat karakter kepepmimpinan yang disebut *Pangimbuhing Twah* atau pelengkap untuk mempunyai tuah/kharisma/pamor.

Seorang pemimpin yang baik harus memiliki sikap positif, mampu berpantang/menjauhi kesalahan-kesalahan yang negatif agar kepeimpinannya berkharisma sehingga akan mampu mewujudkan pemimpin sebagai ‘**Master**’ yang meleghenda. Maka harus menjauhi watak manusia yang membuat kerusakan di dunia yang disebut *Catur Buta, Burangkak* (kasar), *Marimis* (menjijikan), *Marende* (sadis), dan *Wirang* (licik).

Konsep kepemimpinan Sunda menurut SSK, FCP, SH, AG setidaknya harus mampu berperan sebagai *leader*, manajer, entertainer, entrepreneur, *commander*, *designer*, *father*, *servicer*, dan *teacher*. Kesembilan kriteria tersebut selayaknya bisa diejawantahkan dan dicerminkan dalam diri dan sikap seorang pemimpin dan kepemimpinannya, menuju pemimpin ideal. Sehingga apabila seseorang telah memiliki kesembilan kriteria tersebut maka ia akan menjelma sebagai **Master Leadership** atau ‘tokoh’ yang legendaris, yang harum mewangi namanya sebagaimana gelar raja-raja di Sunda-Galuh dan Pajajaran yang lebih dikenal sebagai “Prabu Siliwangi” yakni seorang raja yang dicintai, dikagumi, dan disegani masyarakatnya, serta mampu memberdayakan dan menyesjahterakan orang banyak, masyarakat yang (*ngertaken jalma rea*) Tata Tentrem Kerta Raharja.

D. Kepemimpinan Berbasis Pelayanan

Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Dalam konteks administrasi publik, paradigma baru kepemimpinan aparatur negara yang perlu dikembangkan adalah kepemimpinan berdasarkan pelayanan. Mengapa pelayanan yang menjadi pertimbangan sebagai dasar paradigma baru kepemimpinan aparatur negara? Ada beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, bahwa pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Maknanya, buruknya praktik governance sebagai akibat kepemimpinan aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini berarti, jika terjadi perubahan yang signifikan pada ranah kepemimpinan yang berbasis pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas. Dengan menjadikan pelayanan publik sebagai nilai dan jiwa kepemimpinan aparatur negara, maka diharapkan good governance akan secepatnya terwujud dan toleransi terhadap bad governance akan dapat dihentikan. Kedua, bahwa salah satu makna penting dari governance yang membedakan dengan

government adalah keterlibatan aktor-aktor di luar negara dalam merespon masalah-masalah publik. Governance lebih luas government karena dalam praktik governance melibatkan unsurunsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Selain itu, mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance seperti efisien, nondiskriminatif, berkeadilan, berdaya tanggap tinggi, dan memiliki akuntabilitas tinggi dengan mudah dikembangkan parameternya di dalam ranah pelayanan publik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. Pemerintah sebagai representasi Negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki high stake dan menjadi pertarungan yang penting bagi ketiga unsur governance, karena baik buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasi-lan para pemimpin dalam mewujudkan pelayanan publik.

Keberhasilan sebuah rezim dan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayan-an publik yang baik dan memuaskan masyarakat. Dengan memperhatikan berba-gai hal di atas, para pimpinan di jajaran aparatur negara memiliki kepentingan untuk melakukan pembaharuan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Nasib mereka, apakah dapat mempertahankan jabatannya atau tidak dipengaruhi kualitas pelayan-an publik yang diberikan. Pertimbangan tersebut memperkuat niat membangun paradigma baru kepemimpinan yang berbasis pelayanan. Pelayanan sebagai sebuah konsep dasar paradigma baru pemimpin, berangkat dari pemikiran bahwa, nilai dasar dari ajaran administrasi publik adalah "memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan siapa yang dilayani". Melayani bermakna memberikan sesuatu jasa atau dalam bentuk lain secara ikhlas kepada orang lain (masyarakat) atau pelayanan berdasarkan hati nurani. Sikap ikhlas menuntut suatu komitmen yang kuat terhadap diri sendiri, institusi

dan masyarakat yang dilayani serta pengorbanan. Komitmen bermakna sikap keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani. Sebagai sebuah proses, komitmen menuntut konsistensi dari para pemimpin. Sikap ini menjadi penting, karena konsistensi akan memberikan kenyamanan dan ketenangan serta keamanan bagi masyarakat. Sedangkan sikap pengorbanan menunjuk pada sikap menempatkan kepen-tingan orang lain (masyarakat yang dilayani) dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan/ kelompoknya. Selain nilai-nilai dasar tersebut, nilai-nilai kepemimpinan transformasional, transaksional dan kepemimpinan primal yang berbasis resonansi, juga merupakan indikator- indikator yang dimasuk-kan dalam mengukur kepe- min- pinan berbasis pelayanan. Berda- sarkan hasil kajian dan pengalaman empirik, membuktikan bahwa organisasi organisasi yang menda- sarkan diri pada konsep pelayanan akan lebih langgeng dibandingkan dengan pendekatan lain.

Pasaruraman, Heskett, Groon-ros, Normann dan para pakar service management lainnya, yang mengembangkan model kualitas pelayanan (dalam Jan Hendrik Peters, 2006), menemukan bahwa faktor kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan dalam manajemen pelayanan. Dari konsep-konsep yang dikembangkan, keterlibatan para pemimpin sangat tinggi dan menentukan keberhasilan pelayanan yang dilakukan organisasi. Bahkan dalam model pelayanan yang dikembangkannya, secara tegas menempatkan kepemimpinan sebagai faktor utama dalam kualitas manajemen pel- a- ya- na- n. Kajian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (2000), dan hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (2005, 2006), walaupun secara eksplisit tidak dikemukakan namun hasilnya menunjukkan bahwa faktor kepe- min- 25 pinan aparatur pemerintah menjadi variabel yang perlu diperhitungkan dalam pelayanan. Pada tingkat lokal daerah, memperlihatkan bahwa daerahdaerah yang unggul dan berkembang pesat, karena daerah tersebut dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kecerdasan pelayanan yang prima. Beberapa daerah yang dapat dikemukakan antara lain, Provinsi Gorontalo,

Kabupaten Sragen, Kabupaten Solok, Kabupaten Karangayar, Kotamadya Tarakan, dan Kabupaten Jembrana, dan daerah lainnya dengan ciri khas jenis pelayanan masing-masing daerah. Kemajuan yang dicapai masing-masing daerah apabila dicermati lebih disebabkan peran kepemimpinan pelayanan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kalau terjadi penggantian kepemimpinan? Apakah pemimpin berikutnya minimal sama atau lebih baik masih belum dapat dijawab. Hal ini oleh karena sistem politik kita menghendaki hanya paling banyak 2(dua) kali masa jabatan untuk Bupati/Walikota dan Gubernur. Padahal untuk membangun suatu daerah tidak cukup dalam 10 tahun. Lebih dari itu, pendekatan yang digunakan dalam memilih pimpinan daerah adalah pada pendekatan kekuasaan. Pada tingkat nasional, kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta dan para pemimpin nasional lainnya mampu memotivasi, menggerakkan seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk merdeka, karena dilandasi sikap ikhlas berkorban untuk kepentingan yang lebih besar.

Demikian juga kepemimpinan orde berikutnya yang dengan kelebihannya telah membawa perubahan besar kemajuan bangsa Indonesia. Hanya memang disayangkan, antar periode kepemimpinan sering ditemukan inkonsistensi kebijakan, sehingga rakyatlah yang harus menanggung akibatnya. Kerusakan sumber daya alam, rendahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia lebih sebagai akibat inkonsistensi kebijakan, dan lebih dari itu masih rendahnya kepemimpinan berbasis pelayanan yang dimiliki para pemimpin. Kepemimpinan berbasis pelayanan hakikatnya adalah sikap kepemimpinan yang selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kemenangan beberapa Gubernur atau Bupati yang mencalonkan kembali dan mendapat kemenangan mutlak, lebih disebabkan kualitas kepemimpinan pelayanan yang dinilai sangat baik oleh masyarakatnya. Konsep kepemimpinan berbasis pelayanan menjadi sangat penting, sebagai konsekuensi logis dalam sistem demokrasi, dimana rakyat atau masyarakat adalah yang berkuasa. Dalam konsep demokrasi, masyarakat bukan didudukkan sebagai obyek kekuasaan

tetapi sebagai subyek dan sekaligus obyek penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini bermakna sumber kekuasaan berada di tangan masyarakat. Kepemimpinan dalam sistem politik demokratis, hakikat-nya adalah kepemimpinan yang memiliki kemampuan partisipatif, kecerdasan multikultural dan sosial dan bahkan kecerdasan spiritual. Kemampuan partisipatif dimaknai, sebagai sikap kepemimpinan yang selalu mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya mau didengar saja. Kecerdasan multikultural sebagai konsep dasar kepemimpinan pelayanan, dengan asumsi dasar bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mengenal, memahami, mendalami dan menghargai nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Selanjutnya, konsep kecerdasan sosial sebagai konsep kepemimpinan pelayanan menunjuk pada suatu kemampuan seorang pemimpin terhadap aspirasi masyarakat yang dilayani. Adapun kecerdasan spiritual sebagai dasar dan landasan kepemimpinan pelayanan, bahwa dipercaya sentuhan spiritual akan lebih efektif dibandingkan pendekatan lain. Sentuhan spiritual bukan permasalahan agama, tetapi lebih pada suatu model pelayanan yang selalu dikaitkan hubungannya dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Melayani. Semua konsep dasar dari kepemimpinan berbasis pelayanan, menunjukkan bahwa diperlukan suatu proses yang cukup panjang untuk mempersiapkannya.

Seperti telah dikemukakan, negara Singapura memerlukan waktu 40 tahun lebih untuk menghasilkan kepemimpinan berbasis pelayanan. Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat survive dan memiliki daya saing tinggi, hal ini oleh karena para pemimpin aparatur negaranya memiliki daya saing tinggi di bidang kepemimpinan berbasis pelayanan. Dengan demikian, model kepemimpinan yang melayani membutuhkan suatu perubahan dalam sikap mental lebih daripada sekedar perubahan struktural. Untuk beroperasi di dalam model ini, para pemimpin harus menyisihkan ego mereka dan merangkul secara mendalam keyakinan bahwa orang-orang akan melakukan kinerja terbaik mereka dalam suatu atmosfer kebebasan dan kepercayaan

BAB 12

KEARIFAN LOKAL DAN TANTANGAN ZAMAN

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda. Kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Masyarakat memiliki sudut pandang tersendiri terhadap alam dan lingkungannya. Masyarakat mengembangkan cara-cara tersendiri untuk memelihara keseimbangan alam dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui pengembangan kearifan lokal memiliki kelebihan tersendiri. Selain untuk memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungannya, kebudayaan masyarakat setempat pun dapat dilestarikan.

Kearifan lokal memiliki banyak fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Sirtha (2003) sebagaimana dikutip oleh Sartini (2004) sebagaimana dikutip oleh Aulia (2010), menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus.

Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah:

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.

Namun, dewasa ini kearifan lokal menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam keberadaan dan kelestariannya. Kearifan lokal yang telah terbentuk sejak lama kini mulai terkikis seiring berkembangnya teknologi diikuti meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi. Suhartini (2009) menyatakan bahwa kearifan lokal-kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan.

Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap alam kini sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Begitu banyak elemen masyarakat hingga pemerintah mengadopsi berbagai teknologi untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran, tanpa pernah memperhatikan aspek kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh adalah penggunaan teknologi penangkapan ikan di Maluku yang tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya sumberdaya air dan tersingkirkannya kearifan lokal masyarakat Maluku yang disebut *sasih*¹. Sehingga pada akhirnya secara perlahan-lahan kearifan-kearifan lokal tersebut memudar bahkan menghilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu juga berakibat kepada terjadinya ketidakseimbangan lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam. Masuknya berbagai teknologi tersebut menyingkirkan peran kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan adalah norma-norma yang didasarkan pengetahuan lokal yang mengatur waktu pemanenan ikan.

Masyarakat memiliki pengetahuan pada bulan-bulan kapan ikan bertelur. Masyarakat mulai meninggalkan pola pikir holistik² dan beralih kepada pola pikir mekanistik³ serta berorientasi komersil. Sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang ingin menaklukkan alam

untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Sehingga pada akhirnya banyak terjadi berbagai bencana alam akibat keseimbangan alam diganggu.

Selain perkembangan teknologi, tantangan-tantangan lain yang dihadapi kearifan lokal-kearifan lokal masyarakat adalah pertambahan penduduk. Robert Malthus dalam Suhartini menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan, hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh pertambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret hitung (Soerjani dkk, 1997:99). Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga melakukan modernisasi pertanian dengan melakukan revolusi hijau. Dalam Revolusi hijau dikembangkan penggunaan bibit unggul, pemupukan kimia, pengendalian hama penyakit dengan obat-obatan, pembangunan saluran irigasi secara besar-besaran untuk pengairan dan penggunaan teknologi pertanian dengan traktor untuk mempercepat pekerjaan. Sebagai akibat pelaksanaan revolusi hijau yang menekankan pada tanaman padi secara monokultur dengan bibit unggul maka akan mempengaruhi kehidupan petani lokal dalam menggunakan bibit lokal yang sebenarnya mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit, pupuk kandang dan pupuk organik yang digantikan dengan pupuk kimia, penggunaan hewan untuk membajak yang digantikan traktor, penggunaan obat-obatan dari tanaman untuk pertanian dengan obat-obatan kimia. Berikut dipaparkan salah satu contoh persentase penggunaan berbagai pupuk di daerah Temanggung. Tabel berikut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia dibandingkan penggunaan pupuk organik.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, prospek kearifan lokal di masa depan bergantung dari pemanfaatan dan pemberdayaan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat guna mengelola sumberdaya alam dan lingkungan. Pengetahuan mengenai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat yang diturunkan secara turun temurun serta

inovasi dan teknologi juga mempengaruhi keberlangsungan kearifan lokal di masa depan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sudah saatnya memberlakukan kebijakan terkait adopsi teknologi penggunaannya serta difusi teknologi yang melindungi sumberdaya alam dan lingkungan melalui kearifan lokal. Berbagai kearifan lokal yang masih bertahan adalah pranoto mongso⁴ di Jawa dan nyabuk gunung⁵.

Sartini mengungkapkan bahwa ada banyak peluang untuk pengembangan wacana kearifan lokal Nusantara. Di samping itu kearifan lokal dapat didekati dari nilai-nilai yang berkembang di dalamnya seperti nilai religius, nilai etis, estetis, intelektual atau bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi dan lainnya. Maka kekayaan kearifan lokal menjadi lahan yang cukup subur untuk digali, diwacanakan dan dianalisis mengingat faktor perkembangan budaya terjadi dengan begitu pesatnya.

A. Berfikir Global Bertindak Lokal

KENYATAAN globalisasi yang dikatakan menembus batas ruang dan waktu menjadikan tema lokalitas hangat diperbincangkan. Sebuah upaya dalam kesadaran berbagsa dan bernegara dimana warganya sudah, saya rasa dan mungkin Anda rasakan, frustrasi dengan penggerak roda pemerintahan pusat. Wacana yang digulirkan dari berbagai forum diskusi, seminar, ataupun kuliah hanya satu: Perlawanan. Paradigma yang dibangun juga selalu sama, daya saing sebuah negara bangsa dalam kancah dunia internasional. Industri massif untuk keperluan global kini mulai dipertanyakan. Muncullah kemudian slogan-slogan hingga gerakan legal dan non-legal berdiri atas nama menjunjung tinggi nilai lokalitas. Ranah teknis praktis bukan dikolaborasikan, namun, justru dibenturkan dengan data-data sejarah. Sebuah niatan luhur.

Kebangkitan gerakan lokal selalu memiliki tiga senjata, yaitu tradisi, seni, dan makanan. Selain dari itu seringkali masih sulit untuk diterima. Gerakan tersebut mengambil hati masyarakat luas dengan

sebuah harapan akan kesejahteraan, lagi-lagi menyentuh dimensi ekonomis. Terkhusus untuk orang-orang yang memiliki latar belakang Jawa, pengarsipan mengenai wilayah yang mereka tempati ini tersedia dengan sangat banyak. Alhasil, acuan yang mereka gunakan dengan mudah dicari dan tidak perlu sulit riset ataupun analisis yang memakan waktu lama. Majapahit menjadi tonggak terpenting sejarah kejayaan kelompok lokal atas pendudukan wilayah lain yang disebut Nusantara. Gerakan bernafaskan lokal ini selalu memilih jalan untuk kemudian ‘menduniakan’ unsur-unsur lokal mereka. Berbeda dengan industri skala besar, mereka tetap membangun pola yang terpusat. Ini merupakan sebuah strategi defensif secara spasial yang mencakup berbagai macam sumber daya yang ada didalamnya. Kemudian yang mereka junjung tinggi hanya berada pada satu kata, keaslian. Gerakan ini dibuat seolah menjadi kesadaran komunal. Namun saya katakan ini merupakan fiktif belaka.

Gerakan untuk membangkitkan unsur lokalitas tidak dibangun atas dasar kesadaran komunal untuk menjadi sebuah wilayah yang berdikari. Pendirian gerakan-gerakan yang bersifat lokal selalu rawan ditunggangi berbagai kepentingan privatisasi. Isu pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan tradisi, seni, dan makanan sebagai pemicu ekonomi kreatif, tidaklah kemudian menjadi sebuah perlawanan yang utuh. Pada saatnya, ketika senjata-senjata ini ampuh untuk memicu perekonomian masyarakat, saat itu pula hukum alam kapitalisme bermain. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi selanjutnya. *Pertama*, terjadinya pemiskinan secara komunal; dan *kedua*, terjadi jurang kesenjangan yang begitu besar. Dalam gerakan-gerakan bernafaskan kebangkitan unsur lokal, mereka menempatkan pasar sebagai salah satu tujuan utama selain penguatan identitas. Gerakan lokal yang pendiriannya dikatakan sebagai kesadaran komunal hanya mengantarkan kepada bentuk privatisasi lain.

“Defensif lalu ofensif”

Gerakan bernafaskan lokalitas, selalu memiliki sebuah strategi yang mereka sebut sebagai strategi budaya. Mereka menolak untuk menyamakannya sebagai strategi politik. Dasar dari argumen tersebut berasal dari satu kalimat. Kekecewaan dan keputusan terhadap negara. Dalih ini selalu muncul untuk ‘memurnikan’ setiap gerak-gerik mereka dan mengatasmakan kesadaran komunal dari orang-orang yang peduli dengan budaya lokal. Legalitas mereka dapatkan dari gerakan sejenis yang ada di kancah nasional, seperti kementerian lalu turun ke dewan kesenian dan juga dinas pariwisata serta kebudayaan, provinsi lalu kaderisasi hingga tingkat desa. Paradigma yang dibangun tidak lagi diharuskan untuk bangga jika kemudian mereka ‘ditanggap’ oleh para pejabat. Mereka diberikan dikotomi untuk langsung menyasar tingkat global. Afiliasi yang paling dekat dengan gerakan ini adalah sebagai bagian dari promosi wisata. Celah mereka dapatkan dari wisata tidak kemudian menjadikan gerakan mereka hanya sebagai sebuah distributor barang siap pakai yang diambil dari etalase toko oleh pembeli.

Ketakutan nyata dari gerakan ini adalah hilangnya bentuk-bentuk dari lokalitas itu sendiri. Nilai yang kemudian terkandung didalamnya hanyalah sebagai ‘tempelan’, agar setidaknya ada pelajaran hidup yang didapatkan selain nilai ekonomis semata. Tidak berarti saya melihat tidak ada niatan baik untuk kemudian mengubah paradigma pembagian wilayah adidaya di dunia. Ketika sebuah perlawanan dengan senjata-senjata ini dikeluarkan, saya rasa pasar bukanlah tujuan yang sebenarnya. Memang pada dasarnya gerakan bernafaskan lokalitas ini memiliki niatan untuk melestarikan budaya dan juga menolak bentuk-bentuk penyeragaman atas globalisasi. Sayangnya, gerakan-gerakan semacam ini seringkali mengkerdulkan perbedaan-perbedaan. Pada satu kesempatan, dalam satu forum diskusi menghajar habis-habisan tayangan *MAHABARATA* yang akhir-akhirnya sangat digandrungi. Kemudian segala yang menjadi catatan sejarah mereka kuatkan dengan perbandingan yang seringkali sangat tidak berbanding. Dan masih banyak lagi.

“Pertaruhan identitas”

Pernah dalam sejarah Indonesia, nilai-nilai lokal sangat dipersempit ruang gerakannya. Pemerintah meneriakkan nasionalisme dengan praktik-praktik penguasaan di berbagai wilayah. Semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah mantra sakti bagi pemerintah saat itu. Sampai hari ini semboyan itu tetap menjadi mantra sakti, namun bertransfromasi. Identitas nasional bukan lagi dibentuk dan dibangun oleh pemerintah. Hari ini kesadaran berbangsa tumbuh dari pojok-pojok negeri ini.

Gerakan bernafaskan lokalitas degan gagah menyatakan identitas lokal mereka yang kemudian dibawah naungan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semangat untuk meningkatkan kesejahteraan bukan hanya untuk masyarakat di wilayah tersebut, namun juga diharapkan sebagai pemicu bagi daerah-daerah lainnya untuk melakukan gerakan yang sama. Namun, kembali lagi, faktor kesejarahan yang kemudian mendominasi bangsa ini untuk saya menjadi sebuah kerisauan tersendiri. Bagaimana mungkin, ketika sebuah wilayah di NTT membuat gerakan yang sama dengan landasan sekuat di Jawa Timur. Ketimpangan terjadi. Ada yang menjadikan gerakan-gerakan ini tidak kemudian mengambil faktor sejarah atas dominasi, yaitu pasar. Ini menjadi sebuah ajang pertarungan dari kebangkitan gerakan-gerakan lokal yang kemudian menyasar pada persaingan. Pada saat itulah kecerdikan dari aktor-aktor yang mengerti sekali bahwa manusia adalah *homo economicus* bermain.

Ketimpangan ini akan menjadikan masyarakat di sebuah wilayah tidak ingin dipersamakan dengan masyarakat di wilayah lainnya. Pertarungan wacana dari setiap gerakan lokal akan menjadikan identitas sebagai dalih pemersatu dan pada saatnya menjadi terbelah-belah. Bagi saya, ini merupakan cerminan bahwa negara ini sedang berada pada titik kegoyahan. Gerakan ini bukan hanya merujuk pada kerinduan warga negara untuk terlahir dengan identitas kultural. Lebih dari itu, gerakan ini merangsek masuk pada

nalar masyarakat bahwa negara hanya sebagai boneka dan alat penindas bagi warganya.

BAB 13

PELAYANAN PUBLIK DALAM KEARIFAN LOKAL

A. Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal: Pengalaman RSUP Dr. R. D. Kandou Manado

Jaminan Kesehatan Nasional menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh, peningkatan kesehatan, pencegahan sakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan termasuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan acuan, yaitu daftar obat Formularium Nasional atau disingkat Fornas yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas. RSUP Dr. R. D. Kandou Manado merupakan salah satu dari 3 rumah sakit di wilayah Indonesia Timur yang menjadi rumah sakit rujukan nasional. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional di era Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistem pembayaran sesuai tarif INA-CBGs, RSUP Dr. R. D. Kandou telah memiliki pelayanan operasi jantung terpadu, pelayanan endoscopy, pusat pelayanan kanker terpadu dan mulai mengembangkan pelayanan untuk transplantasi ginjal. Di samping memberikan pelayanan di bidang pengobatan dan perawatan, pihak RSUP Dr. R. D. Kandou juga mengembangkan promosi kesehatan baik secara internal maupun eksternal rumah sakit oleh dokter-dokter spesialis.

Pada sesi ini, dr. Maxi Rein Rondonuwu DHSM. MARS menjelaskan salah satu permasalahan di era Jaminan Kesehatan Nasional yang hingga kini masih belum teratasi yaitu mutu rumah sakit yang sering tak sejalan dengan kebijakan BPJS. Potret permasalahan yang diangkat yaitu pelayanan sistem rujukan, perbedaan signifikan tarif paket INA CBGs dan rumah sakit, pelayanan klaim program JKN di RSUP Dr. R. D. Kandou Manado, serta berkas pasien BPJS yang masih pending yang pada Juni 2016 mencapai angka 12.209.835.045 klaim. Kebijakan dari BPJS terkadang justru mempersulit pihak rumah sakit sehingga menambah beban subsidi yang dikeluarkan. Misalnya pada kasus di mana pasien

rujukan dari faskes 1 melalui UGD dalam keadaan sakit berat, meninggal <8 jam, penggunaan fasilitas rumah sakit dan biaya besar, namun diklaim menjadi pasien rawat jalan oleh BPJS. Sehingga menyebabkan biaya subsidi rumah sakit cenderung membengkak.

Kebijakan dan peraturan BPJS sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu dan kestabilan pelayanan peserta BPJS. Di era JKN, upaya peningkatan mutu pelayanan di RSUP Dr. R. D. Kandou harus sejalan dengan kebijakan dan implementasi program yang efisien seperti penggunaan *clinical pathway*, termasuk penggunaan obat yang rasional dan sesuai dengan Fornas. Selain itu, upaya peningkatan mutu rumah sakit juga dilakukan melalui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kegiatan teknis pengawasan mutu pelayanan medis. Penjelasan mengenai upaya peningkatan mutu ini, memunculkan sebuah pertanyaan menarik, yang tidak hanya menitikberatkan perbedaan mutu pelayanan dan kebijakan BPJS tetapi juga upaya peningkatan mutu yang dilakukan dalam hal keadaan fisik serta suasana lingkungan rumah sakit. "Apakah Green Hosiptal sudah dilaksanakan di RS Kandou?" demikian pertanyaan singkat dari Pak Audi, perwakilan dari Rumah Sakit dan Klinik Trinita. Menjawab pertanyaan ini, dr Maxi menjelaskan bahwa ada dua pengertian *Green Hospital*. Untuk pengertian sederhananya, pihak RSUP Dr. R. D. Kandou sudah melakukan tindakan penghijauan dan kerja bakti setiap hari rabu, pemisahan dan pemilahan sampah, serta pengadaan taman. Sedangkan untuk pengertian yang lebih luas, seperti penggunaan AC, lampu dan sebagainya, masih dalam tahap persiapan untuk penerapannya. Pada dasarnya, pihak RSUP Dr. R. D. Kandou sudah mengupayakan meningkatkan mutu pelayanan di berbagai aspek demi tercapainya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.

B. Percepat Reformasi Birokrasi dengan Kearifan Lokal

Nilai budaya unggul dan kearifan lokal berdasarkan di beberapa daerah terbukti mampu mendorong pertumbuhan demokrasi, dan hal itu bisa dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi birokrasi.

"Pemerintah kota Denpasar dengan moto "sewaka dharma" yang mengandung nilai prinsip melayani sebagai suatu kewajiban. Nilai ini sangat baik untuk diterapkan dalam pelayanan publik," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasjo pada pembukaan seminar internasional dengan tema Akselerasi Reformasi Berbasis Kearifan Lokal dan budaya Unggul, di Denpasar, 20/2. Ditambahkan, kearifan lokal nilai budaya setempat banyak yang bisa menjadi inspirasi dan prinsip dalam birokrasi pemerintahan. Untuk itu harus digali terus. Selain Bali, beberapa daerah lain juga telah menerapkan kearifan local dalam reformasi birokrasi antara lain Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan lain-lain.

Eko Prasjo mengungkapkan, target reformasi birokrasi yang kita lakukan yaitu menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani. Secara teori dan implementasi reformasi birokrasi mencakup dua hal yaitu reformasi struktur dan reformasi budaya.

Reformasi struktur menyangkut proses, mekanisme dan sebagainya yang dibangun dalam sistem. Sedangkan reformasi budaya terkait diantaranya mental dan perilaku. "Jika kesadaran untuk melayani ini bisa diinternalisasikan kepada pejabat dan birokrat, saya yakin, reformasi birokrasi akan berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, kita berharap nilai budaya dapat menjadi kepentingan politik bersama sehingga mampu mendongkrak budaya dalam birokrasi," ujarnya.

Wamen menambahkan, untuk tingkat nasional telah dilakukan perubahan kerangka birokrasi, perubahan manajemen sumber daya dan manajemen kinerja. Pada saat yang bersamaan, kementerian PAN-RB juga menetapkan *pilot project* kepada 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota di seluruh Indonesia.

Diakuinya, di bidang sumber daya aparatur, banyak yang harus dipecahkan, mulai dari persoalan budaya melayani serta mengubah mental, model dan perilaku aparatur yang merupakan pekerjaan sulit yang harus diselesaikan. Saat ini, Kemenpan RB telah melakukan 9 program percepatan reformasi birokrasi, di antaranya penataan struktur birokrasi, penataan jumlah, distribusi dan kualitas

PNS, pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government), penyederhanaan perizinan usaha, serta efisiensi penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.

"Memang kita menghadapi masalah SDM yang mau tidak mau harus mengubah SDM aparatur kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerusakan moral bukanlah persoalan individual, tetapi kerusakan sistem. Individu yang baik ketika masuk dalam sistem yang korup akan menjadi individu yang korup," ujarnya

Seminar yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan Universitas Udayana ini juga menghadirkan nara sumber Peter Mc Cawley dari USAID, Yusharto Huntayungo dari Kemendagri, Keokam Kraisoraphong dari Chulalongkorn University Thailand, Peneliti LIPI Siti Zuhro, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, Rektor Universitas udayana I Made Bakta.

C. Inovasi Pelayanan Publik Bergeliat, Ganjar: Kearifan Lokal Jangan Ditinggal

Kemajuan Teknologi Informasi membuat kepala daerah di Jawa Tengah berlomba-lomba membuat inovasi pelayanan publik. Berbagai aplikasi dimunculkan untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat. Meski begitu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah dan instansi terkait tidak melupakan kearifan lokal dalam inovasi pelayanan publik tersebut. Menurutnya, sebagus apapun platform yang dibuat, jika tidak sampai kepada masyarakat maka akan sia-sia.

"Kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan dalam pembuatan inovasi pelayanan publik. Sebab saat orang berlomba-lomba membicarakan teknologi, pertanyaannya adalah sampai kepada masyarakat atau tidak," kata Ganjar saat menjadi narasumber talkshow Pameran Inovasi Kepemimpinan di Auditorium Sasana Widya Praja BPSDMD Jateng, Rabu (12/12/2018).

Menurut Ganjar, tidak dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat saat ini melek teknologi. Untuk itu, jika inovasi pelayanan tidak terjangkau, diperlukan penyampai pesan kepada masyarakat. "Siapun harus dilibatkan, bisa kelompok pengajian,

PKK, Karangtaruna, Sekolah, Babinsa, Hansip dan semuanya yang bisa menyosialisasikan kepada masyarakat," tegasnya

Inovasi pelayanan lanjut Politisi PDI Perjuangan itu harus betul-betul berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kearifan baik lokal maupun sosial harus diperhitungkan agar inovasi yang dibuat tersebut benar-benar berfungsi baik. Ganjar juga menegaskan, bahwa inovasi pelayanan kepada masyarakat tidak harus melulu menggunakan kemajuan teknologi. Inovasi pelayanan lanjut dia juga dapat diterapkan dalam berbagai program pemerintahan.

"Misalnya persoalan sampah, harus ada inovasi pelayanan kepada masyarakat, cara buang sampah yang benar seperti apa, pengelolaannya seperti apa, cara pemilahannya seperti apa dan sebagainya," tegasnya. Penerapan kearifan lokal lanjut dia juga dapat diberlakukan terkait sanksi atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat. "Misalnya saya pernah melihat ada tulisan, Ya Allah, tolong cabut nyawa orang yang buang sampah di sini. Sebenarnya itu kejam, tapi hal-hal semacam itu diperlukan untuk mengurangi maraknya sampah di sebuah daerah," tambah dia.

Lebih lanjut Ganjar menerangkan, penerapan inovasi pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik. Banyak inovasi pelayanan publik bermunculan yang semakin memudahkan masyarakat.

"Saya berharap semua inovasi pelayanan publik di Jateng ini semakin membuat masyarakat mendapat pelayanan mudah, murah, cepat. Saya pesen, selain membantu masyarakat, penggunaan inovasi ini juga harus mencegah pungli ataupun korupsi," pungkasnya. Dalam talkshow tersebut, hadir pula Plh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq. Pada kesempatan itu, Taufiq menegaskan jika inovasi pelayanan publik mutlak diperlukan di zaman kemajuan saat ini.

"Meski begitu, kemajuan IT ini juga menimbulkan digital gap, di mana masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi. Di sinilah sentuhan-sentuhan manusia berperan. Dengan kearifan lokal,

tentu akan sangat bagus dalam mendukung suksesnya program pemerintahan," ucapnya.(Bowo/Puji/Humas Jateng).

D. Ganjar: Inovasi Pelayanan Publik Harus Perhatikan Kearifan Lokal

Kemajuan Teknologi Informasi (TI) membuat pelayanan publik meningkat. Berbagai inovasi dilakukan kepala daerah dengan membuat aplikasi untuk mempermudah akses pelayanan publik. Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, saat menjadi narasumber *talk show* Pameran Inovasi Kepemimpinan, di Auditorium Sasana Widya Praja BPSDMD Jateng, Rabu (12/12), meminta kepala daerah dan instansi terkait tidak melupakan kearifan lokal dalam inovasi pelayanan publik tersebut. Menurutnya, sebagai apapun platform yang dibuat, jika tidak sampai kepada masyarakat maka akan sia-sia

"Kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan dalam pembuatan inovasi pelayanan publik. Sebab saat orang berlomba-lomba membicarakan teknologi, pertanyaannya adalah sampai kepada masyarakat atau tidak," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, tidak dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat saat ini melek teknologi. Untuk itu, jika inovasi pelayanan tidak terjangkau, diperlukan penyampai pesan kepada masyarakat. Menurutnya, inovasi pelayanan harus betul-betul berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kearifan baik lokal maupun sosial harus diperhitungkan agar inovasi yang dibuat tersebut benar-benar berfungsi baik. Ditambahkan, inovasi pelayanan kepada masyarakat tidak harus melulu menggunakan kemajuan teknologi. Inovasi pelayanan, juga dapat diterapkan dalam berbagai program pemerintah.

"Misalnya persoalan sampah, harus ada inovasi pelayanan kepada masyarakat, cara buang sampah yang benar seperti apa, pengelolaannya seperti apa, cara pemilahannya seperti apa dan sebagainya," tegasnya.

Plh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, menegaskan, inovasi pelayanan publik mutlak diperlukan di zaman kemajuan saat ini. "Meski begitu, kemajuan TI

juga menimbulkan *digital gap*, dimana masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi. Disinilah sentuhan-sentuhan manusia berperan. Dengan kearifan lokal, tentu akan sangat bagus dalam mendukung suksesnya program pemerintahan," ujarnya.

E. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Berasaskan Kearifan Lokal

Staf Ahli Walikota Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Jamaluddin Badar menghadiri Launching dan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Berasaskan Kearifan Lokal dengan Slogan Gogahi Malaha Te Ona Masyarakat, Kamis (7/12).

Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Berasaskan Kearifan Lokal, yang dilaksanakan oleh Reformier Umar Yahya yang juga Sekretaris Pengadilan Agama Soasio tersebut, berlangsung di Pengadilan Agama Soasio dalam rangka Diklat PIM IV.

Jamaluddin Badar dalam sambutannya, menyampaikan penghargaan atas niat baik dan upaya Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk ikut ambil bagian dalam mensosialisasikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dengan tata cara budaya Tidore, dalam kegiatan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Soasio.

Saat ini, pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Kesultanan Tidore, terus bekerja keras dan bersenergi, untuk menjadikan budaya Tidore sebagai roh dari perilaku kehidupan aparatur sipil negara dan masyarakat, kapan dan dimanapun berada.

Dengan mulai diberlakukannya pelayanan publik berasaskan nilai kearifan lokal dengan tata cara budaya Tidore di lingkungan pengadilan Agama Soasio nanti, diharapkan dapat menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh instansi lainnya di daerah ini.

Sementara ketua Pengadilan Agama Soasio Djabir Sasole mengatakan, apa yang dilaksanakan oleh Reformier Umar Yahya merupakan suatu proses pendidikan.

Jauh sebelum pengadilan terbentuk, maka dahulu masyarakat senantiasa menyelesaikan perkara dengan mengedepankan

penyelesaian secara adat atau penyelesaian tersebut berusaha diselesaikan dengan mengedepankan kearifan lokal seperti budaya.

Dikatakannya, Kesultanan Tidore merupakan induk dari Pengadilan Agama Soasio dan untuk kedepannya Kesultanan Tidore menjadi patner dari Pengadilan Soasio sebagai mediator karna kedepannya persoalan-persolan semakin komplek dan pihak Kesultanan sangat bisa meminimalisir kejadian-kejadin di lapangan. “Untuk itu, simbol-simbol yang akan dihadirkan membawa simbol Kesultanan Tidore yaitu dengan memakai kostum Kesultanan di hari yang telah ditentukan untuk pelayanan publik, “ katanya.

Sementara Reformer Umar Yahya mengatakan bahwa tujuan proyek perubahan ini adalah terwujudnya peningkatan Pengelolaan Pelayan Publik berazaskan Kearifan Lokal di Pengadilan Agama dan di seluruh Instansi di Kota Tidore Kepulauan. Diharapkan nantinya membangkitkan kembali nilai budaya dalam setiap pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga nilai kearifan lokal ini akan mampu memberikan nilai kepuasan tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan dan menjadi solusi terbaik dalam setiap penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arep, Ishak dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen Motivasi*. Penerbit PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Adisasmita, R. 1989. *Beberapa Dimensi Ekonomi Regional*. Ujung Pandang: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Arsyad, L. 2009. Fakultas Ekonomi. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Balai Penerbit
- Aziz, Iwan., Jaya. (1994). *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Artikel Wikipedia *Ensiklopedia Bebas mengenai tenaga kerja*
- Atep Adya Brata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.
- Brief. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Atep Adya Brata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Sosial RI. (2006). *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil*
- Erhard, Eppler. (2009). *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal.*, Forumprees, United kingdom.
- Harley David. (2009). *Neoliberalism dan Restorasi Kelas Kapital.*, Resist Book, Yogyakarta
- Kadir, Mardjan dan Umar Ma'sum. Pendidikan Di Negara Sedang Berkembang . 1982. Surabaya:Usaha Nasional.
- Kartono, Kartini. (1998). *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpinan Abnormal Itu ?* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kernaghan, Kenneth, 2001. *International Comparison in Resource Management Reform*, Kanada: Canadian Centre for Management Development

- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Jakarta: Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Jakarta: Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN. Seemoreat:
- Masruri, Muhsinatun Siasah,dkk. Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup. 2002. Yogyakarta: UPT MKU UNY
- Muthahhari, Murtada. (2012). *Masyarakat dan Sejarah.*, Rausyan Fikr Institute, Yogyakarta
- Menheere, Sebastian C.M and Spiro N. Pollalis. 1996. *Case Studies On Build Operate Transfer*. The Netherlands: Delft University of Technology, Faculty of Architecture, Project Management and Real Estate Development.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). *Commitment in the worplace theory research and application*. California: Sage Publications.
- Mingst, Karen A. and Jack L. Snyder. *Essential Readings in World Politics 2nd Edition*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Pandur, Servas. (2011). *Testimoni Antasari Azhar (Untuk Hukum dan Keadilan).*, PT. Laras Indra Semesta, Jakarta
- Pollitt, Christopher, & Geert Bouckaert, 2000. *Publik Management Reform: A Comparative Analysis*, London: Oxford University Press.
- Publik Service Department, 1993. *Publik Officers (Conduct and Discipline) Regulations*, Malaysia.
- Publik Service Department, 1993. *Upholding the Integrity of the Malaysian Civil Service*, Malaysia.
- Rakhmat, Jalaluddin.(1999). *Rekayasa Sosial.*, Remaja Yosdakarya, Devisi Buku Umum, Bandung.
- Rachmawati, Iva. 2012. *Memahami Perkembangan Studi; Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Robbins, S. P. (2003). *Organizational behavior* (10th ed). New Jersey : Prentice Hall.
- Sandi, I Made. Geografi Regional Republik Indonesia. 1985. Jakarta:Jurusan Geografi FMIPA UI
- Sartini. (2004). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat.*, *Jurnal Filsafat*
- Shadr, Ayatullah Muhammad Baqir. (2013). *Falsafatuna.*, Rausyan Fikr Institute, Yogyakarta
- Soerjani, Moh,dkk. Lingkungan Sumber Daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan. 1987. Jakarta:UI-PRESS.
- Simanjuntak P. J. 2009. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soedjadi, F. X. 2008. *Organisasi dan Metode Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen.* Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Soepono, p. 1993. *Analisis Soifft Share, Perkembangan dan Penerapan Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2 (1), 43-45.*
- Sukirno, S. 2011. *Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah dan Dasar Kebijakan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryana. 2012. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan pendekatan.* Bandung: Salemba Empat.
- Sali Susiana (2009). Jurnal “*Integrasi Anggaran Responsif Gender (Gebder Budgeting) Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*”.
- Sarah maddison and Richard Denniss, (2009) *an introduction to Australian Public Policy, theory and practice*

- Tim Dosen UPT-MKU Unhas. (2009/2010)., *Wawasan ipteks*
- Tjokroamidjojo, B. 2009. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, P. M. 2000 *Economic Deveploment Sixth Edition*. Eidenburg Gate Harlow.
- Trias Aditya (2009). Jurnal “*Perencanaan Dan Penyelesaian Masalah Infrastruktur Perkotaan Melalui Integrasi Sig Kolaboratif Dan Sig Partisipasi Publik*”,
- Tedi Sudrajat (2009). Jurnal “*Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*”, oleh:
- Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra (2006). Jurnal “*Kebijakan Strategi Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan*”.
- Tony Braind and Elle hoffer, 2009, *Public management and goufermance*, New –York and Canada, Roultdage
- William N. DUNN. 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. University of D, Yogyakarta, Gajah Mada university Press.
- Wayan Rusastra dan M. Suryadi (2004). Jurnal “*Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian Dan Implikasinya Dalam Peningkatan Produksi Dan Kesejahteraan Buruh Tani*”.
- Wahono,dkk. Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 1995. Semarang:Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- Yanto, Subari & Arifin Zainal. (2007/2008). *Filsafat Ilmu (Pengantar Kuliah Umum Di Perguruan tinggi)*., Anugerah Mandiri, Makassar
- Zulkarnain, A.Ag., & Febriamansyah, R. (2008).*Kearifan Lokal dan Pemanfaatan dan Pesisir.*, Jurnal Agribisnis Kerakyatan, 1

Pelayanan Publik

Berbasis *Kearifan Lokal*

Dr. Husain As, M.Pd., dilahirkan di Pangajene tanggal 18 Juni 1957. Penulis mengawali pendidikan tingginya pada DIII Akademi Manajemen Koperasi Ujung Pandang tahun 1983, kemudian melanjutkan pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara pada STISIPOL Ujung Pandang tahun 1990, kemudian ke jenjang S-2 PIPN/Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Makassar tahun 2002, selanjutnya jenjang Doktorat S-3 Konsentrasi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar 2018.

Menjadi Instruktur BLKI pada Dep. Nakertrans Sul-sel tahun 1980-2002, Dosen DPK Kopertis Wil. IX Sulawesi, Ketua III Bidang Kerahasiaan dan Kepala pusat Penelitian & Abdinas P3M STKIP PI Makassar juga menjadi pengajar pada jenjang S1 & S2 STKIP PI Makassar. Selain itu penulis pun memiliki beberapa Karya tulis ilmiah/penelitian diantaranya dalam bentuk Jurnal: Analisis Pengetahuan dan Keterampilan Sekretaris Alumni BLKI Makassar, Pengaruh Penggunaan Sarana Audio Visual dalam proses Belajar Mengajar terhadap peningkatan Lulus BLKI Makassar, Pengaruh Sarana dan Prasarana Sekolah terhadap peningkatan Mutu Pendidikan, Pengelolaan Dana Bos Berdimensi RKAS dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar.

Sementara acara ilmiah yang pernah dikikutinya antara lain : Lokakarya Metodologi Pelatihan Berorientasi Kegiatan, Seminar Overview LAPSD Automotive Project & produkenya serta Competence Based Training (CBT), Seminar Nasional Internasionalisasi Pendidikan Mengancam Eksistensi dan Survival Dunia Pendidikan Indonesia, Peserta Seminar Best Practice Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Perguruan Tinggi se Sulawesi Selatan, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Model Ekonomi Kreatif), Semiloka Tim Pembina Bimtek Sekolah Dasar Bersih & Sehat Tahap I, Seluruh Indonesia, di Hotel Grand Cikarang Banten, International Conference on Mathematics, Sciences, Technology, Education and Their Applications, Narasumber Lokakarya Standar Akademik, SOP, RENSTRA dan Pedoman Penulisan Tesis, Participant International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching and Research, Peserta Seminar Kerjasama Pendidikan *Arem Education Secretariat*, di Makassar.

Adapun sederet penghargaan yang pernah diterimanya diantaranya yaitu : Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI BJ Habibie, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, Piagam Penghargaan Atas Partisipasi & Dedikasinya dalam Penyelenggaraan PEMILU dan PILPRES dari KPU Pusat, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, Piagam Penghargaan dari Ketua PMI Makassar, sebagai Pendonor Darah Sukarela

Penerbit
SYAKIR MEDIA PRESS

ISBN 978-602-9126-4-2

9 786029 912642